

TFCI

TROPICAL FOREST CREDIT  
INTEGRITY GUIDE

# Panduan Integritas Kredit Hutan Tropis untuk Perusahaan Versi 2

Melakukan Diferensiasi Kredit Karbon Hutan Tropis  
Berdasarkan Dampak, Kualitas dan Skala

Direvisi Januari 2023 untuk memaskkan  
Panduan Implementasi



# Organisasi Perumus



Foto-foto yang digunakan di seluruh dokumen ini disediakan oleh Coordinator of the Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA)

# Daftar Isi

04	<b>Ringkasan</b>
09	<b>Latar Belakang, Konteks dan Pertimbangan</b>
10	Urgensi Penghentian Perusakan dan Degradasi Hutan Tropis
11	Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Kaum Perempuan dan Komunitas Kurang Terlayani Lainnya
12	Pertimbangan Utama
14	Mengambil Keputusan Membeli yang Membentuk Masa Depan
15	<b>Rekomendasi Konsensus</b>
16	I. Mempertimbangkan menggunakan kredit karbon hutan tropis di dalam strategi mitigasi di luar rantai nilai (BVCM) mereka untuk menggencarkan target ambisius dekarbonisasi berbasis sains
17	II. Memastikan bahwa komponen utama integritas sosial dan lingkungan terpenuhi untuk semua kredit yang dibeli (Lihat Langkah 3 dalam Panduan Implementasi.)
20	III. Menyelaraskan pelaporan perusahaan tentang pembelian kredit karbon hutan dengan persyaratan transparansi dan akuntansi Persetujuan Paris serta dengan peningkatan dan pencapaian kontribusi tingkat nasional/nationally determined contributions (NDC)
21	IV. Dengan sigap menggeser permintaan menuju kredit yang berasal dari program-program skala yurisdiksional (termasuk proyek-proyek yang sepenuhnya diwadahi)
24	V. Memprioritaskan pembelian kredit yang berasal dari program dan proyek yang mengurangi ancaman terhadap hutan tropis yang masih ada
25	<b>Panduan Implementasi</b>
28	Langkah 1: Merencanakan Portofolio Kredit Hutan Tropis Anda agar Selaras dengan Kebutuhan Global Seiring dengan Perkembangannya
31	Langkah 2: Membangun Portofolio Anda dengan Pembelian yang Mendorong Permintaan akan Pemberian Kredit Skala Yurisdiksional yang Berkualitas Tinggi
34	Langkah 3: Melakukan Uji Tuntas untuk Memastikan Kredit yang Berkualitas Tinggi
40	Langkah 4: Menindaklanjuti dengan Tindakan Pelengkap dan Mengikuti Perkembangan Baru
42	<b>Lampiran</b>
44	Lampiran Rekomendasi IV: Jalur Menuju Pemberian Kredit Karbon Hutan Skala Yurisdiksional
46	Lampiran ke Langkah 1: Kredit Hutan Tinggi, Deforestasi Rendah (HFLD)
48	Lampiran ke Langkah 2: Memilih Kredit untuk Dibeli
54	Lampiran ke Langkah 3: Contoh Pertanyaan Uji Tuntas
58	Glosarium
65	Akronim
67	Catatan Akhir





# Ringkasan

**Menjaga pemanasan global agar kurang dari 1,5 derajat Celcius memerlukan pelestarian hutan tropis yang masih ada. Kita harus menjaga stok karbon ini dan kapasitas pengikatannya yang berkelanjutan. Hutan-hutan ini juga memiliki makna penting dan nilai budaya dan ekologi yang luar biasa, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya dan bergantung pada vitalitas dan keutuhannya. Sebagian besar dari hutan yang masih ada dan terancam ini berada di kawasan hutan tinggi, deforestasi rendah/high forest, low deforestation (HFLD). Tragisnya, hutan tropis memiliki nilai ekonomi jangka pendek yang jauh lebih tinggi jika pohonnya ditebang daripada sebagai ekosistem hidup. Kita mesti membalikkan persamaan itu untuk menghentikan kepunahan hutan tropis.**

Perusahaan dapat memainkan peran penting dalam menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk menjaga agar hutan ini tetap ada sebagai bagian dari strategi mitigasi iklim mereka. Urgensi untuk melestarikan hutan tropis dan upaya untuk mencapai target nol bersih telah menyebabkan permintaan akan solusi iklim alami meningkat pesat, termasuk yang didanai melalui kredit pengurangan dan penghapusan emisi karbon hutan tropis. Sejumlah organisasi yang menulis Panduan ini menganggap pasar karbon sukarela/voluntary carbon market (VCM) sebagai strategi utama untuk mendanai perlindungan hutan tropis, sedangkan sebagian lainnya berfokus pada pendanaan nonpasar. Namun, mengingat pesatnya pertumbuhan VCM, kita semua setuju akan perlunya panduan bagi perusahaan yang memilih melakukan pembelian kredit karbon tersebut untuk membantu mereka membedakan kredit berdasarkan dampak, kualitas, dan skala, dan, dengan demikian, mendorong pasar sukarela ke tingkat integritas yang lebih tinggi.

Kita tidak akan dapat memenuhi sasaran iklim global jika kita melakukan pelestarian hutan dengan cara yang berorientasi proyek dan bersifat sepotong-sepotong. Kita harus beralih ke strategi dengan skala yang lebih besar yang selaras dengan kerangka akuntansi yurisdiksional yang diimbau dalam Persetujuan Paris dan yang mendorong peningkatan tata kelola dan kebijakan publik pada skala di mana terdapat faktor penyebab kepunahan hutan.

Selain itu, kita tidak akan berhasil melestarikan hutan tropis tanpa kemitraan dan kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal (IP dan LC). Akses langsung ke pasar karbon sangat penting untuk partisipasi penuh dan adil dari wilayah Adat dalam pemberian kredit karbon hutan tropis. Yurisdiksi harus bergerak untuk memungkinkan akses tersebut dan

menganggap IP dan LC sebagai pemegang hak utama, termasuk karbon hutan yang berasal dari wilayah mereka, saat mereka membangun dan mengembangkan program pemberian kreditnya. Ini harus menjadi tolok ukur untuk program pemberian kredit REDD+ yurisdiksional berkualitas tinggi.

Perusahaan dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan peralihan ke pelestarian hutan tropis dalam skala besar, melalui kemitraan dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Kami mengimbau perusahaan-perusahaan yang ingin membeli kredit karbon hutan tropis untuk:

- 1. Berkomitmen secara publik terhadap target pengurangan emisi berbasis sains yang divalidasi oleh Science Based Target Initiative (SBTi) atau yang setara untuk memberikan transparansi dan memastikan bahwa kredit karbon yang ditransaksikan melengkapi, bukannya menggantikan, dekarbonisasi perusahaan.** Perusahaan selanjutnya harus mempertimbangkan untuk menggunakan kredit karbon hutan tropis sebagai bagian dari strategi mitigasi di luar rantai nilai/beyond value chain mitigation (BVCM) mereka.
- 2. Melakukan uji tuntas yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap kredit yang dibeli berkualitas dan berintegritas tinggi serta selaras dengan Panduan Integritas Kredit Hutan Tropis/Tropical Forest Credit Integrity (TFCI).** Menghindari pembelian kredit hutan tropis yang tidak memenuhi kriteria dalam Panduan ini.
- 3. Dengan sigap menggeser permintaan menuju kredit yang berasal dari program-program skala yurisdiksional yang diverifikasi dan divalidasi dengan standar yang paling ketat, sebagaimana dirinci dalam panduan ini, termasuk melalui perjanjian pembelian dan pembiayaan di muka untuk kredit skala yurisdiksional.** Karena kredit ini belum tersedia secara luas, sinyal permintaan yang kuat dan pembiayaan di muka diperlukan untuk menstimulasi perluasan pasokan. Kredit skala yurisdiksional mencakup kredit yang berasal langsung dari yurisdiksi yang didasarkan atas kegiatan dan kebijakan pelestarian hutan serta kredit yang berasal dari proyek yang sepenuhnya “diwadahi” dalam program yurisdiksional dan akuntansi.
- 4. Memprioritaskan pembelian kredit pengurangan emisi berkualitas tinggi daripada kredit penghapusan,** dengan maksud untuk melestarikan hutan yang masih ada sampai

tujuan global menghentikan deforestasi tercapai. Investasi dalam “kredit penghapusan” harus menjadi porsi portofolio yang lebih kecil jangka pendek dan dalam bentuk perjanjian pembelian atau pembiayaan di muka guna memastikan suplai kredit tersebut untuk memenuhi target nol bersih di masa depan.

5. **Membeli kredit HFLD yurisdiksional konservatif yang tepat, yang memenuhi kriteria TFCI untuk kualitas tinggi.** Kita setuju bahwa kredit HFLD harus dimasukkan dalam portofolio kredit perusahaan dan bahwa penilaian berkelanjutan dengan tingkat ketelitian yang tinggi diperlukan dalam ranah yang terus berkembang ini.
6. **Mendukung tindakan pelengkap yang mengedepankan pengembangan dan kinerja program yurisdiksional berkualitas tinggi.** Mengurangi deforestasi dan degradasi pada skala yurisdiksional merupakan tantangan sangat besar tapi penting yang tidak dapat dipenuhi tanpa tindakan dan tanggung jawab bersama. Panduan ini menyoroti beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendukung yurisdiksi dan berbagai pemangku kepentingan mereka dalam upaya ini dan mengakses pendanaan berbasis hasil.



Panduan TFCI versi kedua kami ini memberikan konteks dan panduan terperinci yang dibutuhkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pasar karbon sukarela untuk kredit karbon hutan tropis dengan tingkat integritas dan kepercayaan yang tinggi. Versi ini hampir sebagian besar berfokus pada integritas sisi suplai dan tidak banyak membahas pertimbangan sisi

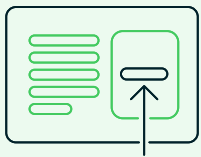
permintaan yang penting, seperti klaim penggantian atau kontribusi, yang mungkin dikaitkan dengan pembelian kredit. Ini juga merupakan bagian penting dari integritas dalam transaksi VCM dan merupakan fokus inisiatif berkelanjutan lainnya.

## Panduan TFCI Versi 2 menggantikan Versi 1, yang dirilis pada Mei 2022, dan menyertakan bagian tambahan yang berjudul Panduan Implementasi.

Bagian baru ini dan lampiran terkaitnya menguraikan Rekomendasi Konsensus awal untuk membuatnya lebih dapat ditindaklanjuti.

Tidak ada revisi substantif besar untuk Rekomendasi Status atau materi lain pada Versi 1.

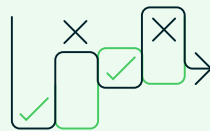
Panduan ini dibagikan kepada empat bagian:



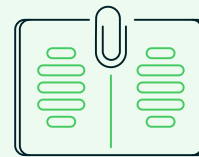
LATAR BELAKANG,  
KONTEKS DAN  
PERTIMBANGAN



REKOMENDASI  
KONSSENSUS



PEDOMAN  
IMPLEMENTASI



LAMPIRAN

## Panduan ini telah dikembangkan secara bertahap. Informasi memiliki lapisan sebagai berikut:

Bagian **Latar Belakang, Konteks dan Pertimbangan** menyampaikan isu-isu utama yang dipertaruhkan di pasar kredit karbon hutan tropis. Perhatikan kotak teks, yang berisi informasi dan perspektif penting.

**Rekomendasi Konsensus** menguraikan tujuan kami, hasil yang ingin kami capai dan arah perjalanan bagi perusahaan untuk memajukan hasil tersebut. Kotak teks di bagian ini serta lampiran menjelaskan secara lebih mendalam alasan di balik rekomendasi khusus.

**Pedoman Implementasi** memberikan panduan yang terperinci dan dapat ditindaklanjuti. Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu para pembuat keputusan dan tim yang bertanggung jawab mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi iklim/nol bersih perusahaan dalam menavigasi pasar kredit karbon hutan tropis dengan tujuan yang jelas dan integritas tinggi. Bagi perusahaan yang memilih mengupayakan kredit karbon hutan tropis sebagai bagian dari strategi mitigasi iklim mereka, bagian ini menawarkan proses yang terdiri atas empat langkah yang harus dilakukan setelah mereka berkomitmen secara publik terhadap target berbasis sains yang divalidasi oleh Science Based Target Initiative (SBTi) atau yang setara.

**Langkah 1** Merencanakan portofolio kredit hutan tropis Anda agar selaras dengan kebutuhan global seiring dengan perkembangannya.

**Langkah 2** Membangun portofolio Anda dengan pembelian yang mendorong permintaan akan pemberian kredit skala yurisdiksional yang berkualitas tinggi.

**Langkah 3** Melakukan uji tuntas untuk memastikan kredit yang berkualitas tinggi.

**Langkah 4** Menindaklanjuti dengan tindakan pelengkap dan mengikuti perkembangan baru.

## Pengembangan Panduan Ini

Panduan ini merupakan buah dari proses kolaboratif selama 18 bulan yang difasilitasi oleh Meridian Institute untuk mengembangkan panduan bagi perusahaan yang berminat membeli kredit karbon hutan tropis. Setelah beberapa bulan melakukan pertimbangan dan bertukar berbagai pengalaman dan perspektif, kedelapan organisasi perumus mengeluarkan “Draf Pernyataan Konsensus tentang Kredit Karbon Hutan Tropis Kualitas Tinggi” pada November 2021.


Proses konsultasi pertama kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia mulai dari 1 Desember 2021 hingga 15 Februari 2022.<sup>1</sup> Kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan masukan mereka. Hasilnya, pandangan kami menjadi matang dan mantap. Panduan TFCI Versi 1 dirilis pada Mei 2022.

Proses konsultasi ini juga mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan panduan lebih terperinci. Kami bekerja sama untuk menjawab sebagian isu kompleks tersebut pada tahap kedua, yang diselesaikan pada Oktober 2022. Konsultasi putaran kedua kami, Versi 2, bersifat lebih terbatas dan berlangsung pada musim gugur 2022. Lihat daftar konsultan untuk kedua putaran tersebut di bagian [akhir Panduan ini](#). Panduan TFCI Versi 2 menggantikan Versi 1 dan secara substansial menguraikan rekomendasi kami dan menerjemahkannya menjadi [Panduan Implementasi](#) yang lebih dapat ditindaklanjuti.

Panduan ini mencerminkan kesepakatan, pandangan dan rekomendasi umum dari delapan organisasi perumus yang terlibat dalam proses ini sejak awal. Kami berharap dapat terus melanjutkan keterlibatan dengan beragam pemangku kepentingan melalui kerja sama untuk memastikan bahwa kredit karbon hutan sukarela memberikan manfaat yang diperlukan sebagaimana yang dimaksudkan untuk iklim, IP, LC dan ekosistem hutan.

<sup>1</sup> Proses konsultasi dimulai pada 1 Desember 2021, dan berakhir pada 15 Februari 2022. Organisasi perumus melakukan sosialisasi draf pernyataan konsensus ini secara luas, yang dimulai dengan Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow pada awal November 2021, dan meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia melalui pengarah singkat, survei elektronik publik, tiga konsultasi regional khusus undangan di Afrika, Asia dan Amerika Latin, dan jangkauan bilateral kepada berbagai organisasi Masyarakat Adat, perusahaan dan perwakilan pemerintah. Kami menerima komentar dan saran bermutu dari 85 pihak lebih. Grup ini menilai masukan dan menentukan jenis perubahan yang akan dilakukan sebagai tanggapan, sehingga melahirkan dokumen ini.





# Latar Belakang, Konteks dan Pertimbangan

## Urgensi Penghentian Perusakan dan Degradasi Hutan Tropis

Sains jelas menunjukkan bahwa upaya menghentikan kepunahan hutan tropis<sup>2</sup>—rumah dan warisan dari Masyarakat Adat/Indigenous Peoples (IP) dan komunitas lokal/local communities (LC)<sup>3</sup> yang telah lama menjadi penjaganya—diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim dan merealisasikan tujuan Persetujuan Paris.<sup>i</sup> Namun, kejadian kepunahan dan degradasi hutan tropis terbukti sulit untuk dikurangi, yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca (GHG) yang besar dan mengancam hak, budaya dan mata pencaharian IP dan LC serta keanekaragaman hayati. Kepunahan hutan-hutan ini juga menggerus potensi besar hutan utuh dan pemulihan hutan agar dapat terus mengikat karbon dari atmosfer dan mendinginkan permukaan Bumi melalui evapotranspirasi dan proses biofisik lainnya.



2 Istilah “hutan tropis” digunakan di seluruh dokumen ini untuk mengacu pada hutan tropis dan subtropis serta bakau, lahan gambut dan lanskap lain, yang penting untuk dilestarikan dan direstorasi demi stabilitas iklim.

3 Baik MA maupun KL memainkan peran sangat penting dalam melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Inisiatif yang berbeda memilih untuk merujuk ke kelompok-kelompok ini dengan satu akronim gabungan (IPLC) atau secara terpisah (IP dan LC). Dalam dokumen ini, mereka dirujuk secara terpisah untuk mengenali kebutuhan spesifiknya dan pada saat yang sama mengakui peran penting dan sinergis yang dimainkan kedua kelompok ini dalam perlindungan hutan.

### Perlindungan Hutan Tropis dan Layanan Ekosistem yang Diberikannya

Ekosistem hidup, terutama hutan tropis dan lahan gambut, mengandung lebih dari 100 gigaton (Gt) stok karbon yang, jika lenyap, tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu yang relevan dengan penanganan krisis iklim.<sup>ii</sup> Sebelas juta hektar tajuk pohon hilang setiap tahun di kawasan tropis sehingga mengakibatkan 6,3 Gt emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) (setara dengan emisi tahunan dari sekitar 900 juta mobil).<sup>iii</sup>

Alam itu sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran ekonomi manusia. Namun diperkirakan masih ada kesenjangan pendanaan sebesar \$700 miliar per tahun untuk alam dan keanekaragaman hayati.<sup>iv</sup> Secara khusus, potensi mitigasi alam telah diabaikan: solusi iklim alami, seperti pelestarian hutan, hanya menerima 8 dari pendanaan iklim publik.<sup>v</sup> Pendanaan yang secara khusus ditujukan untuk hutan adalah kurang dari 1 persen dari total yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan internasional dalam menghentikan dan membalikkan deforestasi pada 2030.<sup>vi</sup> Akan tetapi, pencapaian emisi pemanfaatan lahan nol bersih merupakan langkah wajib untuk merealisasikan target nol bersih di semua sektor.<sup>vii</sup> Hal ini tidak dapat dicapai tanpa, yang pertama dan utama, pengentasan deforestasi dan degradasi secara cepat yang dilengkapi dengan kemajuan signifikan menuju restorasi hutan tropis.<sup>viii</sup>

Selain itu, pelestarian dan restorasi hutan tropis dan layanan ekosistem yang mereka berikan untuk masyarakat dan alam benar-benar menopang bisnis yang berkelanjutan di setiap belahan dunia. Banyak perusahaan yang memiliki ketergantungan ekstensif terhadap berfungsinya hutan dan ekosistem lain, termasuk regulasi stabilitas iklim dan hidrologi lokal, pemeliharaan produktivitas pertanian dan layanan penyerbukan, serta penjagaan kesehatan dan keselamatan publik. Ketergantungan ini, di samping kebutuhan mendesak akan kepemimpinan sektor swasta untuk mengatasi kepunahan hutan tropis, dari hari ke hari semakin urgen dan nyata saja<sup>ix</sup> sehingga secara signifikan melecut ambisi perusahaan yang sudah kuat untuk membantu mengatasi kedaruratan perubahan iklim.

## Panduan Perusahaan Seputar Pembelian Kredit Karbon Hutan Tropis

Perusahaan, yang bahu-membahu dengan pemerintah, masyarakat sipil, IP dan LC, memiliki berbagai sarana untuk membantu menghentikan kepunahan karbon hutan tropis yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi.<sup>4</sup> Minat perusahaan semakin menguat untuk membeli kredit pengurangan dan penghapusan emisi karbon hutan tropis di pasar sukarela. Pada saat yang sama, ada kesalahpahaman yang luas dan bahkan saran yang saling bertentangan dari berbagai platform dan inisiatif pasar karbon sukarela mengenai integritas kredit REDD+<sup>4</sup>, pemberian kredit kawasan hutan tinggi, deforestasi rendah (HFLD), dan peran terkait dari pengurangan dan penghapusan emisi karbon hutan.

Perusahaan yang memilih untuk membeli kredit karbon hutan tropis memerlukan panduan yang jelas untuk membedakan pembeliannya berdasarkan dampak, kualitas dan skala guna menyelaraskan portofolio kredit karbon hutan tropisnya dengan sains terbaik yang ada dan berkontribusi dalam membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius. Laporan ini menawarkan panduan tersebut. Tanpa diferensiasi ini dalam ciri mendasar kredit, laju permintaan kredit yang naik pesat berisiko menurunkan kualitas suplai dan menghilangkan kesempatan untuk memancing intervensi yang paling transformatif. Sebaliknya, pembelian kredit berkualitas tinggi dan sinyal permintaan mendatang yang berkualitas tinggi berpotensi besar untuk melestarikan hutan dan memberikan manfaat bagi IP dan LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani—sementara mereka membantu perusahaan dan masyarakat mencapai sasaran iklim dengan menstimulasi desain pasar, mempercepat pengembangan kebijakan dan menggalang pendanaan untuk solusi iklim.

Panduan ini dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan oleh individu dan tim yang bertanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan strategi mitigasi iklim/nol bersih perusahaan hingga kira-kira tahun 2030, yang merupakan kerangka waktu komitmen global untuk mengakhiri deforestasi dan degradasi hutan.<sup>5</sup> Ketika komitmen ini telah tercapai, penilaian ulang dan penyempurnaan strategi perlindungan hutan dan pemberian kredit karbon akan dibutuhkan. Kami menyadari bahwa beberapa unsur tertentu dari Panduan

ini mungkin sudah usang sebelum 2030 dan elemen lainnya mungkin akan tetap relevan lama setelah 2030.

Panduan ini juga ditujukan kepada para konsultan dan pihak-pihak yang memberi saran dan masukan kepada perusahaan seputar topik-topik ini dan oleh karena itu diperuntukkan bagi khalayak teknis yang sudah memahami kredit karbon hutan dengan baik.

Meskipun Panduan ini bukan merupakan standar bagi sertifikasi kinerja, kami sangat berharap agar pihak-pihak yang menentukan standar relevan berkenan mengintegrasikan rekomendasi ini.

Semua kredit karbon di seluruh sektor harus berkualitas tinggi dan memastikan integritas lingkungan. Meskipun fokus Panduan ini tertuju pada kredit karbon hutan tropis, kebanyakan rekomendasi kami tidak melulu berkaitan dengan hutan sehingga sebaiknya diterapkan pada kredit yang dihasilkan di semua sektor.



4 “REDD” merupakan singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation/Mengurangi Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan; “+” menandakan peran pelestarian, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan.

5 Deklarasi tentang Penggunaan Hutan dan Lahan oleh Pemimpin Glasgow, tersedia di <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

## Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Kaum Perempuan dan Komunitas Kurang Terlayani Lainnya

Masyarakat Adat dan komunitas lokal lainnya merupakan penjaga utama hutan dunia. Penelitian menunjukkan bahwa mereka telah mengelola tanah mereka secara efektif dan berkelanjutan dari generasi ke generasi meskipun minim pemilikan yang terjamin. Meskipun separuh tanah global merupakan tanah komunitas IP dan LC,<sup>xi</sup> hanya 10% tanah dunia yang diakui secara resmi sebagai milik mereka<sup>xii</sup>.

Tanah yang diatur oleh IP dan LC merupakan persentase yang besar untuk karbon hutan global<sup>xiii</sup>. Pemberdayaan IP dan LC untuk melestarikan dan memanfaatkan lahan mereka secara berkelanjutan merupakan strategi yang ampuh untuk melestarikan hutan berikut karbon, komunitas serta keanekaragaman budaya dan hayati yang ditopang oleh hutan. Penelitian terbaru dari Amazon menunjukkan bahwa tingkat deforestasi pada tanah yang dikuasai secara terjamin oleh Masyarakat Adat ternyata 50 persen lebih rendah daripada kawasan di luar wilayah Adat.<sup>xiv</sup> Dalam tahun-tahun terakhir, banyak sekali organisasi internasional melakukan penelitian dan menerbitkan laporan tambahan yang memperlihatkan peran penting MP dan KL dalam melestarikan tanah.<sup>xv</sup>

Akses langsung ke pasar karbon sangat penting untuk partisipasi penuh dan adil dari wilayah Adat dalam pemberian kredit karbon hutan tropis. Yurisdiksi harus bergerak untuk memungkinkan akses tersebut dan menganggap IP dan LC sebagai pemegang hak utama, termasuk karbon hutan yang berasal dari wilayah mereka, saat mereka membangun dan mengembangkan program pemberian kreditnya. Ini harus menjadi tolok ukur untuk program pemberian kredit REDD+ yurisdiksional berkualitas tinggi (yang selanjutnya disebut program yurisdiksional). Selain itu, badan penetapan standar harus menyediakan partisipasi penuh dan efektif oleh IP dan LC dalam proses penetapan standar untuk mendukung pembagian manfaat yang adil dan transparan serta gerakan menuju akses langsung ke pemberian kredit. Baik standar maupun pembeli kredit memiliki peran penting dalam memengaruhi yurisdiksi untuk memberikan akses langsung ke pasar karbon bagi wilayah Adat.



## Pertimbangan Utama

### Satu Alat di Dalam Kotak Peralatan Mitigasi Iklim

Pasar sukarela untuk kredit karbon hutan tropis dapat memainkan peran pelengkap yang penting dalam membantu membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius ketika menggencarkan dekarbonisasi mendalam oleh perusahaan di dalam operasi dan rantai pasokan mereka. Target dekarbonisasi berbasis sains, target deforestasi nol dan hierarki mitigasi<sup>6,xvi</sup> merupakan, komponen-komponen dekarbonisasi mendalam yang diperlukan.<sup>xvii</sup> Manfaat terbesar dari peran pelengkap ini akan dipetik ketika (a) kredit karbon ditransaksikan sebagai bagian dari strategi mitigasi di luar rantai perusahaan,<sup>xviii</sup> dan (b) ini mencerminkan tingkat dampak mitigasi iklim yang tinggi untuk kegiatan yang dilakukan, sambil tetap mendukung manfaat sekunder ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif.<sup>xix, xx</sup> (Lihat [Rekomendasi I](#).)

Beberapa organisasi yang merumuskan Panduan ini sepakat bahwa tindakan sukarela oleh perusahaan dapat berperan penting dalam menyelamatkan hutan tropis, di samping berbagai strategi dan tindakan penting lainnya untuk merealisasikan tujuan Persetujuan Paris. Sebagian kita menganggap pasar karbon sukarela sebagai strategi utama, sementara yang lainnya justru khawatir jika terlalu mengandalkan pasar sukarela dan melihat peran yang lebih penting untuk jenis-jenis mekanisme pendanaan dan intervensi lain dalam menghentikan deforestasi serta melindungi dan merestorasi hutan, strategi-strategi yang tidak dibahas dalam Panduan ini.<sup>7</sup>

Meski demikian, menghadapi urgensi pelestarian hutan tropis dan laju permintaan kredit pengurangan dan penghapusan emisi karbon hutan tropis yang pesat di pasar sukarela, kami sepakat akan urgensi perlunya panduan bagi perusahaan yang memilih melakukan pembelian tersebut.

### Klarifikasi tentang Penggunaan Istilah “Kredit Karbon”

Dalam Panduan ini, “kredit karbon” didefinisikan sebagai unit emisi yang dikeluarkan oleh program pemberi kredit karbon dan merepresentasikan pengurangan atau penghapusan emisi GHG (yaitu, “hasil mitigasi” sebagaimana dirujuk dalam perjanjian internasional; lihat [Glosarium](#) untuk definisi “hasil mitigasi iklim”). Kredit karbon secara unik diurutkan, dikeluarkan, dilacak dan dibatalkan melalui daftar elektronik. Kredit karbon dapat digunakan dan diklaim dengan berbagai cara di dalam strategi iklim perusahaan.

Meskipun Panduan ini tidak secara langsung membahas klaim penggantian atau kontribusi yang terkait dengan pembelian kredit, itu semua merupakan bagian penting dari pertimbangan integritas. Harap perhatikan bahwa istilah—dan klaim menyangkut—penggunaan kredit karbon terus berkembang mengikuti berbagai usulan dari negara tuan rumah, standar sukarela dan norma yang berlaku di pasar, serta perbedaan pandangan di kalangan organisasi yang sama-sama merumuskannya. Sebagai contoh, beberapa kredit mungkin cocok digunakan untuk klaim seperti “netralitas karbon” atau “nol bersih”,<sup>8</sup> sedangkan pembiayaan kredit atau non-kredit karbon lain justru memungkinkan pembeli merujuk kepada kontribusi yang telah dibuatnya untuk mitigasi iklim (misalnya, seperti dalam klaim kontribusi). Hal ini menunjukkan kerumitan dan nilai penting panduan dalam cara mengajukan klaim-klaim tepercaya ketika berinvestasi di mitigasi iklim di luar rantai nilai perusahaan. Inisiatif seperti Voluntary Carbon Market Integrity (VCMI) Initiative tengah mengembangkan panduan tambahan tentang cara perusahaan dapat mengajukan klaim yang terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban sukarela kredit karbon mereka.

6 Serangkaian langkah prioritas untuk membatasi dampak negatif, sebesar-besarnya, melalui penghindaran, mitigasi (atau pengurangan), restorasi dan penggantian (kompensasi). Langkah-langkah prioritas ini digunakan dalam kerangka kerja lingkungan, mulai dari manajemen limbah hingga mitigasi dampak iklim dan keanekaragaman hayati.

7 Karena cakupannya terbatas pada subtopik masalah yang diperlukan untuk menjamin integritas kesepakatan pemberian kredit (misalnya, dengan fokus pada integritas sisi suplai), maka dokumen ini hendaknya tidak ditafsirkan secara luas sebagai dukungan bagi pasar karbon sukarela untuk hutan tropis oleh semua organisasi perumus.

8 Kedua ketentuan ini mengandung arti bahwa perusahaan mengganti emisi operasional atau rantai nilai yang tersisa dengan jumlah pengurangan dan/atau penghapusan emisi yang setara yang berasal dari luar rantai nilai perusahaan.

## Akuntabilitas terhadap Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Pihak-pihak yang berusaha mengambil tindakan yang melibatkan hutan tropis mesti bertanggung jawab kepada IP dan LC yang tinggal di dalam dan/atau memiliki hak atas hutan tropis tersebut. Manfaat pelestarian hutan akan dipetik di tingkat lokal, subnasional, nasional dan global, sedangkan beban pelestarian hutannya ditanggung secara tidak proporsional oleh IP dan LC. Menyangkut pasar karbon sukarela, tindakan yang harus dilakukan tidak sekadar memastikan bahwa semua kredit karbon yang dibeli memenuhi kriteria konvensional yang ketat untuk tanggung jawab lingkungan dan sosial (misalnya, “tidak membahayakan” di semua lokasi geografi). Artinya, menyadari perlunya partisipasi penuh dan efektif dalam rancangan dan tata kelola program pemberian kredit karbon hutan dan pembagian manfaat yang adil bagi IP dan LC. (Lihat kotak yang menyertainya, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Kaum Perempuan dan Komunitas Kurang Terlayani Lainnya,” [Rekomendasi II](#), dan [Panduan Implementasi Langkah 3](#).)

## Mengambil Keputusan Membeli yang Membentuk Masa Depan

Panduan berikut menjelaskan bahwasanya perusahaan yang membeli kredit karbon hutan tropis dari pasar sukarela sebagai bagian dari strategi iklim mereka dapat mengarahkan dan memanfaatkan permintaan kredit mereka secara efektif untuk ikut menghentikan dan membalikkan proses kepunahan hutan tropis. Implementasi Panduan ini juga dapat mempercepat pengembangan saluran kredit berkualitas tinggi yang merepresentasikan hasil dalam berbagai skala. (Lihat Gambar 1 untuk grafik yang menjelaskan pergeseran yang diinginkan di lintasan pasar.)

Kami yakin bahwa komitmen dan pembelian yang selaras dengan rekomendasi kami dan yang melengkapi dekarbonisasi mendalam akan berkontribusi secara efektif bagi stabilisasi iklim dan pemberian manfaat sekunder sosial dan lingkungan yang diperlukan.

## Evolusi Tata Kelola Pasar Karbon Sukarela

Organisasi perumus mengakui dan menjunjung tinggi kiprah berbagai inisiatif dan platform lain yang berupaya meningkatkan integritas pasar karbon sukarela, yang diikuti oleh kebanyakan organisasi kami. Ini termasuk Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela/Integrity Council for Voluntary Carbon Markets (IC-VCM), Aliansi Solusi Iklim Alami/Natural Climate Solutions Alliance (NCSA), inisiatif Target Berbasis Sains/Science Based Targets initiative (SBTi), Inisiatif integritas Pasar Karbon Sukarela (VCMI) dan Inisiatif Kualitas Kredit Karbon/Carbon Credit Quality Initiative (CCQI).

Semua inisiatif tersebut dan lainnya berupaya memberikan panduan tentang isu kualitas kredit karbon pada sisi pasokan dan permintaan, serta panduan tentang kualitas kredit untuk kredit di luar sektor hutan. Kami bermaksud akan mengadakan kolaborasi dengan semua inisiatif tersebut untuk mendukung evolusi kerangka kerja yang konsisten, koheren, inklusif, adil dan efisien untuk tata kelola pasar karbon sukarela. Kami tidak bermaksud membuat badan hukum baru; justru kami berupaya aktif mendukung pemanfaatan panduan ini oleh semua inisiatif dan platform lain tersebut.

Kami mendorong perusahaan untuk terus mengikuti panduan baru dari berbagai inisiatif itu serta inisiatif dan sumber referensi lain yang memandu tindakan penting perusahaan mengenai perubahan iklim, selain pembelian kredit.<sup>xxi</sup>



# Rekomendasi Konsensus

Ketika membeli kredit karbon hutan tropis berkualitas tinggi,<sup>9</sup> perusahaan hendaknya:

## I. Mempertimbangkan menggunakan kredit karbon hutan tropis di dalam strategi mitigasi di luar rantai nilai (BVCM) mereka untuk menggencarkan target ambisius dekarbonisasi berbasis sains.

Manfaat terbesar dari penggunaan kredit karbon akan dipetik ketika kredit ditransaksikan sebagai bagian dari strategi mitigasi di luar rantai nilai perusahaan dan mencerminkan tingkat dampak mitigasi iklim yang tinggi untuk kegiatan yang dilakukan, sambil juga mendukung manfaat sekunder ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif.<sup>xxii, xxiii</sup>

**A. Untuk memberikan transparansi dan memastikan bahwa kredit karbon yang ditransaksikan melengkapi, bukannya menggantikan, dekarbonisasi perusahaan, maka perusahaan harus berkomitmen secara publik pada target berbasis sains<sup>10</sup> yang divalidasi oleh Science-Based Targets Initiative (SBTi) atau yang setara,<sup>11</sup> dan hierarki mitigasi harus menjadi rambu-rambu prioritas tindakan mereka.<sup>xxiv</sup>** Perusahaan yang mementingkan isu deforestasi dalam rantai suplai juga harus aktif mengimplementasikan target deforestasi nol selaras dengan Accountability Framework initiative (AFI) dan tahun dasar 2020 atau sebelumnya.

<sup>9</sup> Semua kredit karbon di seluruh sektor harus berkualitas tinggi dan memastikan integritas lingkungan. Meskipun fokus dokumen dan rekomendasi ini tertuju pada kredit karbon hutan tropis, kebanyakan rekomendasi tersebut tidak melulu berkaitan dengan hutan sehingga sebaiknya diterapkan pada kredit yang dihasilkan di semua sektor.

<sup>10</sup> Perusahaan dengan jejak lahan intensif harus memasukkan target Hutan, Lahan dan Pertanian/Forest, Land, and Agriculture (FLAG) dalam target iklim berbasis sains mereka. Informasi lebih lanjut tersedia di <https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture>.

<sup>11</sup> Sesuai dengan sains yang paling relevan dan tersedia, Persetujuan Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perusahaan harus melakukan transisi menuju nol bersih selaras dengan jalur-jalur mitigasi yang konsisten dengan pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius dengan simpangan kecil atau nol. Referensi: "Foundations for Science-Based Net-Zero Target Setting in the Corporate Sector, Principle 2," tersedia di <https://sciencebasedtargets.org/resources/files/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf>.

## Mengklarifikasi Peran Pengurangan dan Penghapusan dalam Mencapai Nol Bersih

Dalam jangka pendek, pembelian kredit karbon akan masuk ke dalam kegiatan mitigasi di luar rantai nilai perusahaan, sehingga penting untuk memahami jenis kredit yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam strategi BVCM mereka. Panduan SBTi tidak membatasi mitigasi di luar rantai nilai pada penghapusan. Kegiatan BVCM dapat menghindari atau mengurangi emisi gas rumah kaca atau menghilangkan dan menyimpan gas rumah kaca dari atmosfer.

BVCM diharapkan menjadi langkah kedua yang diambil perusahaan setelah emisi rantai nilai berkurang. Upaya BVCM harus segera dimulai, sedangkan netralisasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan semakin dekatnya perusahaan dalam mencapai target nol bersihnya.

Namun, panduan SBTi telah disalahartikan secara luas sebagai indikasi bahwa penghapusan emisi adalah lebih unggul daripada pengurangan emisi untuk semua mitigasi seiring dengan dekarbonisasi yang dilakukan perusahaan selama beberapa dekade mendatang. Menurut SBTi, penghapusan hanya diperlukan untuk "netralisasi emisi residu" yang didefinisikan sebagai "GHG yang dilepaskan ke atmosfer ketika perusahaan telah mencapai SBT jangka panjangnya [dan yang] harus diimbangi melalui penghapusan dan penyimpanan karbon secara permanen dari atmosfer."<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Science Based Targets initiative (SBTi) Corporate Net Zero Standard, Versi 1.0, Oktober 2021, tersedia di <https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Standard.pdf>. Lihat juga "Going Above and Beyond to Contribute to Societal Net Zero," SBTi, 31 Agustus 2022. <https://sciencebasedtargets.org/blog/going-above-and-beyond-to-contribute-to-societal-net-zero>.



## Risiko Reputasi dan Uji Tuntas yang Diperlukan Untuk Memitigasinya

Banyak perusahaan menyimpulkan bahwa mereka tidak lagi sanggup menghadapi risiko materi atau reputasi yang terkait dengan hilangnya hutan. Beberapa di antaranya melangkah melampaui komitmen dengan menghapus deforestasi dari rantai suplai melalui pemberian dukungan terhadap implementasi tindakan dan inisiatif di negara tuan rumah guna mengatasi faktor penyebab deforestasi dan degradasi, seperti dengan menyediakan investasi di muka dalam aktivitas dan kapasitas teknis yang selaras.<sup>13</sup>

Selain itu terdapat juga risiko reputasi yang terkait dengan pembelian kredit karbon hutan tropis berkualitas rendah. Meskipun perusahaan harus mempertimbangkan pembelian kredit sesuai uraian dalam Panduan ini, pembeli tetap harus mengetahui kelemahan umum yang ada dalam standar saat ini dan risiko reputasi terkait yang mungkin timbul akibat pembelian kredit tanpa uji tuntas yang memadai. Kelemahan kritis dalam standar meliputi pengakuan atas hak MP dan KL serta upaya memastikan dampak yang bermanfaat bagi, pembagian manfaat kepada, dan partisipasi penuh serta efektif dari MP dan KL. Ketika standar berkembang agar bisa menjawab persoalan relevan dengan lebih baik, dan peningkatan dalam teknologi pemantauan memungkinkan penilaian kinerja yang lebih tepat waktu, akurat dan presisi terhadap standar tersebut, maka beban pelaksanaan uji tuntas tambahan akan berkurang bagi perusahaan dan para penasihatnya.

Selain itu, jika pembeli sektor swasta mencoba membeli unit dari inisiatif yang tidak memenuhi ambang batas fundamental dengan proses verifikasi yang ketat dan independen serta perlindungan sosial, misalnya, platform REDD.plus pada saat penulisan ini, mereka harus menyadari bahwa unit-unit ini mungkin tidak memenuhi target iklim perusahaan.

Lihat [Langkah 3](#) pada Pedoman Implementasi untuk melaksanakan uji tuntas yang diperlukan.

13 Lihat misalnya, "Landscape Scale Action for Forests, People and Sustainable Production: Panduan Praktis Bagi Perusahaan," tersedia di <http://forestsolutions.panda.org/uploads/default/report/JA-Practical-Guide.pdf>.

## II. Memastikan bahwa komponen utama integritas sosial dan lingkungan terpenuhi untuk semua kredit yang dibeli. (Lihat Langkah 3 dalam Panduan Implementasi.)

**A. Perusahaan harus memastikan bahwa kredit yang mereka beli memenuhi kriteria kualitas yang ketat, di samping juga mematuhi semua Cancun Safeguards (Skema Perlindungan Cancun).<sup>14,15</sup> Perusahaan harus melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa kredit yang mereka beli memenuhi kriteria berikut:**

**Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagai mitra aktif bukan penerima manfaat pasif**

- **Penghormatan atas hak**
  - Hak-hak IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya harus dihormati sepenuhnya, termasuk hak penggunaan yang bebas dan hak properti atas lahan, wilayah, perairan dan sumber daya (termasuk karbon), sesuai dengan penggunaan adat turun-temurun dan pengetahuan tradisional mereka.

14 Perlindungan Cancun juga dikenal sebagai perlindungan REDD+. Perlindungan Cancun bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif REDD+ menangani isu-isu sensitif secara memadai. Tujuh Cancun Safeguards (Skema Perlindungan Cancun) menyatakan bahwa inisiatif REDD+ harus menggencarkan dan mendukung:

- i. Tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program hutan nasional serta relevan dengan konvensi dan perjanjian internasional;
- ii. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif yang mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional;
- iii. Penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan hak-hak Masyarakat Adat dan anggota komunitas lokal dengan mempertimbangkan kewajiban internasional serta situasi dan undang-undang nasional yang relevan, serta dengan memperhatikan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
- iv. Partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan yang relevan, khususnya Masyarakat Adat dan komunitas lokal;
- v. Tindakan yang konsisten dengan pelestarian hutan alami dan keanekaragaman hayati, dengan memastikan bahwa tindakan yang disebut dalam pasal 70 Keputusan 1/CP.16 tidak digunakan untuk mengubah hutan alami, tetapi justru digunakan untuk mendorong perlindungan dan pelestarian hutan alami dan layanan ekosistemnya, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya;
- vi. Tindakan untuk mengatasi risiko pembalikan; dan
- vii. Tindakan untuk mengurangi pemindahan emisi.

Lihat "Monitoring & Evaluation: REDD+ Safeguards," The Amazon Fund, tersedia di <http://www.amazonfund.gov.br/en/monitoring-evaluation/REDD-safeguards/>. Lihat juga United Nations Framework Convention on Climate Change REDD+ Safeguards, tersedia di <https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html>.

15 Beberapa kriteria merupakan penjabaran dari kriteria dalam Skema Perlindungan Cancun, dan yang lainnya merupakan tambahan untuk skema tersebut.

- **Partisipasi penuh dan efektif**

- Intervensi harus memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PRADIATAPA) untuk IP dan LC serta akses yang adil ke informasi, termasuk penjelasan lengkap tentang lingkup proposal secara transparan yang dapat diakses secara teknis dan tepat secara budaya.
- IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya, jika relevan, harus berfungsi sebagai mitra dan pemegang hak atau pemangku kepentingan—bukan sekadar penerima manfaat<sup>16</sup>—dengan pendekatan yang murni kolaboratif dan antarbudaya<sup>17</sup> yang menjunjung tinggi beragam praktik budaya dan memastikan partisipasi yang penuh dan efektif secara adil tanpa pandang bulu di sepanjang proses, mulai dari proposal awal hingga implementasi, dan dengan penekanan khusus pada penyaluran manfaat yang adil.
- Pengembangan kapasitas, dukungan teknis dan sumber daya logistik harus disediakan bagi IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya (atau bagi organisasi yang mewakili dan melayani mereka) untuk mendorong partisipasi penuh dan efektif mereka secara adil tanpa pandang bulu serta untuk mendukung dan memperkuat proposal REDD+ serta menggencarkan tindakan penyelamatan iklim yang diarahkan oleh IP dan LC (misalnya, REDD+ Masyarakat Adat Amazon).<sup>18</sup>

- **Penghormatan terhadap sistem, pengetahuan dan tradisi lokal**

- Protokol konsultasi adat harus dihormati.
- Pemerintah dan para pelaku non-negara harus memberikan pertimbangan yang semestinya atas pendekatan yang diusulkan dan diarahkan oleh IP dan LC terhadap pelestarian hutan serta pengurangan deforestasi dan degradasi.
- Sistem manajemen dan struktur organisasi IP dan LC harus dihormati sepenuhnya.
- Pertanyaan seputar metodologi pengukuran yang diajukan oleh IP dan LC berdasarkan pengalaman mereka harus diperhatikan dengan serius.

### Pembagian manfaat yang adil dan transparan

- Penyaluran manfaat dan pendapatan yang jujur, transparan dan adil yang dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemegang hak yang relevan dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan, termasuk mengakui dan memberikan peran utama kepada IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya dalam pelestarian hutan.
- IP dan LC harus memiliki hak untuk menentukan kepada perusahaan atau badan hukum lain mana mereka akan menjual kredit berdasarkan kegiatan dan tindakan mereka untuk melindungi hutan tropis; apabila IP dan/atau LC tidak memiliki kemampuan untuk menjual kredit secara langsung, IP dan LC harus memiliki peran dalam menentukan kepada siapa kredit dapat dijual, berdasarkan kegiatan dan tindakan mereka.
- Jika memungkinkan, penyaluran manfaat harus diberikan langsung kepada IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya yang melindungi hutan, alih-alih melalui perantara pihak ketiga yang membutuhkan biaya administrasi yang besar. Akan tetapi, jika perantara memang diperlukan karena kurangnya kapasitas dalam menerima dana secara langsung—atau sebagian hasil pendapatan dari proyek diperlukan untuk membiayai pengembangan kapasitas dan/atau menyediakan dukungan teknis—maka peran dan biaya terkait dari jasa perantara harus transparan dan disepakati oleh semua pihak terlebih dahulu.
- Dana yang diterima langsung oleh IP dan dana yang dikelola oleh pihak-pihak lain (misalnya, badan pemerintah) untuk mendukung IP harus diinvestasikan berdasarkan proposal IP dan melewati perangkat manajemen wilayah mereka, meliputi kegiatan kesiapsiagaan di hutan, perekonomian Adat, tata kelola dan pemulihan pengetahuan leluhur, sekadar menyebut beberapa contoh.

<sup>16</sup> Menjadi mitra dan bukan sekadar penerima manfaat berarti berpartisipasi dalam semua proses pengambilan keputusan selama implementasi proyek/program, dan bukan sekadar menjadi penerima pasif dari iktikad baik yurisdiksi/program.

<sup>17</sup> Antarbudaya mengacu pada kehadiran dan interaksi yang adil dari beragam budaya dan kemungkinan untuk menghasilkan ekspresi budaya bersama melalui dialog dan sikap saling menghormati. Referensi: Pasal 4.8 Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya, tersedia di <https://es.unesco.org/creativity/interculturalidad>.

<sup>18</sup> Koordinator Organisasi Adat Lembah Amazon/Coordinator of the Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA) mendefinisikan pendekatan REDD+ yurisdiksional yang diarahkan oleh masyarakat adat sebagai: implementasi strategi untuk mengurangi emisi akibat penggunaan lahan dan perubahan pada tingkat yurisdiksi, dalam hal ini, wilayah Adat. Hal ini didasarkan pada pedoman Amazon Indigenous REDD+ (RIA), sebuah proposal sendiri oleh COICA yang memprioritaskan pengelolaan hutan dan wilayah Adat secara holistik dan mengakui struktur tata kelola mereka. Itu juga memastikan tidak hanya penghormatan atas hak wilayah dan lahan serta PRADIATAPA bagi Masyarakat Adat, tetapi juga partisipasi yang efektif dari Masyarakat Adat dalam proses dan penyaluran manfaat yang adil. Secara khusus, kawasan dengan tajuk vegetasi tinggi dan deforestasi rendah (HFLD) diupayakan untuk dimasukkan karena sebagian besar Wilayah Adat, karena capaiannya dalam pelestarian hutan, merupakan kawasan HFLD.

### Acuan dasar konservatif yang tepat

- Acuan dasar harus diverifikasi secara independen agar sesuai dengan persyaratan untuk acuan dasar berbasis bukti yang kokoh untuk memastikan penambahan.
- Pengurangan dan penghapusan emisi skala proyek harus didasarkan pada acuan dasar yang disertifikasi secara independen dan dialokasikan secara yurisdiksional, jika ada.

### Permanensi

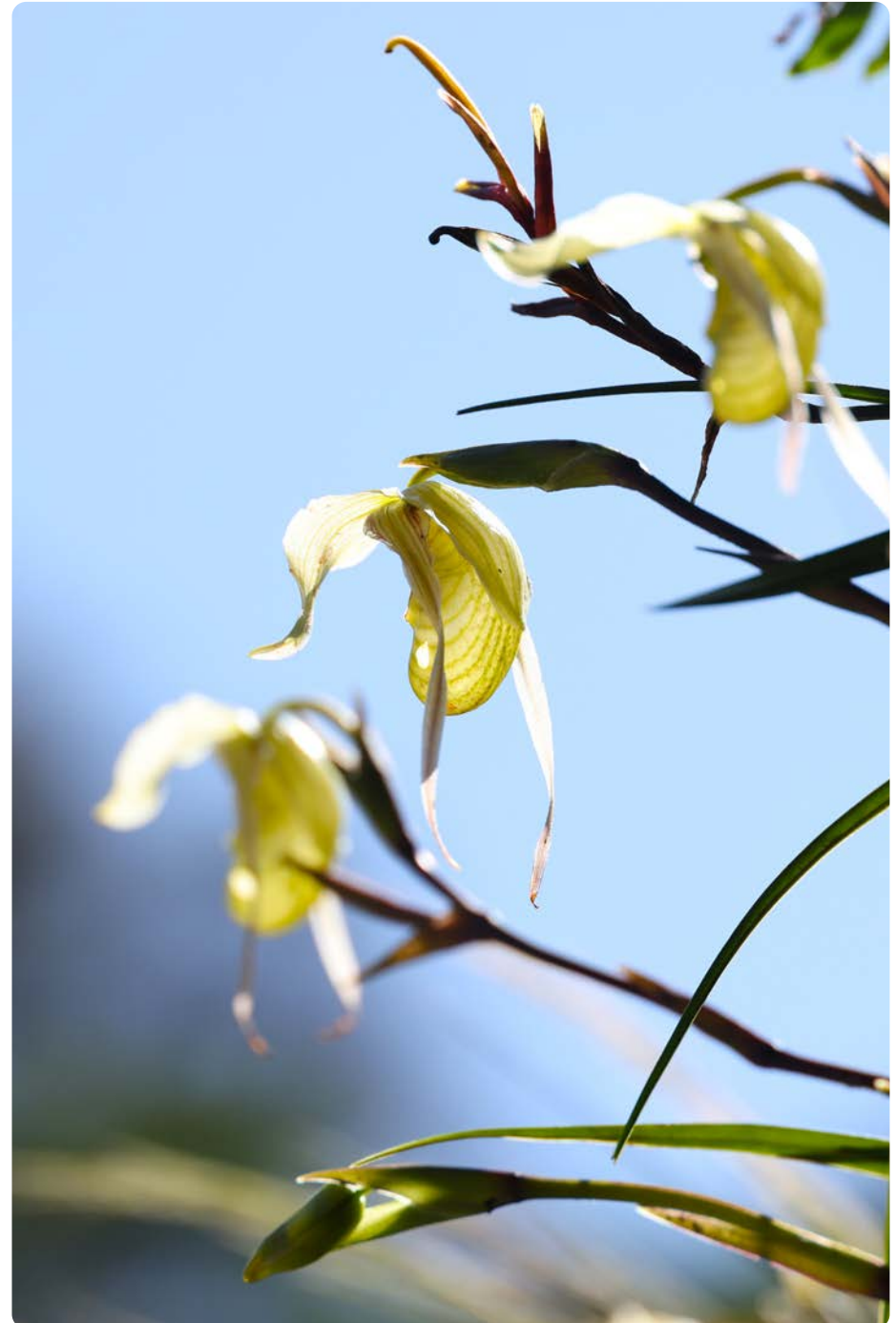
- Persyaratan untuk potongan (yaitu, “diskon”) harus didasarkan pada risiko nonpermanensi dan kebocoran yang diperkirakan secara konservatif.

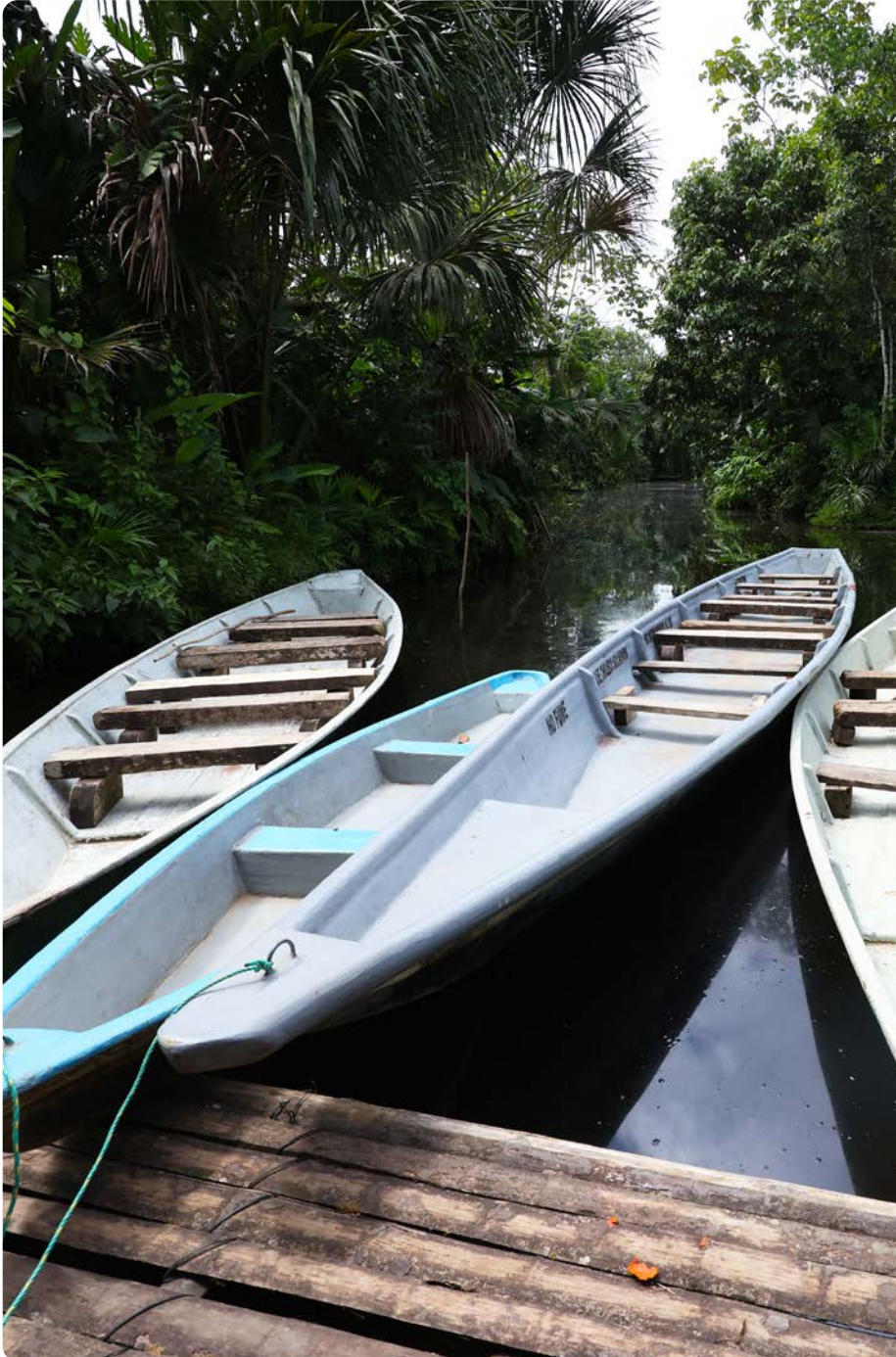
### Kriteria integritas lingkungan tambahan

Pemberian kredit harus didasarkan pada:

- Peningkatan berkelanjutan atas spesifisitas data dan pengurangan ketidakpastian keseluruhan dari waktu ke waktu melalui penggunaan sains mutakhir/terbaik yang ada;
- Kesesuaian dengan program yurisdiksional dan kerangka akuntansi jika dikembangkan (lihat juga [Rekomendasi IV](#));
- Penghindaran perhitungan ganda;
- Kegiatan yang menghindari dampak negatif lingkungan atau sosial, yang menghasilkan manfaat pembangunan berkelanjutan di luar mengurangi emisi GRK;
- Kegiatan yang ikut menyumbang peningkatan keanekaragaman hayati; dan
- Kegiatan yang meningkatkan adaptasi dan ketahanan.

Lihat [Panduan Implementasi Langkah 3](#) mengenai uji tuntas untuk memastikan kriteria ini dipenuhi dengan kredit yang dibeli.





### III. Menyelaraskan pelaporan perusahaan tentang pembelian kredit karbon hutan dengan persyaratan transparansi dan akuntansi Persetujuan Paris serta dengan peningkatan dan pencapaian kontribusi tingkat nasional/ nationally determined contributions (NDC).

- A. Perusahaan harus secara aktif menyatakan dukungan terhadap pembentukan aturan, sistem administrasi dan infrastruktur yang diperlukan oleh pemerintah nasional dan subnasional untuk mengimplementasikan Pasal 6 persyaratan transparansi dan akuntansi dari Persetujuan Paris yang berlaku untuk kredit karbon.
- B. Perusahaan harus melaporkan penggunaan kredit karbonnya, yang menyebutkan negara tuan rumah untuk kegiatan pemberian kredit karbon hutan, jangka waktu, proyek atau program, badan penetapan standar, dan ada tidaknya keterkaitan kredit tersebut dengan penyesuaian yang bersangkutan.
- C. Jika kegiatan pemberian kredit karbon hutan hendak dimasukkan ke dalam NDC negara tuan rumah, perusahaan harus menyampaikan secara terbuka bahwa pengurangan atau penghapusan yang terkait akan menyumbang terhadap NDC negara tuan rumah.
- D. Tidak adanya panduan klaim mitigasi iklim yang komprehensif dan kredibel serta menyadari adanya perdebatan sengit seputar potensi risiko terkait dengan klaim ganda antara target pengurangan emisi oleh perusahaan dan oleh pemerintah nasional, perusahaan harus mencermati ketidakpastian apa pun seputar klaim yang mereka ajukan dengan berusaha semaksimal mungkin bersikap transparan, jujur dan apa adanya dalam pelaporan dan komunikasinya.

## IV. Dengan sigap menggeser permintaan menuju kredit yang berasal dari program-program skala yurisdiksional (termasuk proyek-proyek yang sepenuhnya diwadahi).

Untuk latar belakang tentang pemberian kredit yurisdiksional, lihat kotak teks berjudul, “Kasus untuk Transisi Cepat ke Pemberian Kredit Skala Yurisdiksional,” serta [Lampiran Rekomendasi IV](#).

**A. Perusahaan harus mempercepat transisi ke pemberian kredit REDD+ skala yurisdiksional** (yang selanjutnya disebut juga sebagai pemberian kredit skala yurisdiksional/kredit) **dengan memberi sinyal permintaan melalui perjanjian pembiayaan di muka<sup>19</sup> dan/atau komitmen pembelian kredit di muka.** Untuk memberi sinyal permintaan saat ini atas kredit akan datang yang terkait dengan program dan intervensi yang dapat memberikan hasil berkualitas tinggi sekaligus meningkatkan skala dampak dengan cepat, perusahaan harus melakukan diferensiasi di antara kredit-kredit karbon hutan *saat ini* dan prospeknya *ke depan*<sup>20</sup> yang tersedia di pasar sukarela.

Dalam jangka pendek, sampai kredit skala yurisdiksional (termasuk yang sepenuhnya diwadahi) tersedia luas, komitmen perusahaan terhadap pendanaan di muka dan/atau pembelian kredit di muka dapat ikut mendorong percepatan dan peningkatan suplai kredit-kredit tersebut. Sinyal permintaan ini dapat memberikan kepastian dan dorongan yang dibutuhkan pemerintah untuk berinvestasi dalam upaya penguatan sistem hukum, regulasi dan akuntansi untuk pendekatan skala yurisdiksional, serta dapat mendesak pendukung proyek untuk mempercepat kemajuan dalam pengaturan pemberian wadah. (Lihat [Glosarium](#) untuk definisi “proyek yang diwadahi” dan Lampiran ke Langkah 2 untuk kriteria proyek yang “sepenuhnya diwadahi” dan “siap untuk pemberian wadah.”)

Perjanjian pembiayaan di muka dan/atau komitmen pembelian kredit sangat dianjurkan pada tempat-tempat di mana program yurisdiksional telah atau diharapkan akan

didaftarkan atau divalidasi oleh standar yang diakui secara internasional dan memberi kredit dalam jangka pendek.

**B. Perusahaan harus dengan cepat meningkatkan porsi pembelian kredit mereka dari program skala yurisdiksional (termasuk proyek yang sepenuhnya diwadahi).** [Panduan Implementasi Langkah 2](#) memberikan panduan bagi perusahaan mengenai pembelian kredit karbon hutan dari yurisdiksi pada berbagai tahap pematangan program yurisdiksi.

**C. Perusahaan harus mendorong pengembang proyek dan proyek karbon yang sudah ada untuk mengambil semua kemungkinan langkah untuk menggiatkan pembentukan pemberian kredit skala yurisdiksional berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi kaitannya, dan lantas mewadahnya.** Program yurisdiksional dengan integritas lingkungan dan sosial yang tinggi memberikan kesempatan untuk mulai menggeser suplai kredit karbon ke skala transformatif yang dicita-citakan dalam Persetujuan Paris. Akan tetapi, di lokasi-lokasi yang kecil sekali mendapatkan dukungan pemerintah saat ini dan/atau pemerintah kesulitan mengimplementasikan secara efektif pemberian kredit skala yurisdiksional yang adil, maka pembelian kredit skala proyek berkualitas tinggi oleh perusahaan yang bersifat selektif dan berjangka pendek akan dapat memberikan dukungan sementara terhadap kebutuhan dan kesempatan pelestarian hutan yang penting asalkan tidak mengendurkan tindakan skala yurisdiksional dan/atau pemberian kredit terkait.

Lihat [Panduan Implementasi Langkah 1](#) dan [Langkah 2](#) untuk panduan khusus tentang membangun visi untuk portofolio kredit karbon hutan tropis dan mencari kredit untuk mengisinya.

<sup>19</sup> Pendanaan yang diterima untuk membangun proyek atau program dan melakukan kegiatan pengurangan atau penghapusan emisi awal, sebelum pengeluaran kredit karbon. Ini dapat meliputi kontrak untuk pembelian kredit pada tanggal yang akan datang berdasarkan harga yang ditentukan dan ketentuan lainnya.

<sup>20</sup> Kredit yang prospeknya akan tersedia berarti kredit yang diperkirakan akan tersedia pada masa datang tetapi saat ini belum tersedia. Prospektif tidak identik dengan kredit “berdasarkan prakiraan” (yaitu, kredit yang dihasilkan sebelum terjadinya pengurangan). Organisasi perumus tidak mendukung pemberian kredit berdasarkan prakiraan.

## Kasus untuk Transisi Cepat ke Pemberian Kredit Skala Yurisdiksional

Organisasi kami percaya bahwa pengurangan dan penghapusan emisi berbasis hutan dapat dilakukan dengan cara paling efisien dan efektif lewat pendekatan pemberian kredit skala yurisdiksional (termasuk program yurisdiksional dan juga proyek-proyek yang sepenuhnya diwadahi), tetapi harus segera disediakan sumber daya agar bisa sukses. Peralihan dari pemberian kredit skala proyek yang *tidak diwadahi* menuju pemberian kredit dan akuntansi emisi skala yurisdiksional diperlukan, baik untuk meningkatkan tindakan dan perubahan kebijakan pada skala di mana terdapat faktor penyebab deforestasi dan maupun untuk meningkatkan skala inisiatif mitigasi iklim hutan tropis ke tingkat yang diperlukan demi mencapai target pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius.

Pemberian kredit skala yurisdiksional sudah konsisten dengan pendekatan nasional terhadap pemantauan hutan, acuan dasar, strategi dan perlindungan dalam Kerangka Kerja Warsawa untuk REDD+<sup>21, xxv</sup> yang dirundingkan berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan dituangkan ke dalam Persetujuan Paris. Alasan penting pengembangan kerangka kerja untuk REDD+ dengan akuntansi untuk pengurangan dan penghapusan pada skala nasional ini berlaku untuk semua pemberian kredit skala yurisdiksional: yaitu, untuk mengatasi isu-isu integritas lingkungan seperti kebocoran, penambahan (additionality) dan nonpermanensi; serta melestarikan keanekaragaman hayati dan menciptakan insentif untuk peningkatan tata kelola, reformasi kebijakan yang dibutuhkan dan implementasi skala besar.<sup>xxvi</sup>

Lebih lanjut, program yurisdiksional yang memastikan penyertaan wilayah Adat dengan partisipasi penuh dan efektif dari IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani sebagai mitra memiliki potensi untuk memperluas manfaat bagi masyarakat

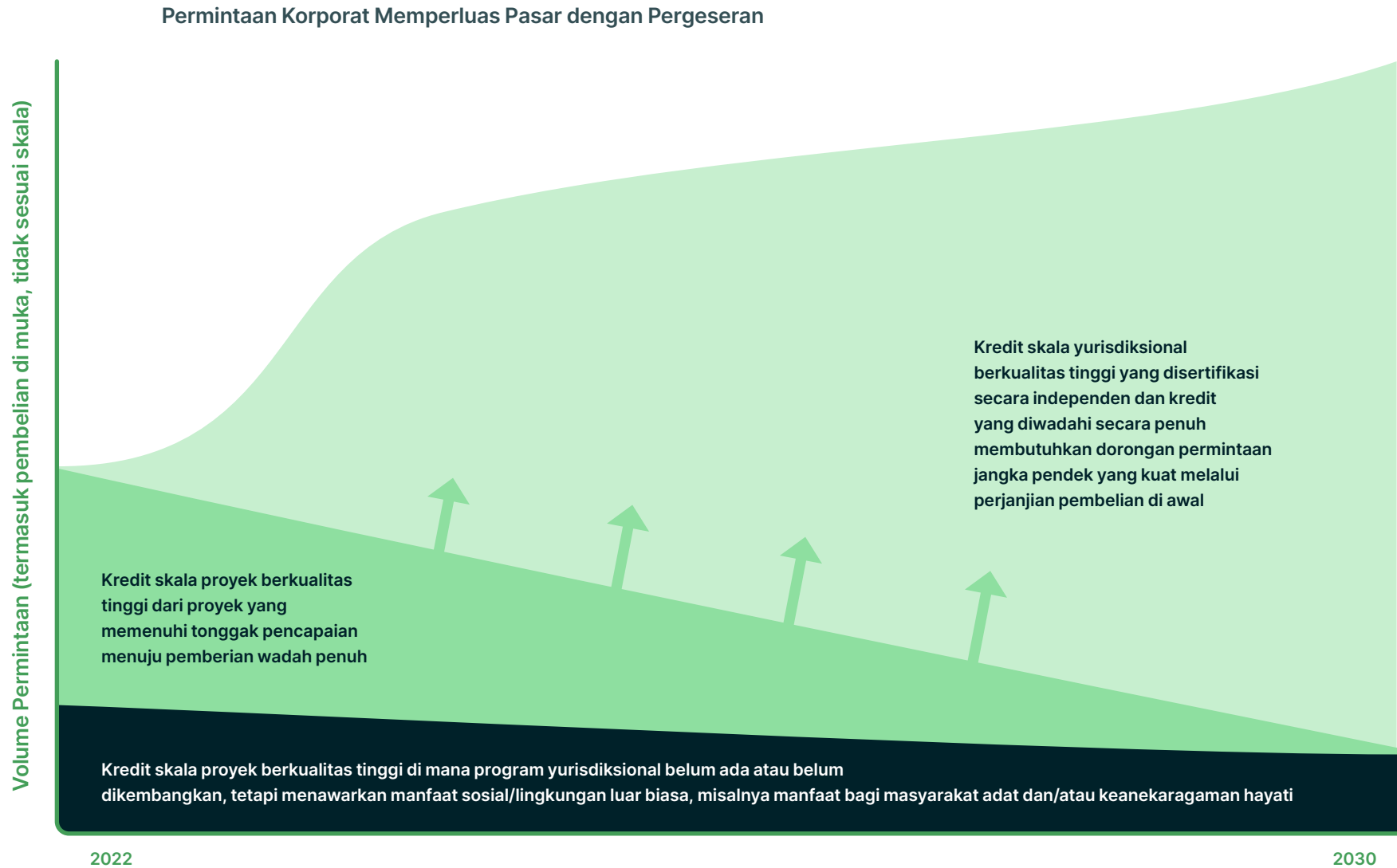
yang lebih luas, termasuk konservasi stok karbon. Mungkin juga ada yurisdiksi masyarakat Adat yang secara langsung didaftarkan sebagai program yurisdiksi.

Kami mengantisipasi bahwa kredit skala yurisdiksional akan semakin mudah dibeli secara luas di pasar karbon sukarela dalam beberapa tahun ke depan.<sup>xxvii</sup> Dalam banyak kasus, pemberian kredit skala yurisdiksional yang sukses akan menuntut pemerintah agar memperkuat infrastruktur institusional yang diperlukan, seperti kerangka hukum, regulasi dan akuntansi. Permintaan perusahaan akan kredit skala yurisdiksional dapat berperan penting dalam mempercepat perkembangan ini. Peningkatan suplai kredit yurisdiksional harus memungkinkan untuk membedakan kredit berkualitas tinggi di antara yurisdiksi tersebut yang dapat menunjukkan partisipasi penuh dan efektif oleh IP dan LC dan penghormatan penuh terhadap hak-hak mereka, termasuk akses langsung ke pendanaan kredit karbon.

Upaya-upaya skala proyek akan terus berperan penting dalam menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi. Namun, seiring peningkatan permintaan akan pemberian kredit skala yurisdiksional, kami berharap pemberian kredit skala proyek akan selaras dengan pemberian kredit skala yurisdiksional. Program skala yurisdiksional berpotensi menghasilkan mitigasi yang jauh lebih besar dalam jangka menengah.

Lihat [Lampiran Rekomendasi IV](#) untuk latar belakang dan uraian tambahan tentang alasan dan jalur transisi menuju pemberian kredit skala yurisdiksional. Lihat [Panduan Implementasi Langkah 2](#) dan [Lampiran ke Langkah 2](#) untuk panduan yang lebih terperinci mengenai bagaimana pembeli korporat dapat menyaring kredit skala proyek agar konsisten dengan transisi yang dikehendaki menuju penyesuaian dengan program yurisdiksional.

21 Perundingan dalam konteks UNFCCC menuju kerangka kerja internasional untuk REDD+ diluncurkan di Bali pada 2007. Keputusan utama berhasil dicapai pada perundingan selanjutnya di Cancun (tentang skema perlindungan) dan Warsawa (tentang kerangka kerja secara keseluruhan), dan kerangka kerja ini dikukuhkan di bawah Pasal 5 Persetujuan Paris.

**Gambar 1: Lintasan Pasar yang Diinginkan**

## V. Memprioritaskan pembelian kredit yang berasal dari program dan proyek yang mengurangi ancaman terhadap hutan tropis yang masih ada.

Pencapaian tujuan Persetujuan Paris untuk menyeimbangkan pengurangan dan penghapusan emisi pada pertengahan abad membutuhkan penghentian deforestasi dan percepatan restorasi hutan. Namun, sains jelas menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, prioritas harus diberikan untuk melindungi hutan yang masih berdiri, terutama yang berada di daerah tropis. Emisi yang disebabkan oleh deforestasi tropis bersifat signifikan, langsung dan tidak dapat dibalikkan dalam kerangka waktu yang relevan. Emisi dari deforestasi menyumbang sekitar 11 persen dari total emisi global.<sup>xxviii</sup>

Selain emisi langsung saat vegetasi hutan terbakar atau membusuk, kawasan yang baru dideforestasi juga akan kehilangan kapasitas pengikatannya yang berkelanjutan dan sering diganti dengan penggunaan lahan yang intensif emisi, seperti produksi daging sapi. Selanjutnya, sementara pohon muda menghapus karbon dari atmosfer, hutan yang baru direstorasi tidaklah sebanding dengan sistem matang yang akan digantikannya untuk mengatasi kerugian, baik dalam hal besaran atau skala waktu dari total potensi penyimpanan karbonnya.<sup>xxix</sup> Dalam hal ini, karbon yang dilepaskan dari konversi hutan tropis ke penggunaan lahan lain “tidak dapat dipulihkan” melalui kegiatan restorasi antara sekarang dan 2050.<sup>xxx</sup>

**A. Perusahaan harus memprioritaskan pembelian kredit pengurangan emisi berkualitas tinggi daripada kredit penghapusan** (misalnya, kredit yang dihasilkan melalui upaya penanaman pohon yang terkait dengan reboisasi dan penghijauan) hingga tujuan global untuk menghentikan deforestasi dan lenyapnya ekosistem tercapai.

**B. Perusahaan harus mencantumkan kredit yurisdiksional yang dikeluarkan secara konservatif yang berasal dari yurisdiksi HFLD (banyak di antaranya yang mencakup wilayah Adat) dalam portofolio mereka.** Pembelian semacam ini menjadi insentif jangka pendek untuk menjaga hutan-hutan yang masih utuh<sup>22</sup> dan mendukung pengakuan atas keberhasilan IP dan LCC dalam melestarikan hutan.

Lihat Panduan Implementasi [Langkah 1](#) untuk panduan lebih lanjut tentang pencantuman yang tepat untuk pengurangan, penghapusan emisi dan kredit HFLD serta [Lampiran ke Langkah 1](#) untuk detail tambahan tentang atribut kredit HFLD yang dikeluarkan secara konservatif.



<sup>22</sup> Bentangan ekosistem alam yang luas tak bertepi di dalam rentang zona hutan saat ini, yang tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas manusia yang signifikan dan cukup luas sehingga semua keanekaragaman hayati asli, termasuk populasi bermacam-macam spesies yang layak hidup, dapat dipertahankan.





# Panduan Implementasi

**Panduan Implementasi berikut ini bertujuan untuk membantu perusahaan menavigasi pasar kredit karbon hutan tropis dengan integritas dan kejelasan tujuan.**

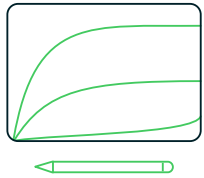
Ditujukan untuk individu dan tim yang sedang mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi emisi karbon perusahaan dan mencapai tujuan nol bersih, bagian ini memberikan proses empat langkah guna mengembangkan strategi dan visi untuk portofolio kredit tersebut dan mengisinya dari waktu ke waktu. Panduan ini harus dilihat sebagai pelengkap untuk Rekomendasi Konsensus.

Sesuai Rekomendasi I, perusahaan hanya boleh mengikuti langkah-langkah ini setelah mereka berkomitmen secara publik terhadap target berbasis sains yang divalidasi oleh Science Based Targets Initiative (SBTi) atau yang setara. Perusahaan harus menggunakan hierarki mitigasi sebagai rambu-rambu prioritas tindakan mereka. Perusahaan yang mementingkan isu deforestasi dalam rantai suplai juga harus aktif mengimplementasikan target deforestasi nol selaras dengan Accountability Framework initiative (AFI).

Saat mengikuti panduan ini, perusahaan harus menyadari bahwa perubahan signifikan dalam proses pemberian kredit diperlukan agar pemberian kredit karbon hutan tropis bersifat adil sepenuhnya bagi MA dan LC, termasuk akses langsung ke pasar karbon bagi wilayah Adat. Untuk lebih jelasnya, lihat "Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Kaum Perempuan dan Komunitas Kurang Terlayani Lainnya" pada [halaman 12](#).

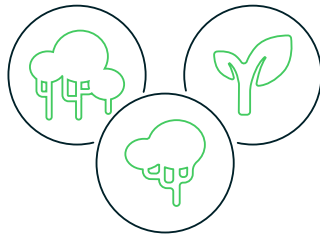
## Panduan Implementasi: Proses empat langkah.

### LANGKAH 1



Merencanakan portofolio kredit hutan tropis Anda agar selaras dengan kebutuhan global.

### LANGKAH 2



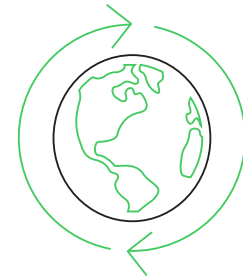
Membangun portofolio Anda dengan pembelian yang mendorong permintaan akan pemberian kredit skala yurisdiksional yang berkualitas tinggi.

### LANGKAH 3



Melakukan uji tuntas untuk memastikan kredit yang berkualitas tinggi.

### LANGKAH 4



Menindaklanjuti dengan tindakan pelengkap dan mengikuti perkembangan baru.

## LANGKAH 1

## Merencanakan Portofolio Kredit Hutan Tropis Anda agar Selaras dengan Kebutuhan Global Seiring dengan Perkembangannya

Portofolio kredit korporat harus dibentuk agar selaras dengan kebutuhan global guna membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Karena pelestarian hutan yang masih ada harus diprioritaskan, komposisi portofolio harus berubah dari waktu ke waktu berdasarkan seberapa baik dan seberapa cepat komunitas global membuat kemajuan dalam meniadakan deforestasi dan degradasi hutan.

### Tindakan yang disarankan untuk menyusun portofolio dalam jangka pendek:

**A. Memprioritaskan pembelian, pembelian di awal dan perjanjian pembiayaan di muka untuk kredit pengurangan emisi skala yurisdiksional dalam waktu dekat guna melestarikan dan mengurangi ancaman terhadap hutan tropis.** Perusahaan harus menyelaraskan portofolio kredit karbon hutan tropis dengan sains mutakhir dengan memprioritaskan kredit pengurangan emisi dan hanya meningkatkan porsi kredit penghapusan dalam portofolio perusahaan mereka selaras dengan pencapaian global dalam menghentikan deforestasi dan kepunahan ekosistem.

**B. Memasukkan kredit HFLD skala yurisdiksional agar menjadi insentif jangka pendek dalam menjaga hutan-hutan yang masih utuh dan tersisa serta mendukung pengakuan atas keberhasilan IP dan LC dalam melestarikan hutan<sup>23</sup>.** Hutan di yurisdiksi HFLD saat ini sedang menghadapi risiko ancaman dan ancaman yang muncul berubah-ubah dengan cepat. Para pelaku di banyak kawasan HFLD secara aktif telah menjaga hutan dari risiko-risiko ini tanpa kompensasi apa pun. Hal ini tidak adil atau tidak mungkin berkelanjutan.

Pendapatan dari kredit HFLD dapat mendorong penerapan pendekatan holistik, inklusif dan adil yang pada akhirnya mengarah pada perlindungan hutan yang paling tahan lama, yang mencerminkan kontribusi nyata dan sah dari kawasan HFLD (dan pelindungnya) terhadap mitigasi iklim. Oleh karena itu, kredit HFLD skala yurisdiksional yang dikeluarkan melalui metode konservatif yang tepat harus dimasukkan dalam portofolio kredit karbon perusahaan. Organisasi perumus mengakui metodologi Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) dan Architecture for REDD+ Transactions' (ART) The REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES) sebagai pendekatan konservatif yang tepat untuk kredit HFLD skala yurisdiksional untuk sementara saat sains tambahan sedang dikembangkan.<sup>24</sup> **Semua metodologi pemberian kredit karbon, termasuk metodologi untuk kredit HFLD, harus dicurahkan untuk perbaikan terus-menerus dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan analisis dan pengalaman lebih lanjut.**

Untuk menghasilkan kredit, yurisdiksi HFLD harus melaksanakan kegiatan REDD+ yang sama seperti yurisdiksi non-HFLD (misalnya, menjalankan rencana manajemen hutan, menetapkan kawasan lindung, mengembangkan peraturan dan kebijakan REDD+, dll.) untuk *menjaga* tingkat deforestasi mereka yang rendah, alih-alih *menurunkan* tingkat deforestasi, seperti halnya dengan yurisdiksi non-HFLD. Dalam banyak kasus, untuk penetapan dan integritas hutan mereka, yurisdiksi HFLD berutang kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas upaya berkelanjutan dan gigih mereka yang secara aktif mengatasi faktor-faktor penyebab kepunahan hutan. Sampai saat ini, hasil dari upaya untuk secara aktif mempertahankan tingkat deforestasi yang rendah tersebut belum diakui secara efektif oleh mekanisme kredit, dan sebagian alasannya adalah karena mekanisme ini bergantung pada acuan dasar historis

<sup>23</sup> Ruang lingkup panduan ini dibatasi pada kredit karbon hutan tropis, yang menjadi dasar rekomendasi ini. Organisasi perumus setuju bahwa hutan HFLD harus dimasukkan dalam insentif berbasis pasar, seperti kredit yurisdiksional REDD+ yurisdiksional; perusahaan dapat dan juga harus menyediakan pembiayaan nonpasar untuk lokasi geografi ini.

<sup>24</sup> Kerangka kerja metodologis ART TREES dan FCPF CF membatasi pemberian kredit untuk masing-masingnya hingga 0,05 persen atau 0,1 persen dari stok karbon yurisdiksi. Organisasi kami mengakui kontribusi berharga ART dan FCPF CF untuk memberi kredit yurisdiksi HFLD, sehingga membawa isu ini ke pusat perdebatan dan menawarkan solusi. Seiring dengan akumulasi bukti empiris dan pengalaman, organisasi perumus menyambut baik perbaikan terus-menerus dalam metodologi untuk memberi kredit yurisdiksi HFLD, termasuk kawasan yang diusulkan oleh IP dan LC.

rata-rata dan tidak mempertimbangkan peningkatan risiko deforestasi terhadap hutan yang masih ada di masa mendatang. Meskipun penggunaan acuan dasar historis rata-rata umumnya bersifat konservatif dan sudah sesuai, pemberian kredit terhadap acuan dasar di yurisdiksi HFLD ini dapat memiliki efek pengecualian akses ke pendanaan kredit karbon bagi kebanyakan IP dan LC, sehingga ancaman dinamis terhadap hutan dan kegiatan yang diperlukan untuk mengatasinya menjadi terabaikan. (Lihat Panduan Implementasi Langkah 3, bagian C, di [halaman 37](#), untuk penjelasan tambahan tentang metodologi acuan dasar.)

Standar terkini seperti ART TREES dan FCPF CF telah mengenali tantangan ini dan mengatasinya melalui mekanisme konservatif untuk memberi kredit kepada yurisdiksi HFLD atas kontribusi mereka dalam mengurangi emisi hutan secara keseluruhan. Pemberian kredit HFLD berfungsi untuk menopang keefektifan kredit pengurangan emisi hutan tropis dengan mengurangi potensi kebocoran internasional dan memberikan insentif untuk keberlanjutan kegiatan yang mengurangi risiko terhadap hutan.

Proporsi kredit HFLD dalam keseluruhan portofolio akan berbeda-beda menurut perusahaan dan dapat didasarkan atas pertimbangan internal atau eksternal yang berbeda. Misalnya, jika kawasan pengadaan perusahaan tumpang-tindih dengan yurisdiksi HFLD tertentu, perusahaan itu dapat mempertimbangkan untuk membeli kredit HFLD dari yurisdiksi tersebut. Sebagai alternatif, karena sekitar seperempat dari deforestasi terjadi di hutan yang masih utuh, membeli kredit HFLD dalam kisaran 25 persen dari keseluruhan portofolio akan menyelaraskan portofolio suatu perusahaan dengan tren deforestasi global. Terlepas dari itu, perusahaan harus transparan tentang penggunaan kredit HFLD dalam portofolio mereka, termasuk bagaimana mereka berkontribusi terhadap klaim terkait BVCM.<sup>xxxi</sup>

*Untuk latar belakang tambahan tentang pemberian kredit HFLD, lihat [Langkah 1: Kredit Hutan Tinggi, Deforestasi Rendah](#).*

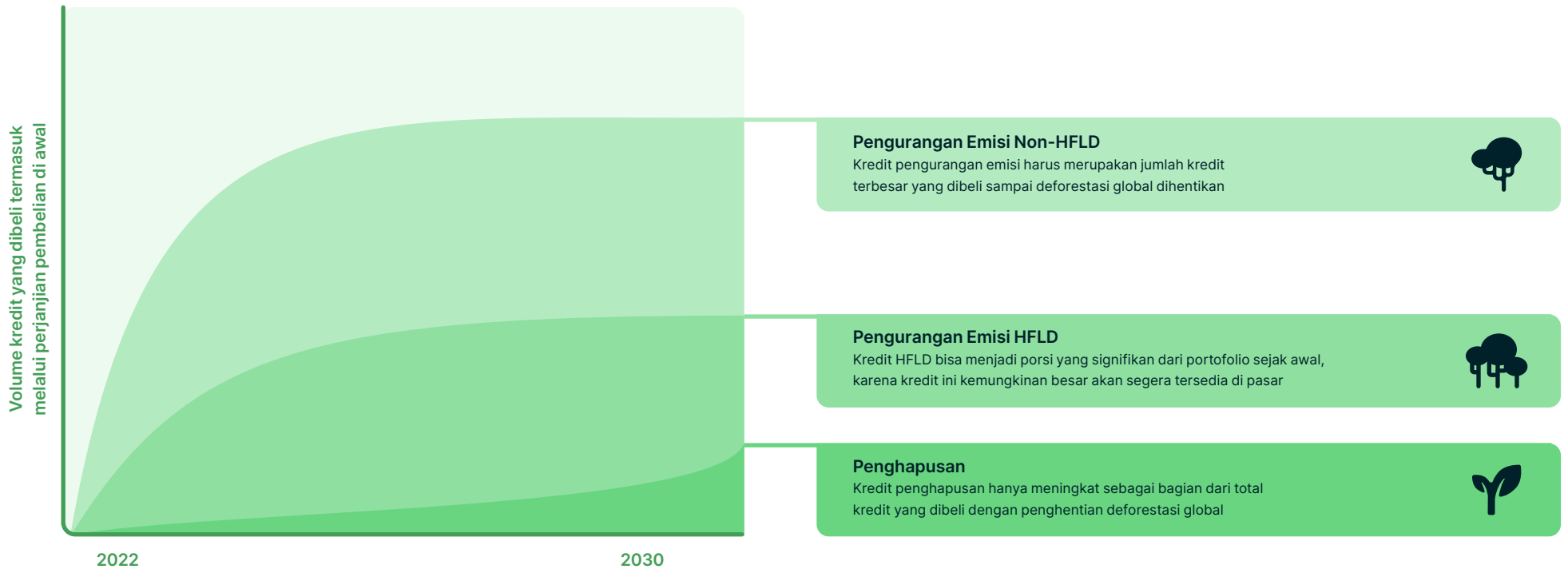
**C. Memberikan insentif penghapusan berbasis alam melalui perjanjian pembelian di awal dan perjanjian pembiayaan di muka untuk kredit penghapusan yang konsisten dengan semua kriteria TFCl yang akan dihasilkan saat perusahaan mendekati tanggal target nol bersih pada 2040 atau 2050.** Mengingat jeda waktu antara dimulainya kegiatan restorasi hutan dan dihasilkannya volume penghapusan emisi yang signifikan, tindakan tersebut kini

diperlukan guna memastikan pasokan kredit penghapusan yang memadai untuk menetralkan emisi residu. SBTi memproyeksikan bahwa, untuk mencapai emisi nol bersih, perusahaan mesti mengurangi minimal 90 persen dari emisi mereka. Perusahaan harus mengakui urgensi global untuk menghentikan deforestasi dan memprioritaskan investasi jangka pendek dalam kredit pengurangan emisi, alih-alih berfokus pada investasi jangka pendek secara sempit pada kredit penghapusan yang mereka antisipasi untuk keperluan memenuhi tujuan nol bersih mereka sendiri.

Oleh karena itu, setiap porsi dari kredit penghapusan jangka pendek atau menengah dalam portofolio perusahaan harus memainkan peran pelengkap untuk pengurangan emisi dan harus konsisten dengan kriteria yang tercantum dalam Panduan ini. Preferensi harus diberikan untuk pengadaan kredit yang berasal dari: (a) yurisdiksi yang telah berhasil membalikkan deforestasi guna menghargai tindakan dini; (b) yurisdiksi dan proyek yang sepenuhnya diwadahi di mana kegiatan restorasi diintegrasikan ke dalam program skala yurisdiksional dan di mana deforestasi dan degradasi mengalami penurunan; dan (c) proyek yang terverifikasi dengan standar yang sesuai dengan kriteria TFCl dan menunjukkan manfaat luar biasa bagi hak dan mata pencaharian IP dan LC, pemulihan keanekaragaman hayati dan/atau adaptasi, ketangguhan dan ketahanan pangan.



## Gambar 2: Contoh portofolio kredit karbon hutan tropis—perkembangan dari waktu ke waktu



Meskipun tidak semua portofolio kredit perusahaan akan sama, Gambar 2 memperlihatkan portofolio perusahaan yang mengalami peningkatan volume dari waktu ke waktu, di mana proporsi relatif pengurangan dan penghapusan emisi serta kredit HFLD mengalami perubahan menjelang 2030. Proporsi kredit pengurangan emisi, termasuk kredit HFLD, dalam portofolio akan menjadi jumlah kredit terbesar dalam waktu dekat, yang akan memuncak dalam jangka

menengah karena dunia mencapai target deforestasi nol. Proporsi kredit penghapusan dalam portofolio perusahaan pada awalnya pastinya merupakan persentase kecil dari total keseluruhan dan akan tumbuh dari waktu ke waktu seiring dengan laju keberhasilan kolektif dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

## LANGKAH 2

## Membangun Portofolio Anda dengan Pembelian yang Mendorong Permintaan akan Pemberian Kredit Skala Yurisdiksional yang Berkualitas Tinggi

Seperti yang dijelaskan dalam [Rekomendasi IV](#), organisasi perumus menyarankan agar perusahaan cepat-cepat mengalihkan permintaan ke kredit yang berasal dari program skala yurisdiksional (termasuk proyek yang sepenuhnya diwadahi),<sup>25</sup> termasuk dari yurisdiksi Adat. Ini dapat dicapai dengan:

- Mengembangkan pembelian kredit perusahaan secara cepat agar menyertakan pangsa kredit yang terus meningkat yang berasal dari program-program skala yurisdiksional (termasuk berbagai proyek yang sepenuhnya diwadahi);
- Mempercepat transisi ke pemberian kredit skala yurisdiksional dengan memberi sinyal permintaan melalui komitmen dan perjanjian pembelian di muka dan pembiayaan di muka; dan
- Mendorong pengembang proyek dan proyek yang sudah ada untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengedepankan pemberian kredit skala yurisdiksional berkualitas tinggi dan kerangka kerja akuntansi terkait, dan lantas mewadahnya.

Kredit karbon hutan skala yurisdiksional masuk ke dalam tiga tingkatan, yang dibedakan berdasarkan perkembangannya terhadap program yurisdiksional berkualitas tinggi, atau untuk menjadi terwadahi sepenuhnya dalam program (Tabel 1). Perusahaan harus mengikuti urutan kredit pilihan yang direkomendasikan ini saat membeli kredit karbon hutan tropis—dengan asumsi bahwa semua kriteria TFCI lain terpenuhi. Lihat [Rekomendasi II](#) untuk kriteria dan [Panduan Penerapan Langkah 3](#) untuk uji tuntas yang diperlukan guna memastikan kredit berkualitas tinggi.

**Dalam setiap kategori kredit, perusahaan harus memprioritaskan kredit yang, selain memenuhi semua kriteria TFCI, juga memberikan manfaat yang paling langsung dan adil bagi IP dan LC.**

Dengan secara cermat memilih pembelian kredit mereka berdasarkan preferensi mereka, perusahaan dapat menggunakan daya beli mereka untuk mengirim sinyal permintaan akan kredit karbon hutan berkualitas tinggi yurisdiksional atau yang sepenuhnya diwadahi kepada standar kredit karbon, pengembang proyek dan otoritas yurisdiksional.

### Panduan Pembelian Jangka Pendek

TFCI telah menilai semua standar pemberian kredit skala yurisdiksional utama dan skenario pemberian wadah di dalamnya terhadap serangkaian kriteria TFCI. Ini adalah dasar untuk mengidentifikasi standar/skenario mana yang sesuai dengan panduan TFCI dalam setiap kategori di bawah ini. Untuk detailnya, Lihat [Penilaian Standar terhadap Kriteria TFCI di Lampiran ke Langkah 2](#).

**Perusahaan harus memulai dengan kredit Tingkat 1 (Tabel 1) untuk pembelian atau perjanjian pembelian atau pembiayaan di awal, dan dilanjutkan ke tingkat berikutnya jika (a) kredit tersebut tidak tersedia, (b) kredit Tingkat 1 yang tersedia saat ini beserta perjanjian pembelian di awal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan kepemilikan kredit dalam waktu dekat, dan/atau (c) kredit Tingkat 1 tidak membantu memenuhi komitmen perusahaan untuk berinvestasi di lokasi geografi tertentu guna mengedepankan hasil sosial dan lingkungan.**

**Peninjauan panduan yang jauh lebih terperinci [Lampiran ke Langkah 2](#) adalah untuk memahami sepenuhnya kategori kredit TFCI dan kriteria terkait serta untuk menentukan apakah kredit memenuhi kriteria tersebut. (Lihat “Penilaian Standar terhadap Kriteria TFCI untuk Kredit yang Sepenuhnya Diwadahi” dalam Lampiran Langkah 2 untuk penjelasan skenario pemberian wadah dalam standar ART TREES dan REDD+ (JNR) Yurisdiksional dan Diwadahi dari Verra yang diidentifikasi pada tingkat di bawah ini ([Tabel 2](#)) serta [penilaian skenario tersebut terhadap kriteria TFCI \(Tabel 3\)](#)).**

<sup>25</sup> Lihat Glosarium untuk definisi “proyek yang diwadahi” dan Lampiran ke Langkah 2 untuk kriteria program yurisdiksional berkualitas tinggi dan proyek yang “sepenuhnya diwadahi” dan “siap untuk pemberian wadah”.

**Tabel 1. Urutan Kredit Pilihan<sup>26</sup>**

Asal Kredit	Panduan Pembelian Lihat <a href="#">Lampiran Langkah 2</a> untuk panduan pembelian lengkap. Semua kredit memerlukan uji tuntas tambahan sesuai <a href="#">Langkah 3</a> .
<p><b>Tingkat 1</b></p> <p><b>Program-program yurisdiksional yang sepenuhnya operasional.</b></p> <p><b>Proyek yang sepenuhnya diwadahi.</b></p>	<p>Membeli yang tersedia dan mengadakan perjanjian pembelian di awal dan perjanjian pembiayaan di awal<sup>27</sup> untuk kredit pengurangan berkualitas tinggi yang dihasilkan secara yurisdiksional<sup>28</sup> dan kredit HFLD<sup>29</sup> yang <b>berasal dari program yurisdiksional yang sepenuhnya operasional</b> dan/atau proyek yang sepenuhnya diwadahi di dalamnya:</p> <p>Program yurisdiksi harus disertifikasi dengan standar yang diakui secara internasional yang memenuhi kriteria TFCI, seperti ART TREES, Verra JNR (Skenario 2a atau 3) dan FCPF CF.</p> <p>Proyek harus sepenuhnya diwadahi sesuai dengan ART TREES (Skenario 1 atau 2), VERRA JNR (Skenario 2a atau 3) atau FCPF CF, serta disertifikasi sesuai dengan standar yang diakui secara internasional..</p>
<p><b>Tingkat 2</b></p> <p><b>Proyek yang siap untuk pemberian wadah di yurisdiksi yang membuat kemajuan yang solid terhadap program yurisdiksional yang sepenuhnya operasional.</b></p>	<p>Membeli kredit yang berasal dari proyek pengurangan emisi berkualitas tinggi yang memenuhi kriteria TFCI untuk proyek yang siap untuk pemberian wadah:</p> <p>Skenario program yurisdiksional harus berupaya memenuhi standar yang diakui secara internasional yang memenuhi kriteria TFCI, seperti ART TREES, Verra JNR (Skenario 2a atau 3) dan FCPF CF.</p> <p>Proyek harus disertifikasi sesuai dengan standar yang diakui secara internasional serta berupaya untuk sepenuhnya diwadahi sesuai dengan ART TREES (Skenario 1 atau 2) atau VERRA JNR (Skenario 2a atau 3).</p>
<p><b>Tingkat 3</b></p> <p><b>Proyek yang diwadahi dalam program yurisdiksional yang tidak bermaksud untuk mengeluarkan kredit.</b></p>	<p>Membeli kredit yang berasal dari proyek pengurangan emisi berkualitas tinggi yang memenuhi kriteria TFCI untuk proyek yang siap untuk pemberian wadah dan berlokasi di yurisdiksi yang tidak bermaksud mengeluarkan kredit dan hanya bermaksud untuk mengizinkan proyek yang diwadahi.</p> <p>Program yurisdiksional harus disertifikasi untuk Skenario 2b Verra JNR.</p> <p>Proyek harus sesuai dengan Skenario 2b Verra JNR serta disertifikasi dengan standar yang diakui secara internasional.</p>

<sup>26</sup> Entitas mana pun yang mengeluarkan unit pengurangan atau penghapusan emisi yang tidak diidentifikasi di sini tidak memenuhi kriteria TFCI pada saat penulisan ini. Ini termasuk REDD.plus, yang merupakan platform, bukan standar.

<sup>27</sup> Perjanjian harus menyampaikan ketentuan ambang batas untuk program yurisdiksional berkualitas tinggi. Lihat tonggak pencapaian kemajuan indikatif terhadap operasionalisasi program REDD+ yurisdiksional berkualitas tinggi (lihat Lampiran ke Langkah 2, Tingkat 2, untuk tonggak pencapaian).

<sup>28</sup> Sesuai panduan pada Langkah 1 di atas: Sembari kita menjelang 2040, perusahaan harus mengadakan perjanjian pembelian di awal dan pembiayaan di awal untuk kredit penghapusan—dalam kategori kredit apa pun yang mereka beli—guna mengantisipasi kebutuhan mereka akan kredit penghapusan untuk menyeimbangkan emisi residu dalam jangka panjang. Saat komunitas global mencapai tujuan deforestasi dan degradasi hutan globalnya serta investasi dalam kredit pengurangan tidak lagi mendesak, sumber daya dapat dialihkan untuk mencakup pembelian kredit penghapusan. Perlu dicatat bahwa organisasi perumus telah memfokuskan penilaian kami mengenai standar dan kriteria pada pemberian wadah untuk kredit pengurangan; analisis tambahan diperlukan untuk menentukan cara terbaik dalam menerapkan kriteria pemberian wadah ke proyek penghapusan.

<sup>29</sup> Sampai tulisan ini dibuat, ART TREES dan FCPF CF memberi kredit kawasan HFLD, tetapi hanya dalam konteks program yurisdiksional.



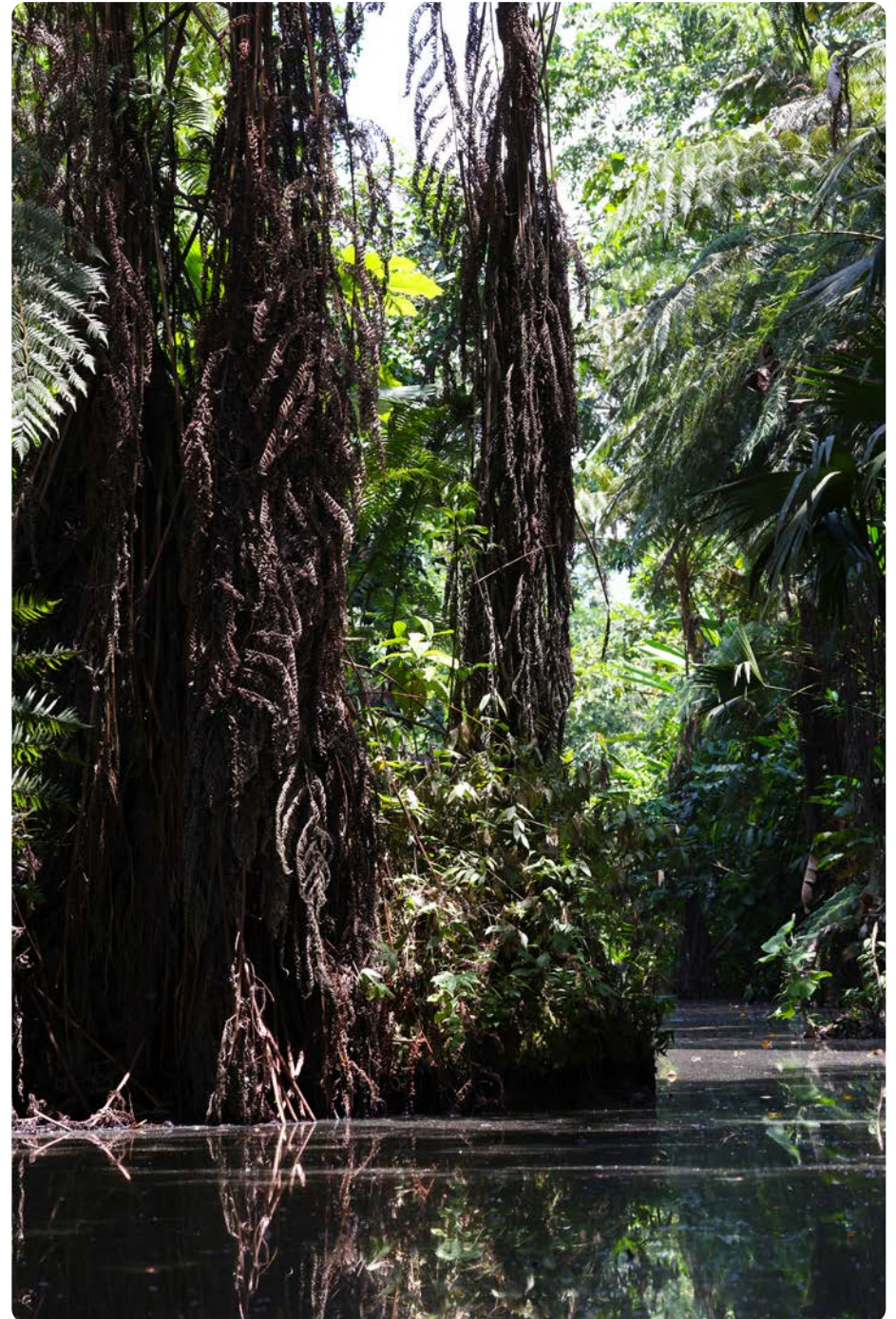
## Kredit yang Berasal dari Yurisdiksi tanpa Program

Di yurisdiksi yang saat ini kekurangan program dan tidak mungkin mengembangkannya dalam jangka pendek hingga menengah<sup>30</sup> (yaitu, proyek yang tidak disebutkan di atas) pembeli harus membatasi pembelian mereka untuk kredit yang berasal dari proyek pengurangan emisi berkualitas tinggi yang (1) memberikan manfaat luar biasa bagi IP, LC, kaum perempuan, komunitas kurang terlayani, adaptasi, ketahanan, ketahanan pangan, dan/atau keanekaragaman hayati, dan (2) memenuhi kriteria relevan yang siap untuk pemberian wadah TFCI [kriteria siap untuk pemberian wadah](#), termasuk pengadopsian acuan dasar yang dialokasikan secara yurisdiksional.<sup>31</sup> Lebih lanjut, kredit tersebut harus diverifikasi dan divalidasi berdasarkan standar yang diakui secara internasional (misalnya, Verified Carbon Standard (VCS)<sup>32</sup>) dan disaring untuk kepatuhan pada semua kriteria kualitas TFCI. *Lihat Panduan Penerapan [Langkah 3](#) untuk uji tuntas yang direkomendasikan.*

30 Atau yang memiliki program yurisdiksional yang tidak mencakup lingkup kegiatan proyek tertentu.

31 Untuk menentukan apakah manfaat langsung dan luar biasa disediakan untuk IP, LC, kaum perempuan, komunitas kurang terlayani dan/atau keanekaragaman hayati oleh suatu proyek, pembeli harus berkonsultasi dengan IP, LC dan/atau organisasi lingkungan yang relevan dan kredibel untuk memberikan dokumentasi manfaat.

32 Organisasi perumus belum secara komprehensif meninjau standar pemberian kredit skala proyek dan tidak mendukung atau mengesampingkan standar atau metodologi skala proyek tertentu.



### LANGKAH 3

## Melakukan Uji Tuntas untuk Memastikan Kredit yang Berkualitas Tinggi

Seperti halnya pada setiap keputusan pengadaan atau pembelian, perusahaan harus melampaui ketergantungan eksklusif pada standar dan melakukan uji tuntas tambahan guna memastikan integritas sosial dan lingkungan atas pembelian mereka. Meskipun uji tuntas selalu diperlukan, intensitas dan fokusnya akan berbeda-beda berdasarkan jenis dan sumber kredit yang dibeli. Perusahaan juga harus tetap terinformasikan dengan baik tentang kualitas standar dan upaya pemberian kredit itu sendiri. Perusahaan harus terbiasa mempertimbangkan kualitas kredit hutan tropis utama, serta dokumentasi yang harus mereka cari dan pertanyaan yang harus mereka ajukan kepada pengembang proyek dan pemasok kredit untuk mengatasi potensi kesenjangan dalam standar dan risiko terkait.

### Membedakan Standar dengan Upaya Lain

Perusahaan pertama-tama harus membedakan standar yang sudah dikembangkan dengan baik dan diakui secara luas dengan upaya lain yang tidak memenuhi definisi suatu standar. Sejumlah upaya, platform dan inisiatif nonstandar yang berupaya mempromosikan unit karbon hutan tropis tidak menyertakan unsur-unsur penting dari standar yang diakui secara internasional, seperti verifikasi dan validasi oleh pihak ketiga independen. Verifikasi dan validasi oleh pihak ketiga sangat penting untuk memastikan bahwa kredit (a) dihasilkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta persyaratan perlindungan; (b) telah menetapkan hak karbon dan mengimplementasikan FPIC; (c) telah meminimalkan risiko ketidakpastian; dan (d) dipantau berdasarkan acuan dasar yang kredibel. (Lihat “Bidang Krusial untuk Uji Tuntas” untuk informasi lebih lanjut tentang konsep teknis, seperti acuan dasar.) Platform yang tidak memiliki unsur-unsur ini—seperti saat ini dalam kasus platform REDD.plus, misalnya<sup>33</sup>—bukanlah standar dan tidak boleh diandalkan untuk membedakan kredit berkualitas tinggi sesuai dengan kriteria TFCI. Namun, pembelian unit yang tidak diverifikasi mungkin dihargai oleh perusahaan untuk tujuan perusahaan lainnya, seperti filantropi.

33 Misalnya, REDD.Plus menggunakan tingkat emisi referensi hutan/forest reference emission level (FREL) yang telah menjalani penilaian teknis oleh UNFCCC. Namun, Keputusan UNFCCC 13/CP19 (Lampiran) menyatakan bahwa penilaian teknis itu akan dibatasi pada “pertukaran informasi teknis yang fasilitatif dan non-intrusif yang mendukung kapasitas Para Pihak negara berkembang untuk penegakan dan perbaikan di masa depan, sebagaimana mestinya, atas tingkat emisi referensi hutan dan/atau tingkat referensi hutan mereka, sesuai dengan kemampuan dan kebijakan nasional.” Penilaian ini, sesuai rancangan, tidak dimaksudkan untuk menuntut kepatuhan pada standar atau metodologi teknis apa pun yang berlaku bagi sektor swasta.

### Variasi di antara Standar dan Kebutuhan akan Perbaikan Berkelanjutan

Bahkan standar yang dikembangkan dengan baik dan diakui secara luas pun bervariasi dalam persyaratannya, khususnya yang berkaitan dengan kriteria sosial dan lingkungan utama (lihat [Rekomendasi II](#)). Ada kesenjangan dan kelemahan dalam banyak standar yang dapat berkontribusi pada variasi dalam tingkat kualitas lingkungan dan sosial. Perusahaan juga harus menyadari bahwa proyek yang diverifikasi dan divalidasi dengan standar yang sama dapat memiliki kualitas yang berbeda-beda.

Organisasi penyusun standar dan sertifikasi sebaiknya mendorong perusahaan agar berpartisipasi secara efisien di pasar melalui standar dan protokol verifikasi dan validasi yang komprehensif, ketat dan transparan. Perusahaan didorong untuk mengadvokasi agar organisasi penyusun standar mengembangkan dan meningkatkan standar yang mewujudkan integritas sosial dan lingkungan yang tinggi, yang konsisten dengan sains terkini dan terbaik, serta praktik terbaik untuk memastikan manfaat iklim sepenuhnya. Penguatan semacam itu akan mendorong perusahaan untuk membeli kredit REDD+ (yang selanjutnya disebut kredit skala yurisdiksional) yang berkualitas tinggi dan berskala yurisdiksional (termasuk yang sepenuhnya diwadahi) sesuai ketersediaannya.

### Standar yang Diakui oleh TFCI

Satu-satunya standar yurisdiksional dan pemberian wadah yang saat ini diakui TFCI adalah Architecture for REDD+ Transactions’ The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART TREES), Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR) dari Verra and Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF). Hanya standar ini yang cukup selaras dengan ambang batas kualitas Panduan TFCI (per Februari 2023) dan, oleh karena itu, kredit yang dihasilkan

secara yurisdiksional dari standar ini dapat dipertimbangkan untuk dibeli setelah uji tuntas yang memuaskan.

TFCI belum meninjau secara komprehensif standar pemberian kredit skala proyek—(misalnya, VCS) Verra serta tidak pula mendukung atau mengesampingkan standar atau metodologi skala proyek tertentu.

## Bidang Krusial untuk Uji Tuntas

Ada lima bidang krusial untuk uji tuntas dalam pembelian kredit karbon hutan tropis:

- **Keterlibatan penuh dan efektif dengan Masyarakat Adat, komunitas lokal, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya sebagai mitra aktif;**
- **Keadilan dan transparansi dalam pengaturan pembagian manfaat;**
- **Memanfaatkan acuan dasar yang konservatif dan kredibel;**
- **Mengatasi risiko nonpermanensi; dan**
- **Verifikasi dan validasi yang cukup ketat dan/atau independen.**

Latar belakang dasar setiap bidang utama untuk uji tuntas diberikan di bawah ini, beserta usulan tentang cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan uji tuntas guna memastikan kualitas masing-masingnya. Tindakan yang diusulkan menggambarkan langkah-langkah dasar yang dapat diambil perusahaan untuk memperoleh informasi penting. Dalam beberapa kasus, tindakan teladan tambahan dapat teridentifikasi. Tindakan yang diusulkan ini tidak boleh dianggap sebagai uji tuntas yang komprehensif; perusahaan harus menilai informasi yang mereka terima dari pengembang proyek, pemasok kredit, yurisdiksi dan lain-

lain serta menyelidiki setiap bidang di mana mereka kurang yakin apakah kriteria TFCI untuk kualitas tinggi dalam Panduan ini telah terpenuhi.

*Catatan tentang uji tuntas untuk kredit skala yurisdiksional:* Seperti yang dijelaskan dalam [Lampiran Rekomendasi IV](#) (“Jalur Menuju Pemberian Kredit Karbon Hutan Skala Yurisdiksional”), banyak risiko yang terkait dengan acuan dasar yang digelembungkan, nonpermanensi dan integritas sosial yang dapat dikurangi secara signifikan melalui peningkatan skala. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa integritas lingkungan untuk pengurangan emisi bergantung pada skala dan perubahan sistemik,<sup>xxxii</sup> di mana keduanya merupakan fitur utama dalam program skala yurisdiksional.<sup>34</sup> Uji tuntas mengenai kriteria dan indikator kemajuan program yurisdiksional dan kesiapan pemberian wadah proyek dapat ditemukan di [Lampiran ke Langkah 2](#).

### A. Keterlibatan penuh dan efektif dengan Masyarakat Adat, komunitas lokal, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya sebagai mitra aktif.

Pelestarian dan restorasi hutan tropis yang efektif dan adil mengharuskan agar IP dan LC, serta kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani, benar-benar memiliki akses ke partisipasi penuh dan efektif dalam proses pengambilan keputusan, dengan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan,<sup>35</sup> sejak saat program atau proyek direncanakan. Untuk setiap kegiatan perencanaan atau implementasi proyek atau program REDD+, IP dan LC harus didampingi oleh penasihat teknis dan hukum, organisasi nasional dan regional mereka serta badan negara yang berwenang; semuanya ini merupakan kondisi pendukung yang krusial<sup>36</sup> untuk partisipasi yang efektif. Karena setiap negara memiliki mekanisme hukum dan bentuk

34 Panduan ini tidak menyarankan ukuran minimum. Standar sangat bervariasi dalam hal cara menangani skala. Standar pemberian kredit skala yurisdiksional saat ini menetapkan yurisdiksi dalam berbagai cara. Standar ART-TREES 2.0 mensyaratkan yurisdiksi memiliki lingkup nasional selambat-lambatnya pada 2030 dan, sebelum itu, boleh berlingkup nasional atau sekurang-kurangnya satu tingkat di bawah pemerintah federal (misalnya, negara bagian atau provinsi). Terdapat persyaratan ukuran minimum tambahan untuk yurisdiksi subnasional, yaitu tidak kurang dari 2,5 juta hektare area hutan. Ambang batas ukuran minimum untuk area pemberian kredit bisa dicapai melalui agregasi yurisdiksi subnasional dan/atau wilayah Adat. California Tropical Forest Standard (TFS) mengizinkan yurisdiksi nasional atau subnasional “yang biasanya berbentuk negara bagian atau” tanpa persyaratan ukuran luas. Standar VCS Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR) mensyaratkan yurisdiksi agar berupa unit nasional atau administratif yang tidak lebih dari dua tingkat di bawah pemerintah nasional (misalnya, kota madya di Brasil), tanpa persyaratan ukuran luas. Forest Carbon Partnership Facility Methodological Framework mengizinkan yurisdiksi untuk berupa pemerintah nasional atau area akuntansi subnasional “berskala signifikan,” termasuk yurisdiksi politik atau kawasan lainnya (misalnya, kawasan ekologis) yang ditetapkan oleh pemerintah nasional.

35 Tentang FPIC (PRADIATAPA): “Persetujuan harus diupayakan sebelum proyek, rencana, atau tindakan apa pun dilakukan (didahulukan), dan harus diputuskan secara independen (bebas) serta berbasis informasi yang akurat, tepat waktu dan memadai yang diberikan dalam cara yang tepat secara budaya (terinformasikan) agar dianggap sebagai hasil atau manfaat yang valid dari proses pengambilan keputusan bersama. Referensi: “Free Prior and Informed Consent. An Indigenous peoples’ right and a good practice for local communities: Manual for Project Practitioners,” Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016.

36 Kondisi pendukung secara umum merujuk kepada penguatan kapasitas IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya untuk melakukan semua kegiatan dan proses yang diperlukan demi keberhasilan pelaksanaan proyek/program REDD+ sejak awal program atau proyek selaku mitra dan bukan penerima manfaat, dan memastikan partisipasi penuh dan efektif, termasuk dalam semua aspek perancangan dan pelaksanaan pengaturan pembagian manfaat.

perwakilan yang berbeda, perusahaan harus berkonsultasi dengan organisasi IP dan LC nasional untuk mendapatkan rekomendasi mengenai cara terbaik dalam mengimplementasikan proyek dan program tanpa menimbulkan kerugian bagi IP dan LC serta cara hidup mereka.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini kurang terepresentasikan dan harus diterapkan secara universal. Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, dukungan mungkin perlu diberikan bagi IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya untuk membangun kapasitas teknis mereka sendiri, sesuai dengan Cancun Safeguards (Skema Perlindungan Cancun). Pengembang program dan proyek yurisdiksional harus memastikan bahwa penilaian kepatuhan pada pengamanan dan partisipasi efektif dilakukan dengan partisipasi dan keterlibatan aktif IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya pada semua tingkat perwakilan politik yang dianggap relevan oleh peserta; penilaian tersebut harus dilakukan oleh evaluator pihak ketiga yang berpengetahuan luas, independen dan tersedia berdasarkan permintaan.

Upaya-upaya untuk pelestarian hutan tropis yang diprakarsai dan/atau diarahkan oleh IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya harus diprioritaskan untuk dipertimbangkan. Semua kelompok ini mendapatkan manfaat berupa pengakuan akan hak dan pembiayaan jalur-jalur swakarsa dalam mengimplementasikan tata kelola dan perekonomian Adat dan lokal, serta integritas budaya dan ekologi sebagaimana tertuang dalam instrumen manajemen organisasi dan wilayah mereka, seperti rencana hidup komunal yang lazim ditemui di Amerika Latin.<sup>xxxiii</sup>

Dukungan ini dapat menciptakan kondisi pendukung bagi implementasi inisiatif yang diarahkan oleh kelompok-kelompok ini, seperti Amazon Indigenous REDD+ (RIA), sebuah proses dan proposal teknis sedang dikembangkan oleh Coordinating Committee of Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA) dan organisasinya di tingkat yurisdiksi. RIA adalah contoh pendekatan REDD+ yurisdiksional yang diarahkan oleh Masyarakat Adat<sup>37</sup> untuk partisipasi IP dan LC secara penuh dan efektif dalam prosesnya, dan pembagian manfaat untuk tindakan-tindakan di lapangan dalam melawan deforestasi dan degradasi hutan tropis.

Jika tersedia, perusahaan harus memprioritaskan kredit yang: langsung tersedia dari inisiatif yang diarahkan oleh IP dan LC; sepenuhnya diwadahi dalam akuntansi yurisdiksional; dan dari yurisdiksi yang menghormati hak pemilik hutan, terutama kelompok-kelompok yang disebutkan di atas, untuk mengakses pasar karbon secara langsung.

Perusahaan harus menghubungi langsung pihak penjual kredit untuk dokumentasi partisipasi IP dan LC dalam perancangan dan pengelolaan aktivitas terkait, akuntansi dan mekanisme pemberian kredit, serta untuk dokumentasi dukungan teknis dan keuangan yang disediakan agar IP dan LC dapat berpartisipasi secara efektif sepenuhnya. Dokumentasi kepatuhan pada Cancun Safeguards harus diminta. Perusahaan juga dapat menanyakan tentang program yurisdiksional dalam kaitannya dengan apakah program tersebut memungkinkan IP dan LC menerima dan memperdagangkan kredit secara langsung berdasarkan kegiatan di wilayah mereka. Perusahaan yang memiliki kompetensi budaya untuk penjangkauan langsung ke IP dan LC dapat menghubungi kelompok-kelompok tersebut secara langsung guna menanyakan pengalaman dan penilaian mereka mengenai program dan proyek terhadap kriteria integritas sosial.

## B. Keadilan dan transparansi dalam pengaturan pembagian manfaat.

Berdasarkan panduan dalam [Rekomendasi II](#), perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memahami bagaimana manfaat dibagikan kepada IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya dalam proyek atau program tertentu, dan memprioritaskan pembelian kredit dengan pengaturan yang paling adil dan transparan. Perusahaan harus meninjau rencana dan perjanjian untuk penyaluran manfaat dan pendapatan yang wajar, transparan dan adil serta memastikannya dikembangkan dalam kemitraan dengan pemegang hak yang relevan dan pemangku kepentingan lainnya. Pembagian manfaat harus mempertimbangkan partisipasi penuh dan efektif serta memberikan penghargaan kepada IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya atas peran vital mereka dalam pelestarian hutan. Proyek dan program harus mengalokasikan persentase pendapatan tertinggi kepada kelompok-kelompok ini sesuai dengan kontribusi mereka terhadap perlindungan hutan.

37 COICA mendefinisikan pendekatan REDD+ yurisdiksional yang diarahkan masyarakat Adat sebagai: penerapan strategi untuk mengurangi emisi akibat penggunaan lahan dan perubahan pada tingkat yurisdiksi, dalam hal ini, wilayah Adat). Pendekatan ini didasarkan pada pedoman Amazon Indigenous REDD+ (RIA, sebuah proposal tersendiri dari COICA yang memprioritaskan manajemen holistik hutan dan wilayah Adat serta mengakui struktur tata kelolanya), dan memastikan tidak hanya penghormatan atas hak wilayah dan lahan serta PRADIATAPA untuk Masyarakat Adat, tetapi juga partisipasi efektif dari Masyarakat Adat di dalam prosesnya dan penyaluran manfaat yang adil. Secara khusus, area dengan tajuk vegetasi tinggi dan deforestasi rendah (HFLD) diupayakan untuk dimasukkan karena sebagian besar wilayah Adat, karena capaiannya dalam pelestarian hutan, merupakan kawasan HFLD.

Jika memungkinkan, penyaluran manfaat harus diberikan langsung kepada IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya yang melindungi hutan, alih-alih melalui perantara pihak ketiga yang membutuhkan biaya administrasi yang besar. Menciptakan kondisi yang memungkinkan penyaluran dana secara langsung<sup>38</sup> harus diprioritaskan. Akan tetapi, jika perantara memang diperlukan karena kurangnya kapasitas dalam menerima dana secara langsung—atau sejumlah hasil pendapatan dari proyek diperlukan untuk membiayai pengembangan kapasitas dan/atau menyediakan dukungan teknis—maka peran dan biaya terkait dari jasa perantara harus transparan dan disepakati sebelumnya oleh semua pihak. Dana yang diterima langsung oleh IP dan dana yang dikelola oleh pihak-pihak lain (misalnya, badan pemerintah) untuk mendukung IP harus diinvestasikan berdasarkan proposal IP dan melalui perangkat manajemen wilayah mereka, yang meliputi kegiatan kesiapsiagaan di hutan, perekonomian Adat, tata kelola dan pemulihan pengetahuan leluhur.

Perusahaan harus menghubungi langsung pihak penjual kredit dan meminta peninjauan atas pengaturan pembagian manfaat dan dokumentasi implementasi. Uji tuntas tambahan dapat mencakup konfirmasi kepuasan secara independen terhadap perjanjian dan implementasinya dengan perwakilan IP dan LC yang merupakan peserta/penanda tangan perjanjian tersebut.

### C. Acuan dasar konservatif yang tepat.

Acuan dasar untuk stok dan emisi karbon hutan adalah tolok ukur yang digunakan untuk menghitung *berapa banyak kredit karbon yang akan dihasilkan suatu proyek/program*. Acuan dasar harus solid dan berbasis bukti pada semua skala untuk memastikan integritas lingkungan.

Metodologi acuan dasar biasanya mengandalkan ekstrapolasi data historis (tingkat emisi rata-rata selama periode historis tertentu<sup>39</sup>) berdasarkan seluruh yurisdiksi (dalam hal program yurisdiksional) atau area yang “mirip” dengan proyek yang diusulkan, terkadang disebut wilayah acuan. Dalam beberapa keadaan, data tersebut dapat dilengkapi dengan pemodelan perubahan penggunaan lahan yang ketat secara ilmiah sebagai cara memperkirakan

risiko deforestasi di seluruh lanskap. Praktik terbaik untuk pendekatan “rata-rata historis” dan pemodelan risiko deforestasi dalam konteks acuan dasar proyek memerlukan data terbaik dan teknik pemodelan ilmiah yang tersedia pada saat pembuatan acuan dasar; yang mengutamakan penurunan ketidakpastian dalam pengamatan deforestasi historis; menggunakan dan mendokumentasikan asumsi konservatif (yaitu, untuk menghindari potensi pemberian kredit yang berlebihan); dan meminimalkan bias dalam pembuatan peta risiko yang dihasilkan dari kekhususan informasi yang tidak merata di seluruh yurisdiksi.

Acuan dasar yang menjadi patokan pemberian kredit oleh beberapa proyek bersertifikasi ternyata melebihi deforestasi terpantau yang terjadi dalam kawasan yang lebih luas.<sup>xxxiv</sup> Masalah ini saat ini sedang ditangani oleh beberapa organisasi penyusun standar, yang akan memerlukan penggunaan rata-rata historis dari area acuan yang dikembangkan secara objektif dan pemodelan risiko deforestasi skala besar untuk memperkirakan risiko dalam waktu mendatang. Namun, karena persyaratan baru ini mungkin berlaku hanya di masa mendatang (atau tidak berlaku sama sekali untuk proyek lama), persyaratan tersebut tidak meniadakan perlunya uji tuntas tambahan dalam jangka pendek. Dalam keadaan tertentu (misalnya, wilayah HFLD), analisis tren atau risiko dalam perhitungan acuan dasar mungkin merupakan hal yang tepat. Metodologi akuntansi karbon terus mengalami perbaikan, dan pembeli harus mendorong dan mendukung pendekatan acuan dasar yang baru dan lebih baik. Acuan dasar yurisdiksional secara inheren kurang rentan terhadap subjektivitas yang terkait dengan pemilihan wilayah acuan tersier.

Menyelaraskan acuan dasar lintas skala, mulai dari tingkat proyek hingga yurisdiksional, juga sangat pentinglah untuk menegakkan integritas lingkungan dalam pemberian kredit. Pengurangan dan penghapusan emisi skala proyek harus diperhitungkan dalam akuntansi dan pelaporan yurisdiksional (di mana sudah ada program yurisdiksional). Suatu program yurisdiksional dan/atau proyek yurisdiksional yang diwadahi dalam program yurisdiksional hendaknya menetapkan acuan dasar sesuai dengan metodologi akuntansi yurisdiksi, atau jika tidak ada, sesuai dengan acuan dasar yang disertifikasi secara independen dan dialokasikan secara yurisdiksional. Proyek yang siap untuk pemberian wadah juga harus memulai proses

38 Dalam konteks ini, kondisi pendukung mencakup kapasitas administratif, kapasitas menegosiasikan dana dan kapasitas advokasi politik untuk memastikan akses langsung ke/penyaluran dana. Penciptaan kondisi pendukung harus didukung oleh pemerintah yurisdiksional atau pengembang program/proyek lain guna memastikan bahwa program/proyek memiliki integritas sosial yang tinggi.

39 Kecuali dalam kasus yurisdiksi HFLD di mana rata-rata historis meremehkan besarnya ancaman deforestasi dalam waktu mendatang.

untuk mengadopsi acuan dasar yang disertifikasi secara independen dan dialokasikan secara yurisdiksional segera setelah acuan dasar dikembangkan.

Perusahaan harus mengedukasi diri sendiri tentang acuan dasar untuk proyek dan program yang mereka pertimbangkan untuk portofolionya dengan secara langsung melibatkan entitas yang menjual kredit untuk memahami bagaimana acuan dasar ditetapkan. Misalnya, perusahaan dapat menanyakan bagaimana proyek atau program (a) memastikan penggunaan data terbaik yang ada dan teknik pemodelan ilmiah yang digunakan dalam menghitung acuan dasar pemberian kredit dan (b) menggunakan estimasi konservatif untuk mengatasi ketidakpastian.

#### D. Mengatasi risiko nonpermanensi.

“Permanensi” secara umum berarti bahwa manfaat atmosfer yang diklaim oleh proyek atau program pemberian kredit karbon bertahan lama seiring waktu. Suatu “pembalikan” terjadi ketika pengurangan atau penghapusan emisi GHG yang dikreditkan oleh kegiatan mitigasi kemudian dibalikkan.<sup>40</sup> Pembalikan dapat terjadi, misalnya, karena bencana alam, salah urus proyek atau perubahan kebijakan/perputaran politik yang signifikan. Oleh karena itu, kegiatan mitigasi mungkin hanya menghasilkan manfaat GHG sementara bagi atmosfer. Namun, perlu dicatat bahwa semua standar saat ini mensyaratkan agar proporsi dari semua kredit yang diproduksi ditempatkan di ‘pool penyangga nonpermanensi’ (spesifikasi bervariasi menurut standar), untuk memastikan bahwa total pemberian kredit di seluruh standar bersifat positif bagi atmosfer. Selain itu, setiap proyek tidak dapat menghasilkan kredit tambahan terverifikasi sebelum pembalikan dipulihkan.

Kredit yang berasal dari program REDD+ yurisdiksional (termasuk proyek yang diwadahi dalam program ini) mungkin tidak begitu rentan terhadap risiko pembalikan/nonpermanensi karena intervensi program yurisdiksional cenderung dirancang untuk mengatasi faktor penyebab deforestasi skala lanskap secara holistik (misalnya, dalam skala nasional atau subnasional besar).<sup>xxxv</sup> Contoh pengurangan emisi dengan skala terbesar yang dicapai oleh suatu negara menunjukkan bahwa pengurangan sesuai skala bahkan dapat melawan upaya agresif untuk membalikkan kebijakan dan meningkatkan emisi.<sup>xxxvi</sup> Untuk menghindari

pembalikan dan kebocoran deforestasi dari satu area dalam satu yurisdiksi ke area lainnya, program yurisdiksional juga harus menyediakan kerangka hukum, akuntansi dan pemantauan yang dapat menghadapi perputaran politik.

Metode untuk mengelola pembalikan bersih dari program dan proyek REDD+ yurisdiksional yang diwadahi dalam program-program ini dapat mencakup: skala spasial yang lebih besar; akses ke sumber daya keuangan yang memadai; pelaporan emisi skala yurisdiksional; keterlibatan pemangku kepentingan lokal; perancangan intervensi untuk mengatasi faktor penyebab langsung dan tidak langsung deforestasi (termasuk kebijakan yang bertahan lama dan reformasi hukum); pemantauan jangka panjang; dan penetapan acuan dasar yang lebih konservatif. Standar harus transparan dalam pengelolaan risiko pembalikan/nonpermanensi serta proses mereka untuk sepenuhnya menangani setiap pembalikan yang mungkin terjadi.

Perusahaan harus menghubungi langsung pihak penjual kredit untuk memahami cara penanganan risiko nonpermanensi. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat menanyakan kepada program apakah pembalikan telah terjadi; dan jika sudah, bagaimana jangka waktu pengidentifikasian dan pemulihannya.

#### E. Verifikasi dan validasi yang cukup ketat dan/atau independen

Badan verifikasi dan validasi (V&V), yang sering disebut sebagai auditor, adalah entitas pihak ketiga independen dan terakreditasi yang menilai apakah suatu proyek atau program, dan kredit karbon yang dikeluarkannya, sesuai dengan persyaratan standar penyertifikasiannya (misalnya, penilaian risiko pembalikan, kebocoran dan penurunan ketidakpastian).

Tanpa verifikasi dan validasi independen oleh auditor kredibel dengan keahlian dalam standar yang mereka nilai, suatu proyek atau program tidak dapat ditentukan telah memenuhi persyaratan untuk penerbitan kredit berkualitas tinggi. Standar kredibel mengharuskan proyek atau program, yang mana mereka mengeluarkan kredit, untuk lulus penilaian V&V independen. Upaya yang tidak mengharuskan langkah ini tidak memenuhi kriteria TFCl (misalnya, platform REDD.plus).

40 Lihat Panduan Penyeimbangan Karbon yang tersedia di <https://www.offsetguide.org/high-quality-offsets/permanence/>.

Kinerja dan konsistensi auditor sangat penting untuk integritas standar pemberian kredit, dan transparansi sangat penting untuk memahami efektivitas proses pengauditan. Keluhan yang telah dikemukakan adalah kurangnya transparansi terkait dengan kinerja dan konsistensi auditor. Pembeli harus menentukan apakah persyaratan dari setiap standar tampak memadai untuk memastikan transparansi kinerja auditor dan apakah badan V&V yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis yang memadai dalam sektor kehutanan, dan khususnya REDD+.

Perusahaan harus meninjau dokumentasi program/proyek mengenai standar dan metodologi dan/atau skenario mana yang diikuti oleh kredit; protokol V&V mana yang diikuti; dan siapa validator pihak ketiga (yang harus bersertifikasi Organisasi Internasional untuk Standardisasi).<sup>41</sup>

#### **Sumber daya uji tuntas tambahan**

Dalam beberapa bulan mendatang, organisasi perumus TFCI berencana merilis sumber daya praktis tambahan guna membantu pembeli kredit karbon hutan tropis dalam melakukan uji tuntas untuk pembelian potensial.

<sup>41</sup> "Sertifikasi," tersedia di <https://www.iso.org/certification.html>.

## LANGKAH 4

## Menindaklanjuti dengan Tindakan Pelengkap dan Mengikuti Perkembangan Baru

Mengurangi deforestasi dan degradasi pada skala yurisdiksional merupakan tantangan sangat besar tapi penting yang tidak dapat dipenuhi tanpa tindakan dan tanggung jawab bersama. Perusahaan harus mempertimbangkan tindakan pelengkap<sup>42</sup> yang mengedepankan pengembangan dan kinerja program yurisdiksional berkualitas tinggi. Perusahaan harus berhati-hati untuk menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau insentif yang merugikan, terutama yang berkaitan dengan transaksi atau fasilitasi transaksi kredit antara pembeli (perusahaan) dan penjual (misalnya, masyarakat Adat, yurisdiksi tuan rumah atau proyek yang diwadahi).

**A. Meningkatkan investasi dalam pengembangan produk rantai pasokan yang berkelanjutan di gudang pasokan yang terdapat dalam program yurisdiksional** yang menunjukkan kemajuan indikatif terhadap operasionalisasi program REDD+ yurisdiksional berkualitas tinggi (lihat [Lampiran ke Langkah 2](#) untuk tonggak pencapaian). Hal ini dapat memacu kemajuan lebih lanjut dalam program-program yurisdiksional tersebut dan sekaligus mengurangi paparan perusahaan terhadap risiko pengadaan produk yang terkait dengan deforestasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

**B. Mendukung partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat paling rentan dalam semua aspek pengembangan dan implementasi proyek dan program**, termasuk dalam perancangan proses partisipatif dan studi teknis, dengan memastikan kondisi pendukung (lihat [Rekomendasi II](#)).

**C. Berpartisipasi dalam percakapan dengan pemasok kredit** (misalnya, administrator yurisdiksi, Masyarakat Adat dan komunitas lokal) dalam seluruh perancangan dan implementasi program guna mengembangkan hubungan, meningkatkan komunikasi dan pemahaman akan berbagai prioritas dan kondisi pendukung, serta memastikan penerapan praktik terbaik.

**D. Mendanai implementasi kegiatan yang meningkatkan manajemen lahan dan mengatasi faktor penyebab deforestasi dan degradasi sebagai bentuk dukungan eksplisit untuk strategi lanskap dan yurisdiksional** Ini mungkin meliputi, misalnya, praktik produksi yang bertanggung jawab, pengamanan hak atas lahan atau advokasi untuk kebijakan yang meningkatkan perencanaan penggunaan lahan dan tidak terbatas pada pembiayaan berbasis kredit.

**E. Terlibat dalam kemitraan publik-swasta** di mana perusahaan berinvestasi bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga bantuan multilateral/bilateral guna mewujudkan kepentingan bersama dalam pembentukan infrastruktur dan pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk program yurisdiksional berkualitas tinggi, antara lain seperti pemantauan, pelaporan dan verifikasi/monitoring, reporting, and verification (MRV), penyaluran manfaat yang efisien dan pengembangan kapasitas REDD+ untuk implementasi.

**F. Mengadvokasi kemajuan dalam kualitas pasokan untuk memastikan bahwa organisasi penyusun standar kredit karbon hutan menutup celah kekurangan, meningkatkan tata kelola dan memperkuat persyaratan** untuk menegaskan bahwa bagian yang sampai kepada IP dan LC adalah konsisten dengan pengaturan pembagian manfaat yang adil. Jika yang lain-lainnya setara, perusahaan harus memprioritaskan pembelian dari yurisdiksi dan proyek yang mengirimkan persentase hasil yang lebih besar langsung kepada mitra IP dan LC.

**G. Mengadvokasi kemajuan dalam kualitas pasokan untuk memastikan bahwa organisasi penyusun standar kredit karbon hutan menutup celah kekurangan, meningkatkan tata kelola dan memperkuat persyaratan** untuk meminimalkan uji tuntas tambahan yang mesti dilakukan perusahaan guna memastikan bahwa kredit berkualitas tinggi (lihat [Rekomendasi IIC](#)).

42 "Landscape Scale Action for Forests, People and Sustainable Production: A Practical Guide for Companies," Tropical Forest Alliance, World Wildlife Fund, and Proforest, September 2020, tersedia di <https://jaresourcehub.org/resources/guidance-for-companies/interventions/>.



**H. Mewaspada perkembangan baru yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas kredit atau menciptakan kategori kredit baru, termasuk:**

- Keberlanjutan evolusi standar yang sudah ada dan kemunculan standar baru.
- Metode baru dalam pemberian kredit kawasan HFLD: perhatikan mekanisme pemberian kredit langsung IP dan LC serta alihkan pembelian ke kredit ini saat tersedia (jika itu memenuhi semua kriteria TFCI lainnya).
- Pendekatan baru terhadap pool penyangga dan manajemen risiko yang meningkatkan keyakinan pada permanensi dan penambahan.
- Pergerakan pasar yang semakin tinggi dalam menilai kredit REDD+ karena atribut sosial dan lingkungan terkait di luar karbon.



# Lampiran

# Lampiran

- 44 Lampiran Rekomendasi IV: Jalur Menuju Pemberian Kredit Karbon Hutan Skala Yurisdiksional
- 46 Lampiran ke Langkah 1: Kredit Hutan Tinggi, Deforestasi Rendah (HFLD)
- 48 Lampiran ke Langkah 2: Memilih Kredit untuk Dibeli
- 54 Lampiran ke Langkah 3: Contoh Pertanyaan Uji Tuntas
- 58 Glosarium
- 65 Akronim
- 67 Catatan Akhir



## LAMPIRAN REKOMENDASI IV:

## Jalur Menuju Pemberian Kredit Karbon Hutan Skala Yurisdiksional

### Beralih ke Tindakan Nyata Secara Luas

Skala bisa menjadi penentu penting untuk dampak lingkungan dari kredit karbon, apa pun sektornya. Program berskala lebih besar memiliki posisi yang lebih baik daripada proyek individual yang tidak diwadahi dalam pemberian kredit skala yurisdiksional guna memitigasi risiko kebocoran, non-penambahan, dan non-permanensi.<sup>xxxvii</sup> Kemampuan pelaku untuk memilih sendiri program yang waktu dan posisi lingkungannya paling menguntungkan akan menurun ketika program pemberian kredit memperhitungkan perubahan bersih di semua hutan dalam sebuah yurisdiksi.<sup>xxxviii</sup> Selain itu, sesuai keterangan sebelumnya, program yurisdiksional memiliki potensi dalam memperluas manfaat ke komunitas yang lebih luas.

### Keselarasan dengan Strategi Hutan Skala Negara

Pemberian kredit skala yurisdiksional sudah konsisten dengan Kerangka Kerja Warsaw untuk REDD+,<sup>43,xxxix</sup> yang dirundingkan berdasarkan UNFCCC dan dituangkan dalam Persetujuan Paris. UNFCCC tidak memiliki yurisdiksi atas pasar karbon sukarela, begitu pula Kerangka Kerja Warsaw untuk REDD+ yang merupakan serangkaian aturan yang cukup terperinci yang ditetapkan untuk pemberian kredit. Dengan demikian, Kerangka Kerja Warsaw memang memberikan landasan yang disepakati untuk: (a) menentukan kelayakan untuk pendanaan publik dan swasta berbasis hasil berdasarkan keselarasan dengan program tingkat negara; (b) kuantifikasi dampak pada skala nasional, dan untuk sementara skala subnasional; (c) partisipasi penuh dan efektif oleh IP dan LC serta penghormatan atas hak, penguasaan dan pengetahuan IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani, serta (d) perlindungan sosial dan lingkungan fundamental lainnya.

Program yurisdiksional dengan integritas lingkungan dan sosial yang tinggi yang dikembangkan di lokasi dengan kemauan politik yang kuat akan memberikan kesempatan untuk memulai pergeseran suplai kredit karbon ke skala transformasional. Pemerintah yurisdiksional sangat berbeda-beda dalam hal kesiapan untuk menghasilkan kredit karbon hutan. Namun, contoh penting menunjukkan bukti konsep untuk program yurisdiksional serta pembayaran berbasis hasil dengan menggunakan pendanaan publik untuk mengapresiasi pengurangan ini.<sup>44</sup>

Misalnya, program skala yurisdiksional dan intervensi kebijakan publik, seperti penegakan hukum, memiliki dampak yang signifikan di Brasil.<sup>xi</sup> Deforestasi mengalami penurunan di kawasan Amazon Brasil sebesar 80 persen antara 2004 dan 2014 berkat pendekatan kebijakan nasional, termasuk wilayah Adat dan kawasan lindung, dan sebagian besar pengurangan ini tetap bertahan meskipun terjadi perubahan politik yang tidak ramah bagi pelestarian hutan.<sup>xii</sup> Setelah tiga pemerintahan secara berturut-turut berupaya untuk menghentikan dan mencabut kebijakan kontrol deforestasi, maka deforestasi pun mulai mendekati tingkat 2004. Meskipun belum tersedia secara luas di pasar karbon sukarela, kredit skala yurisdiksional dapat diperoleh melalui perjanjian pembelian di muka.

### Mengatasi Tantangan Implementasi

Agar pemberian kredit skala yurisdiksional yang terkelola dengan baik menjadi kenyataan, sejumlah tantangan implementasi harus diatasi. Tantangan-tantangan ini tersirat dalam peningkatan skala dan tujuan transformatif dari pendekatan ini. Tantangan tersebut mencakup: kompleksitas dan biaya; negosiasi, kompromi dan penggantian (tradeoff) yang diperlukan untuk memenuhi tujuan bagi banyak pemangku kepentingan dalam suatu

43 Perundingan dalam konteks UNFCCC menuju kerangka kerja internasional untuk REDD+ diluncurkan di Bali pada 2007. Keputusan utama berhasil dicapai pada perundingan selanjutnya di Cancun (tentang skema perlindungan) dan Warsaw (tentang kerangka kerja secara keseluruhan), dan kerangka kerja ini dikukuhkan di bawah Pasal 5 Persetujuan Paris.

44 Hingga detik ini, pembelian swasta atas kredit REDD+ yurisdiksional telah dilakukan berdasarkan Dana Karbon untuk Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan/Forest Carbon Partnership Facility's Carbon Fund (FCPF CF).

lanskap; ketidakpastian mengenai kemauan politik yang sedang berlangsung; dan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang terbatas.<sup>xiii</sup>

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan di atas, keberhasilan pemberian kredit skala yurisdiksional bergantung pada pembentukan kerangka kebijakan, pemantauan dan penegakan yang kuat; partisipasi penuh dan efektif dari pelaku lokal (termasuk IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani) di dalam proses administrasi dan legal formal; serta pembagian manfaat yang adil, terutama yang terkait dengan pemegang hak seperti IP. Alhasil, transisi ke pemberian kredit skala yurisdiksional harus disertai dengan verifikasi kepatuhan pada standar integritas prosedural berkualitas tinggi. Pemerintah mesti menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif ini dengan memastikan bahwa IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani serta organisasi mereka memiliki kapasitas dan dukungan teknis yang diperlukan untuk terlibat dalam pengembangan dan implementasi program REDD+.

Seperti halnya pemberian kredit berbasis proyek, pemberian kredit skala yurisdiksional harus dirancang oleh pengambil kebijakan dan penyusun program untuk menghindari masalah-masalah yang terkait dengan pemberian kredit karbon, seperti melambungnya acuan dasar, kebocoran dan non-permanensi. Masalah-masalah semacam itu harus dikurangi di semua kondisi melalui penggunaan yang transparan atas metodologi yang sah secara ilmiah berikut pemantauan, pelaporan dan verifikasi yang transparan. Seperti halnya semua pendekatan tingkat lanskap dalam mengurangi dan menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, program pemberian kredit skala yurisdiksional harus dirancang sebegitu rupa agar tanggap dan adaptif terhadap faktor-faktor deforestasi yang dinamis.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan di atas, puluhan negara dan yurisdiksi subnasional sudah melewati berbagai tahap pengembangan program untuk menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi secara luas dan menyuplai kredit karbon hutan tropis. Perusahaan dapat secara efektif memberikan insentif kepada pemerintah agar mempercepat tindakan-tindakan di atas dengan mengirim sinyal permintaan akan saluran kredit skala yurisdiksional yang berkualitas tinggi.

## Kelangsungan Aktivitas Skala Proyek

Kredit karbon hutan tropis skala proyek yang disertifikasi untuk memenuhi berbagai standar akreditasi telah tersedia selama hampir dua dekade. Kredit yang saat ini tersedia di pasar karbon sukarela nyaris dihasilkan secara eksklusif oleh kegiatan skala proyek untuk melestarikan dan merestorasi hutan serta menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi. Banyak kegiatan skala proyek telah memberikan hasil penting untuk iklim, keanekaragaman hayati dan komunitas lokal. Proyek terbaik juga telah berkontribusi pada tampilnya REDD+ sebagai mekanisme pembiayaan yang dapat diskalakan untuk pelestarian hutan dan mata pencaharian lokal serta telah mematangkan pengembangan sistem REDD+ nasional.<sup>xiiii</sup> Aktivitas skala proyek akan terus mendukung banyak inisiatif yang berbasis luas untuk melestarikan dan merestorasi hutan, khususnya jika itu menyoar kawasan yang sangat bernilai atau rentan, berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan lokal dan memastikan mereka mendapatkan informasi lengkap dan kapasitas teknis yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif, dan menarik investasi swasta

Banyak pemerintah telah menunjukkan niat dan kapasitas dalam hal pemberian kredit skala yurisdiksional, sedangkan pemerintah negara-negara hutan tropis lainnya untuk waktu yang sudah cukup lama cenderung tidak mendukung dan/atau tidak mengimplementasikan secara efektif pemberian kredit skala yurisdiksional yang adil. Dalam kasus semacam itu, pembelian selektif jangka pendek atas kredit skala proyek yang berkualitas tinggi oleh perusahaan, yang selaras dengan kriteria dan rekomendasi TFCI untuk uji tuntas, dapat memberikan dukungan sementara untuk kebutuhan dan peluang pelestarian hutan yang genting hingga pemberian kredit skala yurisdiksional tersedia.

*Lihat Panduan Implementasi [Langkah 2](#) untuk rekomendasi pembelian kredit yang berasal dari berbagai kawasan pada tahap tertentu pengembangan pemberian kredit yurisdiksional.*

## LAMPIRAN KE LANGKAH 1:

**Kredit Hutan Tinggi, Deforestasi Rendah (HFLD)**

Menurut salah satu definisi yang digunakan secara luas,<sup>45</sup> Yurisdiksi HFLD memiliki minimal 50 persen bentangan hutan dan mengalami deforestasi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada rata-rata global. Status HFLD tidak boleh diterima begitu saja sebagai klasifikasi lahan permanen, melainkan harus diakui bahwa status ini dicapai melalui upaya aktif dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko deforestasi. Yurisdiksi HFLD memiliki bentangan hutan tropis utuh dan luas yang masih tersisa di dunia, yang harus dilindungi untuk menjaga stabilitas sistem iklim global. Sementara semua hutan tropis memberikan manfaat di samping untuk penyimpanan dan pengikatan karbon, hutan di yurisdiksi HFLD memiliki nilai yang sangat berharga karena areanya yang luas dan tingkat integritas ekologisnya yang tinggi.

Meskipun pendanaan untuk melindungi hutan-hutan ini merupakan kebutuhan yang mendesak, pendekatan standar untuk pemberian kredit emisi dan penghapusan berbasis hutan di negara-negara yang telah mengalami deforestasi dan degradasi signifikan tidaklah cocok untuk yurisdiksi HFLD. Alasan tepatnya adalah karena yurisdiksi tersebut telah berhasil mencegah kepunahan hutan, sehingga mungkin sulit atau mustahil bagi mereka untuk mengurangi emisi lebih lanjut terhadap acuan dasar historis guna menghasilkan kredit, yang mengakibatkan terbatasnya insentif untuk menjaga stok dan penyerap karbon hutan.

**Perusahaan harus mempertimbangkan alasan-alasan berikut untuk memasukkan kredit HFLD ke dalam portofolio mereka:**

- **Asumsi ancaman yang wajar:** Deforestasi memang terjadi di yurisdiksi HFLD, dan hutan di yurisdiksi HFLD sedang terancam. Nyatanya, enam negara kehilangan status HFLD<sup>46, xlv</sup> selama satu dekade terakhir (2010-2019). Deforestasi diperkirakan akan meningkat di

seluruh kawasan tropis dengan tidak adanya insentif ekonomi untuk pelestarian hutan bahkan di kawasan tempat deforestasi rendah secara historis: kawasan HFLD.<sup>xlv</sup> Hutan yang masih utuh terancam oleh kekuatan yang sama yang meningkatkan laju deforestasi di seluruh dunia dengan semakin meluasnya perambahan dan kegiatan pertanian, infrastruktur dan kegiatan ekstraktif ke kawasan yang sebelumnya terpencil.

- **Intervensi aktif dan berkelanjutan:** Untuk menghindari deforestasi dan melestarikan stok karbon hutan di yurisdiksi HFLD, diperlukan intervensi aktif dan berkelanjutan. Yurisdiksi HFLD melaksanakan kegiatan REDD+ yang sama seperti yurisdiksi non-HFLD (misalnya, menjalankan rencana manajemen hutan, menetapkan kawasan lindung, mengembangkan peraturan dan kebijakan REDD+, dll.). Sementara tindakan tersebut umumnya dianggap sebagai tambahan ketika dipraktikkan oleh yurisdiksi non-HFLD guna menurunkan tingkat deforestasi mereka, tindakan itu mungkin ditafsirkan secara salah sebagai non-tambahan saat dipraktikkan oleh yurisdiksi HFLD guna mempertahankan tingkat deforestasi mereka yang rendah.
- **Keadilan:** Banyak tanah Adat yang masuk ke dalam penetapan HFLD karena tanah tersebut sering kali memiliki hutan yang sebagian besarnya masih utuh dan memiliki bentangan hutan yang lebih tinggi daripada yurisdiksi yang berbatasan dengannya berkat upaya yang gigih dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk mengatasi faktor penyebab deforestasi dan melestarikan hutan mereka. Memberi kredit kepada yurisdiksi HFLD akan menyediakan akses ke pembiayaan bagi IP dan LC yang sebagian besar lahannya tetap utuh dan berada dalam kondisi ekologis yang baik.

45 Diusulkan oleh da Fonseca GAB, dkk. (2007). No Forest Left Behind. *PLoS Biol* 5(8): e216. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050216>. Pendekatan ini menggunakan laju deforestasi rata-rata historis sepuluh tahun. Deklarasi Bersama Krutu Paramaribo 2019 tentang Mobilisasi Pendanaan Iklim HFLD menggunakan definisi HFLD yang sama berdasarkan pendekatan da Fonseca. Laju deforestasi 0,22 persen yang mereka cantumkan adalah laju rata-rata historis sepuluh tahun ketika deklarasi ini ditulis ([https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201903220903---Krutu%20of%20Paramaribo\\_13-02-19.pdf](https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201903220903---Krutu%20of%20Paramaribo_13-02-19.pdf)).

46 Enam negara kehilangan status HFLD selama satu dekade sebelumnya (2010-2019): Kamboja, Kolombia, Laos, Samoa, Sao Tome dan Principe, Zambia. Status HFLD hilang karena bentangan hutan yang lebih rendah daripada ambang batas 50 persen atau karena laju deforestasi yang lebih tinggi daripada rata-rata global, yang menggunakan pendekatan da Fonseca dkk (2007), dengan laju deforestasi global rata-rata yang diperbarui sebesar 0,263 persen berdasarkan data FAOSTAT untuk periode 2009-2019, yang disajikan dalam World Bank Group (2021).

- **Kebocoran internasional dan insentif yang merugikan:** Pemberian kredit HFLD berfungsi untuk menopang keefektifan kredit pengurangan emisi dengan mengurangi potensi kebocoran internasional dan memberikan insentif untuk melanjutkan kegiatan yang mengurangi risiko terhadap hutan. Studi menunjukkan bahwa penciptaan insentif, seperti melalui pembelian kredit karbon, untuk mempertahankan stok karbon di yurisdiksi HFLD dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi risiko kebocoran.<sup>xvii</sup> Pendekatan semacam itu memastikan bahwa yurisdiksi dengan deforestasi yang rendah dan upaya berkelanjutan pengurangan emisi yang sukses (misalnya, wilayah Adat) akan mendapatkan kompensasi. Pembiayaan karbon yang hanya memberikan penghargaan kepada yurisdiksi dengan laju deforestasi acuan dasar historis yang tinggi akan menciptakan insentif yang merugikan bagi mereka untuk deforestasi sekarang, sehingga mereka dapat mengakses pembiayaan di waktu mendatang. Kredit HFLD dapat mengatasi insentif yang merugikan ini dengan menyediakan mekanisme pembiayaan agar hutan tetap ada.
- **Dukungan IP dan LC:** Masyarakat Adat dan komunitas lokal merupakan penjaga utama untuk sebagian besar karbon hutan tropis dunia yang tersisa, di mana mereka telah mengelola lahan mereka secara efektif dan berkelanjutan selama beberapa generasi.<sup>xviii</sup> Dukungan keuangan untuk pengembangan kemitraan yang kuat dan pembagian keuntungan yang adil bagi IP dan LC di yurisdiksi HFLD dapat mengangkat perekonomian masyarakat Adat dan memperkuat sistem pengetahuan dan manajemen tradisional yang akan berkontribusi pada pelestarian hutan.
- **Layanan ekosistem di luar karbon:** Pelestarian hutan dapat meningkatkan stabilitas iklim melalui cara-cara selain dari penyimpanan karbon, dengan menghasilkan curah hujan pada skala benua dan memoderasi suhu ekstrem setempat, yang berdampak positif pada hasil

pertanian dan kesehatan.<sup>xlviii</sup> Di samping itu, kepadatan karbon sangat berkorelasi dengan keanekaragaman hayati di ekosistem alam,<sup>xlix</sup> dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati sangatlah penting untuk menjaga fungsi ekosistem yang menopang sistem pangan global serta kesehatan manusia. Lebih lanjut, pelestarian hutan yang masih ada dan utuh dalam skala besar dapat memberikan banyak layanan ekosistem lainnya, seperti menyimpan dan mengatur aliran air serta memberikan perlindungan dari banjir dan kekeringan.<sup>l</sup>

**Berikut ini adalah kriteria kelayakan dasar untuk kredit HFLD, di samping semua kriteria kualitas TFCI lainnya.** Semuanya saat ini dipenuhi oleh metodologi pemberian kredit HFLD ART TREES dan FCPF CF, di mana keduanya juga membutuhkan diskon yang sama seperti pemberian kredit non-HFLD untuk kebocoran, ketidakpastian dan pembalikan seiring dengan rencana implementasi REDD+:

- Kredit dikeluarkan oleh program yurisdiksional. (Pemberian kredit HFLD berbasis proyek saat ini tidak memenuhi syarat akibat risiko integritas lingkungan, termasuk kurangnya penambahan dan/atau kebocoran.)
- Besarnya persentase yurisdiksi yang berada di bawah bentangan hutan sebagaimana yang ditentukan secara kredibel oleh standar/program pemberian kredit (misalnya, lebih dari 50 persen dari area potensial yang dapat ditutupi oleh hutan).
- Laju deforestasi di yurisdiksi jatuh di bawah ambang batas kredibel yang ditetapkan oleh standar/program pemberian kredit (yaitu, di bawah rata-rata global) selama periode pemberian kredit yang spesifik untuk klasifikasi HFLD.

## LAMPIRAN KE LANGKAH 2:

## Memilih Kredit untuk Dibeli

Berikut ini adalah Panduan Implementasi terperinci untuk [Langkah 2](#), memilih kredit untuk dibeli. TFCI telah mengidentifikasi definisi, kriteria relevan dan panduan pembelian untuk masing-masing dari kategori kredit berikut, yang diurutkan berdasarkan preferensi. Bagian kedua dari lampiran ini, “Penilaian Standar terhadap Kriteria TFCI untuk Kredit yang Sepenuhnya Diwadahi,” menjelaskan skenario pemberian wadah dalam standar ART TREES dan Verra JNR (Tabel 2) yang diidentifikasi pada tingkat di bawah ini dan menilai skenario tersebut berdasarkan kriteria TFCI (Tabel 3).

### Tingkat: Kredit yang berasal dari program yurisdiksional yang beroperasi penuh atau proyek yang sepenuhnya diwadahi di dalamnya.

**Definisi:** Kredit yurisdiksional atau yang sepenuhnya diwadahi yang berasal dari program REDD+ yurisdiksional berkualitas tinggi yang saat ini beroperasi, atau akan beroperasi dalam waktu dekat (satu sampai dua tahun).

**Kriteria ICTI:** Program REDD+ yurisdiksional yang beroperasi dan berkualitas tinggi harus memenuhi kriteria berikut:

- Konsisten dengan dan berkontribusi pada strategi dan prioritas REDD+ nasional.
- Pengurangan dan penghapusan emisi skala proyek yang konsisten dengan strategi program yurisdiksional diperhitungkan dalam akuntansi dan pelaporan yurisdiksional.<sup>47</sup>

- Diverifikasi dan divalidasi secara independen dan berkala untuk kepatuhan pada standar yang diakui secara internasional, termasuk sistem pemantauan dan pelaporan serta kepatuhan pada pengamanan.<sup>48</sup>

#### Proyek yang sepenuhnya diwadahi harus (a) memenuhi tiga kriteria berikut ini untuk skenario pemberian wadah (b) dan diwadahi dalam program yang memenuhi tiga kriteria di atas:

- Yurisdiksi telah mencapai kesepakatan dengan proyek mengenai pendekatan dalam pemberian wadah, misalnya, otorisasi oleh yurisdiksi untuk berpartisipasi dalam program GHG lainnya.
- Acuan dasar diukur pada skala yurisdiksional dalam konteks tingkat pemberian kredit yang diverifikasi secara independen.
- Manfaat dari pemberian kredit atau kredit itu sendiri dialokasikan kepada pemangku kepentingan dan pemegang hak secara adil dan transparan.<sup>49</sup>

**Panduan Pembelian:** Membeli yang tersedia, dan mengadakan perjanjian pembelian di awal dan pendanaan di awal<sup>50</sup> untuk kredit pengurangan emisi skala yurisdiksional berkualitas tinggi<sup>51</sup> (kredit program yurisdiksional atau kredit proyek yang sepenuhnya diwadahi) dan HFLD<sup>52</sup> yang memenuhi kriteria TFCI untuk program yurisdiksional dan/atau skenario pemberian wadah berkualitas tinggi:

47 Kami juga menyarankan agar semua hasil proyek, termasuk pengurangan dan penghapusan emisi, diperhitungkan dalam akuntansi dan pelaporan yurisdiksional.

48 Interval ditentukan oleh standar yang relevan. Misalnya, Verra JNR v. 4.0 mensyaratkan bahwa verifikasi harus dilakukan minimal sekali per masa berlaku Forest Reference Emission Level (FREL). ART TREES mensyaratkan verifikasi setelah tahun pertama, ketiga dan kelima dari periode pemberian kredit. Bagi FCPF CF, ini akan berlangsung minimal dua kali dalam jangka waktu 2020-2025.

49 Kemungkinan pendekatan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pendekatan yang didasarkan pada kinerja yang berkaitan dengan acuan dasar yang dialokasikan secara yurisdiksional. Skenario yang ditandai dengan “X” membutuhkan pembagian manfaat yang adil dan transparan tetapi pada berbagai tahapan yang berbeda dalam operasionalisasi program yurisdiksional.

50 Perjanjian harus menyampaikan ketentuan ambang batas untuk program yurisdiksional berkualitas tinggi. Lihat tonggak pencapaian kemajuan indikator terhadap operasionalisasi program REDD+ yurisdiksional berkualitas tinggi di bawah ini.

51 Sesuai Langkah 1, hal berikut berlaku untuk semua tingkatan: Kredit pengurangan harus diprioritaskan dalam waktu dekat. Menjelang tahun 2040, perusahaan harus mulai mengadakan perjanjian pembelian di awal dan perjanjian pembiayaan di awal untuk kredit penghapusan karena kredit penghapusan pada akhirnya akan diperlukan untuk menyeimbangkan emisi residu. Ketika deforestasi dan degradasi hutan telah berkurang secara dramatis di suatu area dan investasi dalam kredit pengurangan tidak lagi krusial, sumber daya dapat dialihkan untuk memasukkan proyek penghapusan.

52 Sampai tulisan ini dibuat, ART TREES dan FCPF CF memberi kredit kawasan HFLD, dan hanya dalam konteks program yurisdiksional.



**Program REDD+ yurisdiksional berkualitas tinggi operasional harus disertifikasi untuk salah satu dari berikut ini:**

- Skenario ART TREES 1-5
- Skenario Verra JNR 2a, 3
- FCPF CF

**Proyek yang sepenuhnya diwadahi harus disertifikasi dengan standar yang diakui secara internasional dan sepenuhnya diwadahi sesuai dengan salah satu dari berikut ini:**

- Skenario ART TREES 1 atau 2 (di mana yurisdiksi berpartisipasi dalam ART dan mengizinkan proyek yang menerapkan acuan dasar yang diwadahi dalam tingkat pemberian kredit TREES; proyek juga harus disaring untuk kepatuhan pada kriteria kualitas TFCI (lihat [Rekomendasi II](#) dan Panduan Implementasi, [Langkah 3](#)).
- Skenario VERRA JNR 2a, 3
- FCPF CF<sup>53</sup>

**Tingkat 2: Kredit yang berasal dari proyek yang siap untuk pemberian wadah di yurisdiksi yang membuat kemajuan yang solid terhadap program yurisdiksional yang sepenuhnya operasional.**

**Definisi:** Kredit diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan standar internasional yang diakui di yurisdiksi tempat program REDD+ yurisdiksional berjalan dengan baik dan diharapkan dapat beroperasi dengan kredit yurisdiksional berkualitas tinggi dan/atau kredit yang sepenuhnya diwadahi yang tersedia dalam jangka menengah (dalam waktu lima tahun).<sup>54</sup>

**Kriteria TFCI: Indikator kemajuan yurisdiksional:** Perusahaan dapat menggunakan contoh indikator berikut untuk menilai apakah yurisdiksi telah membuat kemajuan terhadap operasionalisasi program REDD+ berkualitas

tinggi. Perusahaan harus bertanya langsung kepada administrator atau perantara program yurisdiksional mengenai kemajuan pada bidang-bidang berikut ini:

- Yurisdiksi memiliki sedikitnya tingkat emisi referensi hutan, sistem pemantauan hutan dan rencana pembagian manfaat awal; kredit skala proyek yang sedang ditawarkan berdasarkan standar yang sudah terkenal dan diakui secara internasional.
- Yurisdiksi sedang mengembangkan suatu daftar (atau berintegrasi dengan daftar nasional).
- Kemauan politik untuk program REDD+ ditunjukkan melalui perundang-undangan, kebijakan, perjanjian donor, dll.
- Program memenuhi persyaratan perlindungan dan/atau mengikuti praktik terbaik.
- Yurisdiksi sedang mengembangkan mekanisme/modalitas keuangan untuk mengelola pendanaan kredit karbon.
- Yurisdiksi menunjuk otoritas untuk mengimplementasikan REDD+.
- Yurisdiksi sedang mengembangkan kapasitas dalam aspek hukum dan komersial untuk keterlibatan dalam pasar karbon sukarela, termasuk menawarkan nasihat hukum tentang transaksi, mengevaluasi peluang dan melakukan negosiasi dengan pembeli dan investor.
- Yurisdiksi mengembangkan pengaturan kontrak dengan pemangku kepentingan untuk intervensi/program dan kegiatan proyek.
- Yurisdiksi sedang melakukan perancangan untuk pendekatan pemberian wadah, melalui pendekatan partisipatif dengan IP dan LC serta pemangku kepentingan lainnya.

**Proyek yang siap untuk pemberian wadah harus memenuhi kriteria berikut:** Perusahaan harus bertanya langsung kepada pengembang proyek dan/atau pemasok kredit mengenai kemajuan proyek terhadap mereka:

<sup>53</sup> Pada akhir Tahap 2 dari proses TFCI pada Januari 2023, tidak ada standar lain yang memenuhi syarat. Peserta pasar mendatang harus dinilai secara independen untuk keselarasan menyeluruh dengan kriteria TFCI.

<sup>54</sup> Dalam hal ini, kredit mesti disertifikasi sesuai dengan standar yang diakui secara internasional untuk proyek dan di samping itu juga dengan standar pemberian wadah spesifik setelah program yurisdiksional beroperasi.

- Pengembang proyek memiliki keterlibatan berulang dengan titik fokus pemerintah dan masyarakat sipil guna mewujudkan keselarasan dengan program yurisdiksional seiring perkembangannya, seperti:
  - Penyelarasan dengan strategi yurisdiksional untuk mengatasi faktor penyebab deforestasi dan degradasi (misalnya, strategi REDD+ nasional atau rencana pengembangan rendah emisi).
  - Partisipasi dalam kelompok kerja teknis, forum dan konsultasi REDD+ (karena pemerintah menciptakan peluang bagi pengembang proyek untuk berkomunikasi dan berkontribusi).
- Proyek telah mengadopsi acuan dasar yang disertifikasi secara independen dan dialokasikan secara yurisdiksional, ketika acuan dasar tersebut eksis. Pengembang proyek secara aktif mendorong gerakan ke arah penyertaan proyek ke dalam acuan dasar yurisdiksional.
- Proyek secara formal atau preferensial telah berkomitmen secara hukum untuk memperbarui dan menyelaraskan acuan dasar proyek secara tepat waktu begitu acuan dasar yurisdiksional standar yang berlaku telah dikembangkan untuk kegiatan yang disertakan (misalnya, deforestasi dan degradasi yang tidak direncanakan yang telah dihindari), dan ketika sudah diperoleh persetujuan atas metodologi relevan yang berlaku.
- Proyek mematuhi peraturan lain yang ditetapkan di tingkat yurisdiksional, termasuk sistem pengamanan REDD+.
- Pengembang proyek telah menunjukkan dukungan untuk pengembangan sistem REDD+ yurisdiksional yang setara dengan ukuran/sumber daya proyek. Ini mungkin meliputi pernyataan publik yang mendukung pemberian kredit skala yurisdiksional, berbagi informasi, nota kesepahaman (MOU) yang menunjukkan rencana

untuk bekerja sama dengan yurisdiksi, dukungan teknis bagi titik fokus pemerintah seperti pengembangan kapasitas dan pelatihan, serta kontribusi hibah.

#### Panduan Pembelian:

- Membeli kredit pengurangan emisi skala proyek [yang siap untuk pemberian wadah](#) yang diverifikasi dan divalidasi untuk kepatuhan pada standar berbasis proyek yang diakui secara internasional. Kredit harus disaring untuk kepatuhan pada semua kriteria kualitas TFCI dalam [Rekomendasi II](#); lihat Panduan Implementasi [Langkah 3](#) untuk uji tuntas yang direkomendasikan.
- Proyek harus mematuhi skenario pemberian wadah standar yang diakui secara internasional yang memenuhi kriteria TFCI untuk proyek yang sepenuhnya diwadahi: ART TREES 1 atau 2; VERRA JNR 2a atau 3; FCPF CF.

Jika sebuah proyek sudah ada dan berada dalam ruang lingkup program yurisdiksional, dengan metodologi sesuai yang ada, proyek tersebut dapat menunjukkan kemajuan yang tepat waktu (dalam dua hingga tiga tahun) untuk menjadi terwadahi sepenuhnya sesuai dengan salah satu standar dan skenario yang diidentifikasi di atas.

Jika proyeknya baru, proyek itu harus berada dalam area program yurisdiksional dan dalam lingkup program yurisdiksional, acuan dasarnya harus diwadahi dalam tingkat referensi, dan proyek itu harus diselaraskan dengan strategi dan prioritas program yurisdiksional. Selain itu, pengembang proyek harus membuat komitmen publik untuk pemberian wadah sesuai dengan salah satu standar dan skenario yang diidentifikasi sebelumnya.

### **Tingkat 3: Kredit yang berasal dari proyek yang diwadahi dalam program yurisdiksional yang tidak bermaksud untuk mengeluarkan kredit.**

**Definisi:** Kredit yang berasal dari proyek yang diwadahi dalam program yurisdiksional yang memenuhi ketentuan Kerangka Kerja Warsawa, di mana baik proyek maupun program yurisdiksi diverifikasi dan divalidasi terhadap standar yang diakui secara internasional, tetapi yurisdiksi memutuskan untuk tidak mengeluarkan kredit

**Kriteria TFCI:** **Proyek yang diwadahi harus memenuhi kriteria berikut:** Perusahaan harus bertanya langsung kepada pengembang proyek dan/atau pemasok kredit mengenai kemajuan proyek terhadap kriteria berikut ini:

- Telah mencapai kesepakatan dengan yurisdiksi mengenai pendekatan pemberian wadah.
- Terbukti siap untuk pemberian wadah (lihat kriteria pada Tingkat 2 di atas).
- Telah mencapai keselarasan dengan tingkat emisi referensi hutan/ forest reference emission levels (FREL) yurisdiksional.

**Panduan Pembelian:** Membeli kredit yang berasal dari proyek pengurangan berkualitas tinggi yang memenuhi [kriteria siap untuk pemberian wadah](#):

- Program yurisdiksional harus disertifikasi untuk Skenario 2b Verra JNR (di mana program yurisdiksional yang diverifikasi dan divalidasi beroperasi tetapi tidak mengeluarkan kredit).
- Proyek harus sesuai dengan Skenario 2b Verra JNR serta disertifikasi untuk standar berbasis proyek yang diakui secara internasional. Kredit harus disaring untuk kepatuhan pada semua kriteria kualitas TFCI dalam [Rekomendasi II](#) (lihat [Langkah 3](#) untuk uji tuntas yang direkomendasikan).

## Penilaian Standar terhadap Kriteria TFCI untuk Kredit yang Sepenuhnya Diwadahi

Tabel 2 memberikan ikhtisar tentang pendekatan pemberian wadah dalam standar REDD+ yurisdiksional yang ada.

Tabel 3 mencakup enam kriteria TFCI untuk kredit yurisdiksional dan yang sepenuhnya diwadahi serta penilaian skenario dalam standar yang ada terhadap kriteria tersebut. Perlu dicatat bahwa sehubungan dengan skenario pemberian wadah ART TREES, proyek memutuskan untuk pendekatan pemberian wadah. Proyek yang berbeda dapat memilih untuk mengikuti skenario berbeda (misalnya, 2 atau 3) dalam program yurisdiksional TREES yang sama. Sehubungan dengan Verra JNR, yurisdiksi tertinggi memiliki otoritas pengambilan keputusan mengenai skenario yang mesti

### Tabel 2. Pendekatan Pemberian Wadah dalam Standar REDD+ Yurisdiksional

Standar	Pendekatan terhadap Pemberian Wadah
Architecture for REDD+ Transactions' The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART TREES)	Lima skenario pemberian wadah dijelaskan dalam <a href="#">Pemberian Wadah berdasarkan ART TREE</a> . <sup>ii</sup>
Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Dana Karbon) (FCPF CF)	<p>FCPF CF tidak secara tegas mengizinkan atau melarang pemberian wadah. Berdasarkan FCPF CF, pemberian wadah adalah hak prerogatif negara-negara REDD+ dan dianggap sebagai bagian dari rancangan pengaturan pembagian manfaat, atau Skema Pembagian Manfaat/Benefit Sharing Plan (BSP).</p> <p>Dalam hal proyek REDD+ diwadahi (atau terintegrasi dalam BSP, tidak diizinkan untuk mengeluarkan kredit), Bank Dunia mewajibkan (ketentuan umum Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi) negara-negara REDD+ untuk menandatangani sub-perjanjian dengan pemrakarsa proyek REDD+, di mana proyek-proyek REDD+ setuju untuk mematuhi implementasi pengamanan, implementasi BSP, dll. Jika perjanjian tidak tercapai, kredit yang dikeluarkan oleh proyek yang tumpang-tindih dalam hal lingkup spasial, temporal dan akuntansi harus didiskon sesuai dengan templat Laporan Pemantauan FCPF CF.</p>
Verra Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR)	<p>Verra <a href="#">JNR v4.0</a><sup>iii</sup> memberikan tiga skenario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">JNR 1</a>:<sup>iii</sup> Tingkat emisi referensi hutan/forest reference emission levels (FREL) yurisdiksional proyek yang diwadahi dan/atau program yurisdiksional tingkat rendah yang diwadahi</li> <li>• <a href="#">JNR 2</a>:<sup>iv</sup> Program nasional dan subnasional dengan proyek yang diwadahi dan/atau program yurisdiksional tingkat rendah yang diwadahi.</li> <li>• <a href="#">JNR 3</a>:<sup>iv</sup> Program nasional dan subnasional tanpa asal kredit untuk proyek dan program yurisdiksional tingkat rendah.</li> </ul>

**Tabel 3. Kriteria untuk Pemberian Kredit yang Sepenuhnya Diwadahi**

	TREES 1	TREES 2	TREES 3	TREES 4	TREES 5	JNR 1	JNR 2a	JNR 2b	JNR 3	FCPF <sup>55</sup>
1. Program yurisdiksional konsisten dengan dan berkontribusi terhadap strategi dan prioritas REDD+ nasional.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	(✓) <sup>56</sup>	✓	✓ <sup>57</sup>
2. Pengurangan dan penghapusan emisi skala proyek yang konsisten dengan strategi program yurisdiksional diperhitungkan dalam akuntansi dan pelaporan yurisdiksional.	✓	✓	✓	✓		(✓) <sup>58</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>59</sup>
3. Program yurisdiksional telah diverifikasi dan divalidasi secara independen dan berkala untuk kepatuhan pada standar yang diakui secara internasional, termasuk sistem pemantauan dan pelaporan serta kepatuhan pada pengamanan. <sup>60</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	(✓) <sup>61</sup>	✓	✓	✓	✓
4. Yurisdiksi telah mencapai kesepakatan dengan proyek mengenai pendekatan dalam pemberian wadah (misalnya, diotorisasi oleh yurisdiksi untuk berpartisipasi dalam program GHG lainnya).	✓	✓	✓			(✓) <sup>62</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>63</sup>
5. Acuan dasar proyek diukur pada skala yurisdiksional dalam konteks tingkat pemberian kredit yang diverifikasi secara independen.	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓ <sup>64</sup>
6. Manfaat dari pemberian kredit proyek atau kredit itu sendiri dialokasikan kepada pemangku kepentingan dan pemegang hak secara adil dan transparan.	✓	✓ <sup>65</sup>	✓ <sup>66</sup>			✓	✓	✓	✓	✓ <sup>67</sup>

55 FCPF CF tidak secara tegas mengizinkan atau melarang pemberian wadah. Berdasarkan FCPF CF, pemberian wadah adalah hak prerogatif negara-negara REDD+ dan dianggap sebagai bagian dari rancangan pengaturan pembagian manfaat, atau Skema Pembagian Manfaat/Benefit Sharing Plan (BSP). Dalam hal proyek REDD+ diwadahi (atau terintegrasi dalam BSP, tidak diizinkan untuk mengeluarkan kredit), Bank Dunia mewajibkan (ketentuan umum perjanjian pembayaran pengurangan emisi) negara-negara REDD+ untuk menandatangani sub-perjanjian dengan pemrakarsa proyek REDD+, di mana proyek-proyek REDD+ setuju untuk mematuhi implementasi pengamanan, implementasi BSP, dll. Jika perjanjian tidak tercapai, kredit yang dikeluarkan oleh proyek yang tumpang-tindih dalam hal lingkup spasial, temporal dan akuntansi harus didiskon sesuai dengan templat FCPF CF MR.

56 Berlaku hanya untuk program tingkat nasional.

57 Tabel 1, Panduan Verifikasi dan Validasi.

58 Program yurisdiksional yang berlaku hanya untuk program yurisdiksional tingkat subnasional/ yang lebih rendah. Sesuai dengan *Panduan Program JNR* (hlm.2), di bawah Skenario 1, "... Akuntansi dan pemberian kredit karbon hanya dilakukan untuk proyek yang diwadahi dan untuk program yurisdiksional tingkat yang lebih rendah karena tidak ada program yang terdaftar untuk yurisdiksi tingkat yang lebih tinggi."

59 Kriteria 23/37/38 Kerangka Metodologi untuk persyaratan akuntansi. Tidak ada penyebutan proyek secara eksplisit; jika proyek sukarela memilih untuk tidak memberikan wadah, itu harus dihapus dari area program dan proses akuntansi.

60 Interval ditentukan oleh standar yang relevan. Misalnya, Verra JNR 4.0 mensyaratkan bahwa verifikasi harus dilakukan setidaknya sekali per masa berlaku FREL. ART TREES mensyaratkan verifikasi setelah tahun pertama, ketiga dan kelima dari periode pemberian kredit. Bagi FCPF CF, ini akan berlangsung minimal dua kali dalam jangka waktu 2020-2025.

61 Program yurisdiksional yang berlaku hanya untuk program yurisdiksional tingkat subnasional/ yang lebih rendah.

62 Hanya diperlukan untuk proyek yang diwadahi dalam program yurisdiksional subnasional. Lihat: Persyaratan Pemberian Wadah JNR Skenario 1, Bagian 3.6 Kewenangan dan Hak untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, dan di Bab 4 Persetujuan, Verifikasi dan Validasi Pemerintah.

63 FCPF CF memang memenuhi persyaratan ini meskipun itu tidak diwajibkan secara eksplisit dalam Kerangka Metodologis. Ini dapat ditemukan dalam proposal negara tertentu.

64 Tabel 1, Panduan Verifikasi dan Validasi.

65 Kriteria ini dievaluasi oleh standar yang berbeda untuk proyek yang menerapkan tingkat pemberian kredit TREES.

66 Kriteria ini dievaluasi oleh standar yang berbeda dari ART TREES.

67 Kriteria 26, Kerangka Metodologis.

## LAMPIRAN KE LANGKAH 3:

## Contoh Pertanyaan Uji Tuntas

Seperti halnya pada setiap keputusan pengadaan atau pembelian, perusahaan harus melampaui ketergantungan eksklusif pada standar eksternal saat mereka mengevaluasi integritas sosial dan lingkungan atas pembelian kredit potensialnya. Penulis Panduan TFCI mendorong pembeli dan agen pihak ketiganya untuk mempertimbangkan contoh daftar pertanyaan berikut saat melakukan uji tuntas atas kredit untuk pembelian setelah mereka menyelesaikan Langkah 1 dan 2 dari Panduan Implementasi.

Contoh pertanyaan disediakan untuk masing-masing dari lima bidang utama uji tuntas yang diidentifikasi dalam Panduan TFCI ini, dan dimaksudkan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh perusahaan mengenai sejauh mana program atau proyek mematuhi panduan TFCI tentang integritas sosial dan lingkungan. Banyak dari risiko yang terkait dengan acuan dasar yang digelembungkan, nonpermanensi dan integritas sosial yang dapat dimitigasi secara signifikan melalui peningkatan skala, seperti yang dijelaskan dalam [Lampiran Rekomendasi IV](#) (Jalur Menuju Pemberian Kredit Karbon Hutan Skala Yurisdiksional).

Informasi tambahan di [Rekomendasi II](#), [Lampiran Langkah 2](#), dan [Langkah 3](#) mungkin berguna dalam menafsirkan informasi yang ditemukan. Penyelesaian pertanyaan-pertanyaan ini sering kali memerlukan pengumpulan informasi di luar yang biasanya ditemukan di dalam dokumentasi program atau proyek. Jika perusahaan tidak mengetahui cara menafsirkan jawaban untuk pertanyaan tertentu, mereka harus meminta saran ahli untuk lebih memahami kompleksitas jawaban. Jawaban mengenai IP dan LC harus divalidasi sendiri oleh organisasi IP dan LC jika memungkinkan.

Selain itu, perusahaan harus menyadari bahwa pemilik kredit mungkin juga meminta informasi saat mereka menyaring calon pembeli. Topik-topiknya mungkin mencakup informasi tentang jejak GHG perusahaan, kemajuan terhadap target SBTi-nya (atau yang setara), klaim yang terkait dengan pembelian kredit, apakah kredit akan dihentikan atau disimpan untuk perdagangan di masa mendatang, rencana penggunaan kredit terhadap NDC suatu negara dan informasi lainnya.

## Integritas Sosial

### Bidang uji tuntas

**Keterlibatan penuh dan efektif dengan Masyarakat Adat, komunitas lokal, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya sebagai mitra aktif**



### Contoh pertanyaan

- Di negara-negara di mana akses tersebut diperbolehkan, sejauh mana program/proyek yurisdiksional memungkinkan pemegang hak hutan (khususnya IP dan LC) untuk secara langsung mengakses pasar karbon (misalnya, untuk langsung menerima kredit yang dihasilkan di wilayah mereka dan memperdagangkannya secara langsung di pasar karbon)?
- Sejauh mana program/proyek yurisdiksional telah dikembangkan dan diimplementasikan yang sejalan dengan standar transparansi tertinggi serta partisipasi penuh dan efektif dari Masyarakat Adat dan LC dalam pemberian kredit di wilayah mereka? Indikator termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
  - dukungan publik terhadap program/proyek dari perwakilan sah IP dan LC;
  - akses yang adil terhadap informasi, mis., dalam bahasa lokal dengan cara yang dapat diakses secara teknis dan sesuai secara budaya;
  - penyediaan layanan peningkatan kapasitas - termasuk layanan saran hukum, komersial, keuangan dan teknis - untuk memungkinkan partisipasi tanpa pandang bulu;

## Bidang uji tuntas

## Contoh pertanyaan

"Keterlibatan penuh dan efektif dengan Masyarakat Adat..." sambung



- partisipasi IP dan LC dalam manajemen program/proyek, serta perancangan dan implementasi kegiatan intervensi;
- memprioritaskan IP dan LC dalam kepegawaian;
- memasukkan mekanisme manajemen risiko sosial-lingkungan dengan indikator terukur dalam program/proyek.

- Apakah wilayah IPLC dimasukkan ke dalam Tingkat Referensi Emisi Hutan/Forest Reference Emissions Level (FREL) secara adil dan merata? Apakah organisasi IP dan LC dikonsultasikan sebagai mitra dan diberikan informasi sebelumnya tentang implikasi FREL? Apakah FREL mengizinkan kontribusi berkelanjutan dari wilayah IPLC yang akan diakui dan didukung selama periode pemberian kredit?
- Apakah program/proyek memiliki mekanisme pengaduan yang mapan? Apakah ada aduan atau keluhan formal yang diajukan dengan standar yang relevan terkait program/proyek ini? Jika ada, apakah ada informasi tentang penyelesaian aduan/keluhan dan/atau kekhawatiran yang diungkapkan dari pemangku kepentingan yang terlibat tentang proses/hasil?

Pengaturan pembagian manfaat yang adil dan transparan



- Apakah program/proyek mengalokasikan kredit secara langsung kepada pemangku kepentingan?
- Jika tidak, apa rencana pembagian manfaat yang telah dikembangkan?
- Apakah rencana pembagian manfaat itu dibuat secara partisipatif? Misalnya, sejauh mana IP dan LC dilibatkan secara penuh dan efektif sebagai mitra dalam perancangan dan pemantauan rencana pembagian manfaat?
- Bagaimana manfaat finansial dan sumber daya dari penjualan kredit yang didistribusikan ke seluruh pemangku kepentingan dan pemegang hak? Identifikasi persentase hasil yang telah dialokasikan ke IP dan LC.
- Bagaimana distribusi ini ditentukan? Apakah melalui proses yang transparan dan adil? Apa bukti yang dapat diberikan untuk menunjukkan distribusi manfaat yang konsisten dengan rencana tersebut?
- Apakah ada kejelasan tentang siapa yang akan mengelola dana yang diperoleh dari setiap penjualan kredit karbon yang dihasilkan di wilayah IP dan LC? Jika dana tidak didistribusikan langsung ke IP dan LC, melainkan melalui perantara, apakah peran dan biaya terkait untuk layanan perantara sudah transparan dan disetujui oleh semua pihak sebelumnya? Apakah semua pihak menyetujui distribusi tersebut?
- Sejauh mana program/proyek mengidentifikasi pertimbangan khusus bagi kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya dalam pengaturan pembagian manfaat?

## Integritas Lingkungan

### Bidang uji tuntas

#### Acuan dasar konservatif yang tepat



### Contoh pertanyaan

- Apakah kerangka kerja yang diterapkan untuk membuat acuan dasar dan menghitung kredit sudah cukup konservatif sehingga dapat mengelola risiko pemberian kredit berlebih dan menggunakan data terbaik yang ada?

#### Skala yurisdiksional

- Jika proyek berada di dalam batas yurisdiksi, apakah pengurangan dan penghapusan emisi skala proyek diwadahi di dalam akuntansi dan pelaporan yurisdiksional?

#### Skala proyek

- Apakah proyek telah mengadopsi acuan dasar yang disertifikasi secara independen yang dialokasikan oleh, atau secara formal diselaraskan dengan, acuan dasar yurisdiksional (jika acuan dasar yurisdiksional semacam itu ada)?
- Jika belum, apakah terlihat jelas bahwa acuan dasar proyek adalah konsisten dengan pendekatan yurisdiksi, dalam konteks tingkat pemberian kredit yurisdiksional yang diverifikasi secara independen?
- Apakah wilayah acuan yang digunakan untuk menetapkan acuan dasar proyek memperhitungkan nilai konservatif dan mempertimbangkan apakah wilayah acuan yang dipilih itu mewakili tren deforestasi tingkat lanskap geografis yang lebih luas?

#### Mengatasi risiko nonpermanensi



- Apakah risiko pembalikan yang diketahui telah didokumentasikan secara komprehensif? Apa sistem atau tindakan yang diterapkan untuk mengatasi dan secara proaktif memitigasi risiko pembalikan?
- Apakah ada justifikasi yang masuk akal terkait bagaimana sistem atau tindakan yang diusulkan cukup memadai untuk sepenuhnya mengatasi risiko yang ada dan memberikan kompensasi jika terjadi pembalikan?
- Apakah ada sistem untuk melaporkan pembalikan sudah ada dan apakah kewajiban untuk melaporkan pembalikan dapat ditegakkan secara hukum? Sejauh ini, apakah ada pembalikan yang telah dilaporkan? Jika ada, apakah itu ditangani sepenuhnya dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh standar?



## Bidang uji tuntas

## Contoh pertanyaan

### Validasi dan verifikasi yang cukup ketat dan/atau independen



- Apakah program/proyek telah mencapai validasi dan verifikasi dengan standar yang diakui secara internasional? Apakah asesor pihak ketiga diwajibkan menjadi badan validasi dan verifikasi bersertifikasi dengan proses sertifikasinya sendiri yang diakui (seperti ISO)?
- Apa penilaian yang dilakukan terkait dengan pengalaman teknis dan geografis auditor yang relevan dengan hutan tropis sebelum mengontrak auditor tersebut? Apa informasi yang dapat diberikan oleh standar tentang kinerja dan konsistensi auditor yang digunakan oleh standar ini?
- Apakah verifikasi telah memastikan kemajuan dalam mencapai tingkat kesesuaian dengan perlindungan sosial dan lingkungan berdasarkan standar relevan? Apakah standar proyek atau program mendukung pencapaian skema perlindungan Cancun untuk REDD+?
- Apakah proyek atau program mendokumentasikan upaya apa pun untuk melampaui perlindungan sosial dan lingkungan dalam standar pemberian kreditnya yang relevan? Misalnya, apakah proyek atau program telah mendapatkan sertifikasi CCB tambahan?

## Glosarium

Istilah	Definisi
<b>Acuan dasar</b>	Dalam REDD+, perubahan antropogenik yang diproyeksikan pada stok karbon hutan yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan proyek yang diusulkan atau intervensi program/kebijakan.
<b>Acuan dasar yang dialokasikan secara yurisdiksional</b>	Acuan dasar deforestasi/degradasi yang dikembangkan pada skala yurisdiksional, yang kemudian dialokasikan secara spasial untuk proyek di dalam wilayah yurisdiksional.
<b>Deforestasi</b>	Konversi lahan dari hutan menjadi nonhutan.
<b>Degradasi</b>	Perubahan antropogenik di dalam hutan yang secara negatif berdampak pada struktur atau fungsi kedudukan atau situs hutan sehingga menurunkan kapasitasnya dalam menyuplai produk dan layanan. Dalam konteks REDD+, degradasi dapat diukur dari sisi stok karbon yang berkurang di hutan yang masih tetap sebagai hutan.
<b>Dekarbonisasi</b>	Langkah-langkah yang mencegah pelepasan emisi GRK yang berkaitan dengan listrik, industri dan transportasi.
<b>Hasil mitigasi iklim</b>	<p>Pengurangan atau penghapusan gas rumah kaca secara aktual yang ditentukan dengan menghitung acuan dasar emisi di dalam batas wilayah tertentu dan lalu mengukur seberapa besar intervensi tertentu menghindarkan, mengurangi atau menghapus dan mengikat karbon dari atmosfer.</p> <p>Hasil mitigasi iklim lantas dapat dijadikan unit dan dalam beberapa kasus diurutkan sehingga dapat diperdagangkan sebagai kredit karbon atau pengganti (offset), tetapi langkah sekunder ini tidak perlu dilakukan jika hasil mitigasi tidak mesti mengubah perwalian dari satu badan hukum ke badan hukum lainnya. Dalam Persetujuan Paris dan keputusan tambahan yang dikeluarkan oleh Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), istilah “hasil mitigasi” digunakan tanpa kata “iklim” karena konteks mitigasi telah dipahami.</p>
<b>Hierarki Mitigasi</b>	Serangkaian langkah prioritas untuk membatasi dampak negatif, sebesar-besarnya, melalui penghindaran, mitigasi (atau pengurangan), restorasi dan penggantian (kompensasi). Langkah-langkah prioritas ini digunakan dalam kerangka kerja lingkungan, mulai dari manajemen limbah hingga mitigasi dampak iklim dan keanekaragaman hayati. <sup>vi</sup>

## Istilah

## Definisi

### Inisiatif Target Berbasis Sains

Suatu inisiatif yang mendorong perusahaan untuk menetapkan target berbasis sains dan memacu keunggulan kompetitif dalam melakukan transisi menuju perekonomian rendah karbon. Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) dan World Wildlife Fund for Nature (WWF) serta salah satu komitmen We Mean Business Coalition.

Inisiatif ini menetapkan dan menggalakkan praktik terbaik dalam penentuan target berbasis sains, menawarkan sumber daya dan panduan untuk mengurangi kendala dalam pengadopsian dan secara independen menilai serta menyetujui target perusahaan.

### Jangka Waktu

Tahun atau jangka waktu tertentu untuk pengurangan atau penghapusan emisi. Pengurangan atau penghapusan emisi dapat ditetapkan atau dikaitkan dengan jangka waktu tertentu.

### Kawasan hutan tinggi, deforestasi rendah (HFLD)

Negara dan yurisdiksi dengan bentangan hutan yang luas dan laju deforestasi masa lalu atau saat ini yang rendah.

### Kebocoran

Perpindahan emisi gas rumah kaca dari satu wilayah geografi ke wilayah geografi lainnya akibat kegiatan atau intervensi suatu proyek atau yurisdiksi.

### Komitmen/perjanjian/kontrak pembelian di muka

**Komitmen:** Suatu pernyataan dari perusahaan tentang niatnya untuk membeli kredit skala yurisdiksional di muka ketika tersedia, idealnya disertai komitmen terhadap nilai uang atau jumlah volume tertentu.

**Perjanjian:** Suatu pengaturan negosiasi (mengikat secara hukum ataupun tidak) di antara pihak-pihak untuk membeli kredit pada tanggal yang akan datang.

**Kontrak:** Suatu pengaturan negosiasi di antara pihak-pihak untuk membeli kredit pada tanggal yang akan datang berdasarkan harga tertentu dan ketentuan implementasi lainnya.

### Kondisi kondusif

Memperkuat kapasitas IP, LC, kaum perempuan dan komunitas kurang terlayani lainnya untuk (1) melakukan semua kegiatan dan proses yang diperlukan demi keberhasilan pelaksanaan proyek/program REDD+ sejak awal program atau proyek selaku mitra dan bukan penerima manfaat, dan (2) memastikan partisipasi penuh dan efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan dan semua aspek perancangan dan pelaksanaan pembagian keuntungan.

## Istilah

## Definisi

### Kontribusi tingkat nasional (NDC)

Suatu rencana aksi iklim nasional untuk memangkas emisi dan beradaptasi dengan dampak iklim. Setiap Pihak dalam Persetujuan Paris dituntut untuk membentuk NDC dan memperbaruinya setiap lima tahun.

### Kredit karbon

Unit emisi yang dikeluarkan oleh program pemberian kredit karbon dan merepresentasikan pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca. Kredit karbon secara unik diurutkan, dikeluarkan, dilacak dan dibatalkan melalui daftar elektronik.

### Manfaat sekunder sosial dan lingkungan

Manfaat yang timbul dari REDD+ yang melampaui manfaat mitigasi iklim, seperti meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan adaptasi dengan perubahan iklim, mengurangi kemiskinan, meningkatkan mata pencaharian lokal, meningkatkan tata kelola hutan dan melindungi hak asasi manusia.

### Masyarakat Adat (IP) dan komunitas lokal (LC)

Kelompok yang berbeda-beda secara budaya dan mengakui diri mereka seperti itu, memiliki bentuk organisasi sosialnya sendiri, hidup dan menggunakan wilayah mereka sebagai syarat bagi reproduksi budaya, sosial, agama, leluhur dan ekonomi, dengan menggunakan pengetahuan, inovasi dan praktik yang dihasilkan serta diwariskan lewat tradisi.

Contoh komunitas tersebut antara lain:<sup>68</sup>

- Komunitas tepi sungai dan nelayan air tawar tradisional
- Komunitas yang berbasis di pesisir seperti nelayan tradisional, pengumpul kepiting, dll.
- Komunitas dengan mata pencaharian berbasis hutan, seperti penyadap karet, pemecah kelapa, pengestrak palem açai, dll.
- Populasi dan komunitas tradisional keturunan Afrika.
- Petani keluarga, pemilik tanah kecil dan jenis petani lainnya.
- Komunitas lokal berbasis perkotaan (kelompok sosial) yang mata pencahariannya terkait erat dengan keanekaragaman hayati hutan tropis dan sumber daya alam.

### Mitigasi

Dalam konteks perubahan iklim, intervensi manusia untuk mengurangi sumber atau meningkatkan penyerap GHG. Contoh-contohnya meliputi penggunaan bahan bakar fosil secara lebih efisien untuk proses industri atau pembangkitan tenaga listrik, peralihan ke tenaga surya atau tenaga angin, peningkatan insulasi gedung dan perluasan hutan serta “penyerap” lainnya untuk menghapus lebih banyak emisi dari atmosfer.

68 Contoh-contoh diadaptasi dari “Definition of Indigenous Peoples and Local Communities for the Science Panel for the Amazon,” tersedia di <https://www.theamazonwewant.org/wp-content/uploads/2021/11/Definition-of-Indigenous-peoples-and-local-communities-1.pdf>.

**Istilah****Definisi**

<b>NoI bersih</b>	Keadaan netralitas emisi GHG tatkala emisi dan penghapusan GHG-nya seimbang.
<b>Nonpermanensi</b>	Potensi atau peluang statistik bahwa stok karbon yang kreditnya telah dikeluarkan akan dilepaskan kembali ke atmosfer.
<b>Partisipasi penuh dan efektif</b>	Pihak-pihak yang dilibatkan sepenuhnya dalam suatu proses (misalnya, pengambilan keputusan) dan dihargai sebagai peserta yang setara, serta kebutuhannya dipandang menyatu dengan tatanan sosial dan ekonomi.
<b>Pasar karbon sukarela (VCM)</b>	Pasar yang mencakup semua transaksi kredit karbon yang tidak dibeli dengan maksud untuk diserahkan ke pasar karbon aktif yang teregulasi, termasuk yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali atau ditarik guna memenuhi klaim netral karbon atau klaim lingkungan lainnya.
<b>Pemantauan hutan/sistem pemantauan hutan</b>	Suatu sistem nasional (atau subnasional untuk sementara waktu) yang tangguh dan transparan yang menggabungkan pengindraan jarak jauh dan pendekatan inventaris karbon hutan berbasis tanah untuk memperkirakan emisi, penghapusan dan perubahan kawasan hutan. Sistem ini berlandaskan pada sistem yang sudah ada, sebagaimana mestinya, dan memudahkan pemantauan berbagai jenis hutan yang mengikuti definisi nasional.
<b>Pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV)</b>	Serangkaian proses nasional dan/atau subnasional untuk mengautentikasi emisi GHG secara mantap. Sistem ini memudahkan penetapan pengurangan emisi GHG, emisi yang dihindari dan/atau penghapusan jika dibandingkan dengan tingkat referensi. Sistem ini juga dapat digunakan untuk memantau langkah pengamanan, tata kelola dan manfaat dari kegiatan REDD+.
<b>Pembagian manfaat yang jujur dan adil</b>	Distribusi manfaat (misalnya, pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan) kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang terkumpul dari berbagai kegiatan pelestarian hutan dan penghentian deforestasi dengan cara yang selaras dengan hak-hak masyarakat lokal dan Adat atas tanah dan sumber daya, serta dengan aturan, hukum dan standar yang berlaku.
<b>Pemberian kredit REDD+ skala yurisdiksional/ pemberian kredit skala yurisdiksional</b>	Pengeluaran kredit karbon yang diverifikasi secara independen untuk emisi berbasis hutan dan/atau penghapusan yang didasarkan pada acuan dasar yang dikembangkan pada skala area akuntansi yang ditentukan oleh negara atau satuan politik/administratif subnasional besar.

## Istilah

## Definisi

<p><b>Pembiayaan di muka</b></p>	<p>Pendanaan yang diterima untuk membangun proyek atau program dan melakukan kegiatan pengurangan atau penghapusan emisi awal, sebelum pengeluaran kredit karbon. Ini dapat meliputi kontrak untuk pembelian kredit pada tanggal yang akan datang berdasarkan harga yang ditentukan dan ketentuan lainnya.</p>
<p><b>Penambahan</b> (dalam konteks REDD+ Yurisdiksional)</p>	<p>Suatu prinsip yang memastikan bahwa kegiatan yang diimplementasikan lebih berhasil dalam mengurangi emisi atau meningkatkan pengikatan dibandingkan jika tidak ada intervensi.</p>
<p><b>Penghapusan emisi</b></p>	<p>Penarikan gas rumah kaca dari atmosfer berkat kegiatan manusia yang disengaja (misalnya, antropogenik). Penghapusan ini meliputi peningkatan penyerap biologis karbon dioksida dan penggunaan teknik kimia untuk merealisasikan penghapusan dan penyimpanan jangka panjang.</p>
<p><b>Pengikatan karbon</b></p>	<p>Setiap proses yang menghilangkan karbon dari atmosfer dan menyimpannya dalam bentuk yang dapat menetap di luar kolom atmosfer untuk beberapa saat. Sinonim dengan “penghapusan emisi.”</p>
<p><b>Pengurangan emisi</b></p>	<p>Pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh implementasi strategi REDD+ atau kegiatan lain, yang merupakan selisih antara emisi tingkat acuan dasar atau referensi dengan emisi aktual, setelah kebocoran selesai dihitung. Setelah terpantau, ini akan dilaporkan sebagai unit untuk pembayaran pendanaan karbon.</p>
<p><b>Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+)</b></p>	<p>Kerangka kerja yang dibuat oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan serta menggencarkan peran pelestarian, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang.</p>
<p><b>Penyesuaian terkait</b></p>	<p>Sebuah entri akuntansi diterapkan dalam konteks Pasal 6 Persetujuan Paris untuk menjelaskan transfer internasional hasil mitigasi. Suatu negara yang memindahkan pengurangan atau penghapusan emisi sesungguhnya melakukan penambahan ke total emisi yang ditanggung oleh nationally determined contribution (NDC)/kontribusi tingkat nasionalnya, dan negara yang memperoleh serta menggunakan pengurangan atau penghapusan emisi melakukan pengurangan.</p>
<p><b>Perhitungan ganda</b></p>	<p>Satu situasi ketika satu pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca dihitung lebih dari sekali untuk mencapai mitigasi perubahan iklim. Perhitungan ganda dapat terjadi dalam bentuk pengeluaran ganda, penggunaan ganda dan/atau klaim ganda.</p>

## Istilah

## Definisi

### Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PRADIATAPA)

Prinsip bahwa persetujuan atas proyek, rencana atau tindakan apa pun harus diberikan di muka dan harus diputuskan dan diinformasikan secara independen berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu dan memadai yang diberikan dengan cara yang tepat secara budaya.

### Persetujuan Paris

Suatu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim yang diadopsi oleh 196 Pihak pada Conference of Parties (COP) 21 di Paris pada 12 Desember 2015. Tujuannya adalah untuk membatasi pemanasan global agar berada di bawah 2 derajat Celsius, terutama hingga 1,5 derajat Celsius, di atas level pra-industri. Untuk mencapai sasaran suhu jangka panjang ini, negara-negara bermaksud mencapai emisi global puncak secepatnya guna mewujudkan dunia netral iklim pada pertengahan abad ini.

### Program REDD+ yurisdiksional/program yurisdiksional

Serangkaian aktivitas yang diarahkan oleh otoritas yurisdiksional untuk mengurangi emisi berbasis hutan dan meningkatkan penghapusan di dalam area akuntansi menurut strategi atau rencana aksi, yang didukung oleh sistem pemantauan hutan dan kepatuhan pada pengamanan, serta kinerja yang dinilai berdasarkan tingkat referensi skala yurisdiksional. Catatan: Berbagai lanskap dan inisiatif keberlanjutan yurisdiksional mungkin tidak berupaya menghasilkan dan memperjualbelikan kredit REDD+ di pasar sukarela.

### Proyek-proyek yang diwadahi

Proyek yang berada di dalam lingkup program yurisdiksional yang terdaftar dan divalidasi oleh standar akreditasi ternama dan yang sudah mengintegrasikan acuan dasar emisinya ke dalam akuntansi pada tingkat yurisdiksional.

### REDD+ yurisdiksional yang diarahkan oleh Masyarakat Adat

Strategi yang diarahkan oleh masyarakat Adat untuk mengurangi emisi akibat penggunaan lahan dan perubahan pada tingkat yurisdiksi (dalam hal ini, wilayah Adat). Strategi ini didasarkan pada pedoman Amazon Indigenous REDD+, sebuah proposal oleh Coordinator of the Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA) yang memprioritaskan pengelolaan hutan dan wilayah Adat secara holistik, serta mengakui struktur tata kelolanya, serta memastikan tidak hanya penghormatan atas hak wilayah dan lahan serta PRADIATAPA untuk IP, tetapi juga partisipasi efektif dari IP di dalam prosesnya dan distribusi manfaat yang adil. Kawasan HFLD dimasukkan karena sebagian besar wilayah Adat, karena capaiannya dalam pelestarian hutan, adalah HFLD.

### Restorasi

Intervensi manusia atau praktik pengelolaan lahan (termasuk penghindaran disengaja dari gangguan manusia) untuk meningkatkan integritas ekologis di suatu kawasan tertentu dan sering menghasilkan peningkatan stok karbon dalam jangka panjang di kawasan bersangkutan.

## Istilah

## Definisi

### Strategi mitigasi di luar rantai nilai (BVCM)

Langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mencegah, mengurangi atau menghapus emisi gas rumah kaca di luar rantai nilai mereka. Contohnya meliputi pembelian kredit karbon berkualitas tinggi dan penyediaan pendanaan langsung untuk mitigasi iklim.

### Solusi iklim alami (NCS)

Suatu kerangka kerja dan serangkaian intervensi manajemen sumber daya yang dapat menghasilkan pengurangan emisi dan/atau peningkatan pengikatan karbon.<sup>lvii</sup> Semua intervensi ini dapat meliputi kategori ekosistem hutan, pertanian dan pemanfaatan lahan serta pantai/laut lainnya. Intervensi ini juga dapat diatur secara longgar menjadi intervensi yang melindungi, merestorasi atau mengelola sumber daya untuk mengubah fluks GHG yang berkaitan dengan sumber daya alam tersebut.

### Stok karbon

Jumlah karbon yang sudah diikat dari atmosfer dan lalu disimpan di dalam ekosistem hutan, terutama di dalam biomassa hidup dan tanah, serta pada tingkat yang lebih rendah, di dalam kayu mati dan serpihan.

### Target berbasis sains

Target yang selaras dengan tingkat dekarbonisasi yang diperlukan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata jauh di bawah 2 derajat Celcius (dan dalam upaya mencapai 1,5 derajat Celcius) di atas suhu pra-industri, seperti yang dijelaskan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim). Kecuali dinyatakan, target tersebut mungkin tidak divalidasi secara independen terhadap metodologi yang ketat.

### Tingkat referensi (RL) dan tingkat emisi referensi hutan (FREL)

Didefinisikan di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai “tolok ukur untuk menilai kinerja setiap negara” dalam mengimplementasikan kegiatan REDD+, yang dinyatakan sebagai ton emisi karbon dioksida tahunan. Tingkat referensi merujuk kepada estimasi emisi GHG dari deforestasi dan idealnya degradasi hutan, sedangkan Tingkat Emisi Referensi Hutan dipahami diketahui merujuk kepada estimasi fluks GHG bersih, termasuk penghapusan.

### Verifikasi dan validasi

Entitas pihak ketiga yang independen dan terakreditasi (sering disebut sebagai auditor) yang menilai apakah suatu proyek atau program, dan kredit karbon yang dikeluarkannya, sesuai dengan persyaratan standar penyertifikasiannya (misalnya, penilaian risiko pembalikan, kebocoran dan pengurangan ketidakpastian, dll.).

### Yurisdiksi

Dalam konteks pemberian kredit REDD+, suatu negara atau satuan politik/administratif subnasional yang besar, seperti negara bagian, provinsi atau wilayah Adat dengan otoritas mengeluarkan kredit untuk pengurangan dan penghapusan emisi karbon hutan.



## Akronim<sup>69</sup>

Istilah	Definisi
AFI	Inisiatif Kerangka Akuntabilitas
ART TREES	Arsitektur untuk Standar Keunggulan Lingkungan REDD+ dari Transaksi REDD+ (sering disebut hanya sebagai TREES)
BSP	Benefit sharing plan/skema pembagian manfaat (kadang-kadang disebut juga sebagai pengaturan pembagian manfaat)
BVCM*	Mitigasi di luar rantai nilai
COICA	Komite Koordinasi Organisasi Adat Lembah Amazon
ERPA	Perjanjian pembelian pengurangan emisi
FCPF CF	Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Dana Karbon
FPIC*	Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan/PRADIATAPA
FREL*	Forest reference emission level (tingkat emisi referensi hutan)
GHG	Gas rumah kaca
HFLD*	High forest, low deforestation areas or credits (Kawasan atau kredit hutan tinggi, deforestasi rendah)
IP*	Masyarakat Adat (sering digabungkan dengan "komunitas lokal" sehingga disingkat "IP dan LC")
ISO	Organisasi Internasional untuk Standardisasi
JNR	Standar REDD+ Yurisdiksional dan yang Diwadahi dari Verra

69 Akronim yang diikuti oleh tanda bintang (\*) didefinisikan dalam Glosarium.

Term	Definition
LC*	Komunitas lokal (sering digabungkan dengan “Masyarakat Adat” sehingga disingkat “IP dan LC”)
MRV*	Pemantauan, pelaporan dan verifikasi
NCS*	Solusi iklim alami
NDC*	Kontribusi tingkat nasional
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat
REDD+*	Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
RL*	Tingkat referensi
SBTi*	Inisiatif Target Berbasis Sains
TFCI Guide Version 2	Integritas Kredit Hutan Tropis (nama dokumen ini); versi kedua dari Panduan Integritas Kredit Hutan Tropis untuk Perusahaan
UNFCCC	Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
V&V*	Verifikasi dan validasi
VCM*	Pasar karbon sukarela
VCMi Initiative	Integritas Pasar Karbon Sukarela, inisiatif lain yang berupaya meningkatkan integritas pasar karbon sukarela
VCS	Standar Karbon Sukarela Verra, suatu standar tingkat proyek


## Catatan Akhir

Catatan: Angka Romawi di-hyperlink kembali ke lokasinya dalam teks.

i	Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, 12 Des 2015, T.I.A.S. No. 16-1104, <a href="https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf">https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf</a> .
ii	Goldstein, A., dkk. (2020). Melindungi karbon yang tidak dapat dipulihkan di dalam ekosistem Bumi. <i>Nature Climate Change</i> , 10(4): 287-295. <a href="https://doi.org/10.1038/s41558-020-0738-8">https://doi.org/10.1038/s41558-020-0738-8</a> .
iii	World Resources Institute. Tinjauan Hutan Global. Diambil 4 Mei, 2022, <a href="https://research.wri.org/gfr/global-forest-review">https://research.wri.org/gfr/global-forest-review</a> .
iv	Deutz, A., dkk. (2020). <i>Sifat Pendanaan: Menutup kesenjangan pendanaan keanekaragaman hayati</i> global. The Paulson Institute, The Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability. <a href="https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/reports/financing-nature-biodiversity-report/">https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/reports/financing-nature-biodiversity-report/</a> .
v	Climate Policy Initiative (2020). Pandangan Baru tentang Lanskap Pendanaan Iklim Global 2019 [Rob Macquarie, Baysa Naran, Paul Rosane, Matthew Solomon, Cooper Wetherbee]. Climate Policy Initiative, London, tersedia di <a href="https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/updated-view-on-the-global-landscape-of-climate-finance-2019/">https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/updated-view-on-the-global-landscape-of-climate-finance-2019/</a> .
vi	Mitra Penilai Deklarasi Hutan. (2022). Penilaian Deklarasi Hutan: Apakah kita di jalur yang benar untuk 2030? Fokus Iklim (koordinador dan editor). Dapat diakses di <a href="http://www.forestdeclaration.org">www.forestdeclaration.org</a> .
vii	Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, 2022: <i>Ringkasan bagi Pengambil Kebijakan. Dalam: Climate Change 2022: Mitigasi Perubahan Iklim</i> . Kontribusi Kelompok Kerja III terhadap Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (editor.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Inggris dan New York, NY, AS. doi: 10.1017/9781009157926.001.
viii	IPCC, 2018: <i>Pemanasan global 1,5°C</i> . <a href="https://www.ipcc.ch/sr15/">https://www.ipcc.ch/sr15/</a> . <i>Laporan Khusus IPCC tentang dampak pemanasan global 1,5°C di atas tingkat pra-industri</i> . [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (ed.)]. In Press.
ix	Parizat, R. <i>Kita tidak bisa menyelamatkan hutan tanpa sektor swasta</i> . Tropical Forest Alliance. Dapat diakses di <a href="https://www.tropicalforestalliance.org/en/insights/blogs/we-cant-save-forests-without-the-private-sector">https://www.tropicalforestalliance.org/en/insights/blogs/we-cant-save-forests-without-the-private-sector</a> .
x	Tropical Forest Alliance, World Wide Fund for Nature, and Proforest. (2020, September). <i>Tindakan Skala Lanskap untuk Hutan, Manusia dan Produksi Berkelanjutan: Panduan Praktis untuk Perusahaan</i> . Diambil dari <a href="https://jaresourcehub.org/wp-content/uploads/2020/09/JA-Practical-Guide.pdf">https://jaresourcehub.org/wp-content/uploads/2020/09/JA-Practical-Guide.pdf</a> .
xi	Veit, Peter G. (2021) <i>9 Fakta tentang Lahan Masyarakat dan Mitigasi Iklim</i> . World Resources Institute. <a href="https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2021-10/9-facts-about-community-land-and-climate-mitigation.pdf">https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2021-10/9-facts-about-community-land-and-climate-mitigation.pdf</a> .
xii	Frechette, Alain dkk. (2018) <i>Acuan Dasar Global Penyimpanan Karbon di Lahan Kolektif: Kontribusi masyarakat adat dan lokal terhadap mitigasi perubahan iklim</i> . Rights and Resources Institute. <a href="https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf">https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf</a> .
xiii	Frechette, Alain dkk. (2018).
xiv	World Resources Institute & Climate Focus. (2022). <i>Gagal atau sukses: Bagaimana tanah adat dan komunitas dapat mengangkat atau menjatuhkan kontribusi yang ditentukan secara nasional</i> . Penilaian Deklarasi Hutan. <a href="https://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2022/03/Sink-or-swim-IPLC-lands-and-NDCs.pdf">https://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2022/03/Sink-or-swim-IPLC-lands-and-NDCs.pdf</a> .
xv	World Wide Fund for Nature, United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre, GEF Small Grants Programme (ICCA-Global Support Initiative), LandMark Global Platform for Indigenous and Community Lands, The Nature Conservancy, Conservation International, Wildlife Conservation Society, UNDP Equator Prize, International Land Coalition Secretariat, Conservation Matters LLC, International Union for Conservation of Nature (2021), <i>Status Tanah dan Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal: Tinjauan teknis tentang status tanah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, kontribusi mereka terhadap pelestarian keanekaragaman hayati global dan layanan ekosistem, tekanan yang mereka hadapi dan rekomendasi untuk tindakan</i> , tersedia di <a href="https://www.fint.awsassets.panda.org/downloads/report_the_state_of_the_indigenous_peoples_and_local_communities_lands_and_territory.pdf">https://www.fint.awsassets.panda.org/downloads/report_the_state_of_the_indigenous_peoples_and_local_communities_lands_and_territory.pdf</a> .  Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana untuk Pengembangan Masyarakat Adat Amerika Latin dan Karibia (2021) <i>Tata kelola hutan oleh masyarakat adat and tribal. Peluang untuk aksi iklim di Amerika Latin dan Karibia</i> . Santiago. FAO. <a href="https://doi.org/10.4060/cb2953en">https://doi.org/10.4060/cb2953en</a> .  International Institute for Environment and Development (2020). <i>Rimbawan yang tak terlihat. Penilaian pendekatan untuk pengakuan dan penyebaran yang lebih luas atas pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat lokal.</i> , tersedia di <a href="https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G04468.pdf">https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G04468.pdf</a> .
xvi	Cook-Patton, S. dkk. (2021); Arlidge, W. N, dkk. (2018).

- xvii Schallert, B., Stevenson, M., Weber, C., Farsan, A., Nielsen, J., Ponce de León, P., dan Collins, N. (2020). *Melampaui Target Berbasis Sains: Cetak Biru untuk Aksi Korporasi tentang Iklim dan Alam*. World Wide Fund for Nature and Boston Consulting Group, tersedia di [https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond\\_science\\_based\\_targets\\_a\\_blueprint\\_for\\_corporate\\_action\\_on\\_climate\\_and\\_nature.pdf](https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets_a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf).
- xviii Untuk penjelasannya, lihat Inisiatif Sasaran Berbasis Sains (2021) *Mitigasi Rantai di Luar Nilai Versi T&J 1.0*. <https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Beyond-Value-Chain-Mitigation-FAQ.pdf>.
- xix Lihat, misalnya, *Pernyataan tentang Jalur Ambisi yang Tinggi Menuju Nol Bersih* oleh Pimpinan TSVCM (2021), tersedia di [https://www.iif.com/Portals/1/Files/High\\_Ambition\\_Path\\_to\\_Net\\_Zero.pdf](https://www.iif.com/Portals/1/Files/High_Ambition_Path_to_Net_Zero.pdf).
- xx Schallert, B., dkk. (2020).
- xxi Lihat, misalnya, *Pernyataan tentang Jalur Ambisi yang Tinggi Menuju Nol Bersih* oleh Pimpinan TSVCM (2021), tersedia di [https://www.iif.com/Portals/1/Files/High\\_Ambition\\_Path\\_to\\_Net\\_Zero.pdf](https://www.iif.com/Portals/1/Files/High_Ambition_Path_to_Net_Zero.pdf).
- xxii Lihat, misalnya, Pusat Sumber Daya Pendekatan Yurisdiksional yang dikelola oleh Tropical Forest Alliance, yang tersedia di <http://jaresourcehub.org/>.
- xxiii Schallert, B. dkk. (2020).
- xxiv Schallert, B. dkk. (2020).
- xxv Kerangka Kerja Warsawa untuk REDD-plus untuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, November 2013, tersedia di <https://unfccc.int/topics/land-use/resources/warsaw-framework-for-redd-plus>.
- xxvi Santilli, M., P.Moutinho, S. Schwartzman, D. Nepstad, L. Curran, dan Carlos Nobre. (2005). Deforestasi Tropis dan Protokol Kyoto: Esai Editorial. *Perubahan Iklim*, (71): 267-276.
- xxvii Lihat, misalnya, Koalisi LEAF Menggalang \$1 Miliar untuk Pelestarian Hutan Tropis. 2 November 2021, tersedia di [https://www.emergentclimate.com/wp-content/uploads/2021/11/Press-Release-LEAF-Coalition-Mobilizes-1-Billion-for-Tropical-Forest-Conservation\\_021121-1.pdf](https://www.emergentclimate.com/wp-content/uploads/2021/11/Press-Release-LEAF-Coalition-Mobilizes-1-Billion-for-Tropical-Forest-Conservation_021121-1.pdf).
- xxviii Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, 2022: Perubahan Iklim 2022: Mitigasi Perubahan Iklim. Kontribusi dari Kelompok Kerja III terhadap Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (editor.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Inggris dan New York, NY, AS. Doi: 10.1017/9781009157926.
- xxix Cook-Patton, S.C., Drever, C.R., Griscom, B.W. (2021). *Lindungi, kelola dan lalu pulihkan lahan untuk mitigasi iklim*. *Nat. Clim. Chang.* 11, 1027–1034 <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01198-0>.  
Lennox dkk., (2018) *Tingkat kedua atau kesempatan kedua? Menilai pemulihan biomassa dan keanekaragaman hayati dalam regenerasi Biologi Perubahan Global Hutan Amazon*. Vol 24. Terbitan 12. <https://doi.org/10.1111/qcb.14443>.
- xxx Goldstein, A., Turner, W.R., Spawn, S.A. dkk. (2020). Melindungi karbon yang tidak dapat dipulihkan di dalam ekosistem Bumi. *Nat. Clim. Chang.* 10, 287–295. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-0738-8>.
- xxxi Viet, Peter G., (2021); Lawrence, D., Coe M., Walker W., Verchot, L., dan Vandecar, K. (2022). Efek Deforestasi yang Tak Terlihat: Efek Biofisik terhadap Iklim. *Front. Untuk. Perubahan Dunia*. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.756115>;  
Di Marco, M., Watson J.E.M., Currie D.J., Possingham H.P., Venter O., (2018). Tingkat dan prediktibilitas korelasi keanekaragaman hayati-karbon. *Ecology Letters*. Volume 21. Terbitan 3. 365-375. <https://doi.org/10.1111/ele.12903>;  
Busch, J. dan Engelmann J., (2017). Efektivitas biaya pengurangan emisi dari deforestasi tropis, 2016–2050. *Environmental Research Letters*. Volume 13. Nomor 1. Efektivitas biaya dalam pengurangan emisi dari deforestasi tropis, 2016–2050 – IOPscience <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa907c>.
- xxxii Schwartzman, S. dkk. (2021). Integritas lingkungan dari pengurangan emisi bergantung pada skala dan perubahan sistemik, bukan sektor asal. *Environmental Research Letters* (16) 091001.
- xxxiii Gaia Amazonas (2020). *Apa rencana hidup Masyarakat Adat?*, tersedia di [https://www.gaiamazonas.org/en/noticias/2020-08-06\\_what-is-the-indigenous-life-plan](https://www.gaiamazonas.org/en/noticias/2020-08-06_what-is-the-indigenous-life-plan).
- xxxiv Lihat, misalnya, West, T. dkk., (2020). Pengurangan emisi karbon yang lebih-lebihkan dari proyek REDD+ sukarela di kawasan Amazon Brasil. *PNAS*, 117 (30).
- xxxv Schwartzman, S. dkk. (2021). Lihat juga, DeFries dkk. (2022) Pengelolaan lahan dapat berkontribusi pada nol bersih. *Science* (376), 1163-1165.
- xxxvi Schwartzman, S. dkk. (2021).
- xxxvii Schwartzman, S. dkk. (2021).
- xxxviii Duchelle dkk. (2019) *Mitigasi Iklim Berbasis Hutan: Pelajaran dari Implementasi REDD+*. World Resources Institute, tersedia di <https://www.wri.org/research/forest-based-climate-mitigation-lessons-redd-implementation>.
- xxxix Kerangka Kerja Warsawa untuk REDD-plus untuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, November 2013, tersedia di <https://unfccc.int/topics/land-use/resources/warsaw-framework-for-redd-plus>.

xl	Moutinho, Paulo, dkk. (2016). "Mencapai Nol Deforestasi di Amazon Brasil: Apa yang Hilang?" <i>Elementa: Science of the Anthropocene</i> , vol. 4, 2016, <a href="https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000125">https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000125</a> .
xli	Schwartzman, S., dkk. (2021).
xlii	Buchanan, J., dkk. (2019). <i>Menggal Realitas Pendekatan Yurisdiksional sebagai Alat untuk Mencapai Komitmen Keberlanjutan dalam Rantai Pasokan Minyak Sawit dan Kedelai</i> . Conservation International, tersedia di <a href="https://www.conservation.org/docs/default-source/publication-pdfs/jurisdictional_approach_full_report_march2019_published.pdf?sfvrsn=23c977ae_3">https://www.conservation.org/docs/default-source/publication-pdfs/jurisdictional_approach_full_report_march2019_published.pdf?sfvrsn=23c977ae_3</a> .
xliii	Duchelle dkk. (2019).
xliv	World Bank Group. (2021). Pilihan untuk melestarikan hutan stabil <a href="http://documents1.worldbank.org/curated/en/541251635971110855/pdf/Options-for-Conserving-Stable-Forests.pdf">http://documents1.worldbank.org/curated/en/541251635971110855/pdf/Options-for-Conserving-Stable-Forests.pdf</a> , yang menggunakan pendekatan historis 10 tahun yang disajikan dalam da Fonseca GAB, dkk. (2007). No Forest Left Behind. <i>PLoS Biol</i> 5(8): e216. <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050216">https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050216</a> .
xlv	Busch, J., Engelmann, J., Cook-Patton, S.C. dkk. Potensi penghapusan karbon dioksida berbiaya rendah melalui reboisasi tropis. <i>Nat. Clim. Chang.</i> 9, 463–466 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41558-019-0485-x">https://doi.org/10.1038/s41558-019-0485-x</a> .
xlvi	Da Fonseca GAB, dkk. (2007) Tidak Ada Hutan yang Tertinggal. <i>PLoS Biol</i> 5(8): e216. <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050216">https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050216</a> .  Roopsind dkk. (2019). Bukti bahwa program REDD+ nasional mengurangi kehilangan tajuk pohon dan emisi karbon di negara dengan bentangan hutan tinggi dan deforestasi rendah. <i>PNAS</i> . 116(49): 24492-24499. <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.190402711">https://doi.org/10.1073/pnas.190402711</a> .  Busch, J., dkk. (2009). Membandingkan dampak iklim dan biaya dari tingkat referensi untuk mengurangi emisi dari deforestasi. <i>Environmental Research Letters</i> . 4, 044006. <a href="https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/4/044006">https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/4/044006</a> .
xlvii	Veit, Peter G. (2021).
xlviii	Lawrence, D. dkk. (2022).  Seymour, F., Wolosin, M., & Gray, E. (2022, Oktober). Bukan Hanya Karbon: Menangkap Semua Manfaat Hutan untuk Menstabilkan Iklim dari Skala Lokal hingga Global. Dalam World Resources Institute. Diambil dari <a href="https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2022-10/not-just-carbon.pdf?VersionId=wAMy6XqQIQ.XlvkpFEfhirMuVignBeQ">https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2022-10/not-just-carbon.pdf?VersionId=wAMy6XqQIQ.XlvkpFEfhirMuVignBeQ</a> .
xlix	Di Marco, M. dkk. (2018).
I	Bapna, M., Brandon, C., Chan, C., Patwardhan, A., & Dickson, B. (2019, September). Beradaptasi Sekarang: Seruan Global untuk Kepemimpinan dalam Ketahanan Iklim. Dalam Komisi Global untuk Adaptasi. Diambil dari <a href="https://gca.org/wp-content/uploads/2019/09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf">https://gca.org/wp-content/uploads/2019/09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf</a> .
li	Architecture for REDD+ Transactions, (2021). Pemberian Wadah Berdasarkan Art, tersedia di <a href="https://www.artredd.org/wp-content/uploads/2021/12/Nesting-under-ART-final-July-2021.pdf">https://www.artredd.org/wp-content/uploads/2021/12/Nesting-under-ART-final-July-2021.pdf</a> .
lii	Verra (2021). Panduan Program JNR, tersedia di <a href="https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Program_Guide_v4.0.pdf">https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Program_Guide_v4.0.pdf</a> .
liii	Verra (2021). Skenario 1 Persyaratan JNR, tersedia di <a href="https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Scenario_1_Requirements_v4.0.pdf">https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Scenario_1_Requirements_v4.0.pdf</a> .
liv	Verra (2021). Skenario 2 Persyaratan JNR, tersedia di <a href="https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Scenario_2_Requirements_v4.0.pdf">https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Scenario_2_Requirements_v4.0.pdf</a> .
lv	Verra (2021). Skenario 3 Persyaratan JNR, tersedia di <a href="https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Scenario_3_Requirements_v4.0.pdf">https://verra.org/wp-content/uploads/2021/04/JNR_Scenario_3_Requirements_v4.0.pdf</a> .
lvi	Cook-Patton, S. dkk. (2021);  Arlidge, W. N, dkk. (2018). Hierarki Mitigasi Global untuk Pelestarian Alam. <i>BioScience</i> , <a href="https://doi.org/10.1093/biosci/biy029">https://doi.org/10.1093/biosci/biy029</a> .
lvii	Griscom, B. W. dkk. (2017, September). Solusi Iklim Alami. Dalam <i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i> . Diambil dari <a href="https://forestclimateworkinggroup.org/wp-content/uploads/2018/09/Griscom-et-al-2017-PNAS-Natural-">https://forestclimateworkinggroup.org/wp-content/uploads/2018/09/Griscom-et-al-2017-PNAS-Natural-</a>



Panduan ini berada dalam domain publik. Organisasi perumus mendorong peredaran secara luas. Pengguna dipersilakan mengunduh, menyimpan atau mendistribusikannya secara elektronik tanpa izin eksplisit.

Saran Kutipan: The Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA), Conservation International, Environmental Defense Fund, The Amazon Environmental Research Institute (IPAM), The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, World Resources Institute, WWF. (2022). *Tropical Forest Credit Integrity Guidance for Companies: Differentiating Tropical Forest Carbon Credit by Impact, Quality, and Scale*, tersedia di [TFCIGuide.org](https://www.tfciguide.org).

**Tanggal publikasi: Februari 2023.**

© 2023 COICA dkk.

Catatan: dokumen ini telah diperbarui pada bulan Maret 2023 untuk menyertakan Lampiran ke Langkah 3.

## Ucapan terima kasih

Organisasi perumus Panduan TFCl sangat menghargai individu dan organisasi berikut atas partisipasi mereka dalam proses peninjauan dan konsultasi. Ucapan terima kasih ini tidak menyiratkan dukungan terhadap isi.

Racquel Artwell, Five Star Quality and Justice Associates Jamaica Limited

BVRio

Christopher Chinapoo, Five Star Quality and Justice Associates Jamaica Limited/Trustee - Chartered Quality Institute

Maggie Comstock, Pollination

Pouaty Nzembialéla Davy, Association pour le Devenir des Autochtones et de leur Connaissance Originelle (ADACO)

Faelle Dubois, World Economic Forum

Rupert Edwards, Forest Trends

Ben Filewod, London School of Economics and Political Science

Mary Grady, Architecture for REDD+ Transactions (ART) Secretariat at Winrock International

Adrian Greet, A Greet Company Ltd.

Ruben Lubowski, Lombard Odier Investment Managers

Ludovino Lopes

Christina Magerkurth, Architecture for REDD+ Transactions (ART) Secretariat at Winrock International

Kavita Prakash-Mani

Giancarlo Raschio, The Gold Standard Foundation

Morten Rossé, Systemiq

Sylvera

Joshua Tosteson, Everland



